

Yosep Adi Prasetyo



PERS DI TERIK MATAHARI

(CATATAN OMBUDSMAN ACEHKITA PADA MASA DARURAT MILITER ACEH)



DEWANPERS

PERS DI TERIK MATAHARI

(Catatan Ombudsman Aceh Kita Pada Masa Darurat Militer Aceh)

PERS DI TERIK MATAHARI

(Catatan Ombudsman Aceh pada Masa Darurat Militer Aceh)



DEWANPERS

Pers di Terik Matahari

(Catatan Ombudsman Aceh pada Masa Darurat Militer Aceh)

Penulis:

Yosep Adi Prasetyo

Korektor : Samsuri
Foto Sampul : Murizal Hamzah
Desain/layout : Dedy M Kholik
Cetakan Pertama : Februari 2016
Hak Cipta pada © DEWAN PERS

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pers di Terik Matahari (Catatan Ombudsman Aceh pada Masa Darurat Militer Aceh)
Penulis: Yosep Adi Prasetyo
-Cet. I. –Jakarta: DEWAN PERS; 2016
XVI + 186 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77
Faks. (021) 3452030
www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers

Daftar Isi

Kata Pengantar

Prof. Dr. Bagir Manan (Ketua Dewan Pers 2010 - 2016) Jurnalisme dan Patriotisme	XI
Dandhy Laksono (Pemred Acehkita 2003-2005) Kami, di Antara Perang dan Ombudsman	XVII
1. Pemberitaan Aceh.....	1
2. Narasumber (1).....	5
3. Narasumber (2).....	9
4. Narasumber (3).....	13
5. 12240 Acehkita.....	19
6. Konflik Kepentingan	25
7. Desas-Desus (1).....	31
8. Desas-Desus (2).....	37
9. Desas-Desus (3).....	41
10. Sikap Jurnalis Adalah Independen dan Terbuka.....	45
11. Menanggapi Suara Pembaca (1).....	49
12. Pers Vs Kekuasaan	55
13. Wartawan, Intel, dan Kebebasan	59
14. Caption dan Foto	63
15. Pers Alternatif.....	67
16. Penyamaran	71
17. 1,5 Tahun Jurnalisme Patriotis	75
18. Tentang Foto Korban.....	79
19. Etika Jurnalisme Foto (1)	83
20. Etika Jurnalisme Foto (2)	87
21. Etika Jurnalisme Foto (3)	91
22. Acehkita Pasca Tsunami.....	95
23. Ketidakbiasaan	101
24. Menyoroti Suara Pembaca	105
25. Etika dan Sikap Menulis	111
26. Plagiarisme	115
27. Ambalat dan Jurnalisme Perang.....	119
28. Menggagas Jurnalisme Empati.....	123

29. Independensi, Kebebasan dan Netralitas Pers.....	129
30. Belajar Dari Sakitnya Pak Harto	133
31. Dua Tahun Masa Darurat Pers Aceh	141
32. Menatap Pers Aceh Masa Pemulihan	145
33. Deep Throat, Perlindungan Saksi, dan Indonesia	149
34. In Memoriam: Pers Pancasila.....	153
35. Jurnalisme Aceh Pasca-Helsinki	159
36. Keteguhan Jurnalis	167
37. Jurnalisme Aceh Pasca-Pilkada.....	171
38. Hak Publik.....	175

Epilog

Atmakusumah

Pelajaran Meliput dan Memahami Berita Konflik....	179
---------------------------------------------------	-----

PENGANTAR

Jurnalisme dan Patriotisme

Prof. Dr. Bagir Manan
(Ketua Dewan Pers 2010-2016)

Berbagai kalangan mempertanyakan pers Indonesia pada masa belakangan ini, khususnya sejak menjelang Pemilu 2014, cenderung mengalami penurunan kualitas. Berbagai pelanggaran kaidah jurnalistik terjadi.

Banyak pengamat pers menyatakan, bahwa di Indonesia peran kontrol yang dijalankan pers sesungguhnya jauh lebih efektif dan efisien ketimbang yang dilakukan parlemen. Pers tak perlu terikat pada jadwal dan tatib persidangan. Lagi pula kontrol sosial itu dapat dilakukan setiap saat.

Namun pers sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara tampaknya hanya *das sollen*, bahkan sekadar angan-angan. Ada banyak negara yang anti-demokrasi mencoba menginterpretasikan kebebasan pers sesuai kepentingan kekuasaan.

Di negara anti-demokrasi, pers kerap dianggap sebagai musuh. Laporan pers dianggap berpotensi menjatuhkan pemerintah. Malah ada pemeco “mata pena lebih tajam dari pedang” atau ucapan Napoleon Bonaparte yang mengatakan “pena lebih berbahaya ketimbang peluru”. Tentu saja itu cuma sebuah ilusi, sekaligus pengagung-agungan kekuatan pers secara berlebihan.

Pers sebagai bagian dari kekuasaan memang dapat memiliki beberapa fungsi. Mulai dari menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberi status legitimasi, hingga mendefinisikan dan membentuk persepsi atas sebuah realitas.

Pers dan media memang dapat juga digunakan sebagai alat propaganda oleh sebuah kekuatan politik untuk menyerang dan menjatuhkan lawan, sekaligus mempertahankan kepentingan kelompok politik.

Pers memiliki kekuatan, antara lain, melalui proses pembingkaiian (*framing*), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain. Pers berpotensi mengobarkan atau juga meredam konflik antar elit politik yang dapat menimbulkan benturan besar di tingkat akar rumput.

Media dapat memperjelas, sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya: mengaburkan dan mengeliminirnya. Media dapat merekonstruksi realitas, tapi juga dapat menghadirkan hiperealitas. Secara teoritis, ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik, termasuk konflik elit politik, yaitu sebagai *issue intensifier* dimana media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Isu yang diangkat media akan memunculkan dan menampakkan dimensi isu secara tajam.

Dengan posisi sebagai *intensifier*, media *mem-blow up* realitas yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Lainnya adalah sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis.

Selain itu, media juga dapat berfungsi menjadi pengarah *conflict resolution*, yakni sebagai mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Dengan peliputan media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk semula.

Sejumlah pengamat media menyatakan, para wartawan di Indonesia lebih banyak mempraktekkan jurnalisme omongan (*talking journalism*), yaitu jurnalisme yang lebih merupakan kutipan atas pernyataan seorang tokoh atau pejabat dan *counter* pakar atas pernyataan tersebut, atau sebaliknya.

Jurnalisme omongan yang lebih berorientasi pada pengejaran sumber-

sumber pejabat tinggi negara dan militer sebagai dasar legitimasi “fakta kebenaran” berubah menjadi sebuah peresmian desas-desus, rumors dan mungkin juga kisah fiksi.

Pola kerja dan liputan berdasar pada omongan ini membuat *news paper* diplesetkan sebagai *views paper*. Artinya, media lebih memberitakan tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan pikiran para narasumber.

Dalam hal konflik elit, media bukan hanya mempraktekkan jurnalisme omongan tapi juga dengan fasihnya mempraktekkan jurnalisme perang, sebuah hal yang kini tengah mendapat kritikan pedas di kalangan jurnalis.

Potensi munculnya kekerasan oleh media sangat besar. Selain pemelintiran fakta melalui praktek jurnalisme omongan, pembanjiran kata-kata dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kecuali hanya bersandar pada legitimasi jabatan; sejumlah media terbukti melakukan praktek kekerasan lainnya. Antara lain dengan menghadirkan *headline* serta judul pemberitaan yang berbeda (*misleading*) dengan isi pemberitaan dan kenyataan sebenarnya. Sejumlah media juga melakukan dramatisasi serta pengerasan fakta untuk mengobarkan rasa benci dan permusuhan. Pengutipan kata-kata dilakukan justru dengan memilih kata-kata narasumber yang paling keras dan paling kontroversial yang bisa menimbulkan konflik terbuka.

Kekerasan dengan cara yang berbeda dilakukan media dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memperhalus kata-kata (eufemisme), bahasa dan fakta. Cara yang selain menimbulkan efek terhadap munculnya sejumlah kata-kata bermakna ganda ini juga menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan menemukan fakta.

Unsur subyektivitas (personal) pengelola media, ketakberesan pengambilan keputusan dalam redaksi, masuknya *vested interest* pimpinan media dan *vested* permodalan juga merupakan salah satu dari banyak penyebab tidak obyektifnya pemberitaan sebuah media.

Selain kekerasan tekstual, media juga memiliki potensi kekerasan modal. Seperti diketahui umum, ada banyak pimpinan media yang berhasil membawa medianya sukses sebagai sebuah bisnis. Ada pula wartawan yang berkat medianya dapat menduduki sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan. Sejumlah wartawan juga berhasil masuk dalam kehidupan kalangan jet set. Mereka ini tentu saja memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang telah mereka raih.

Sejumlah pimpinan media ada yang melihat media yang dipimpinnya tidak lebih dari sebuah komoditi ekonomi. Dengan demikian, bukan pelunakan atau pengerasan fakta, bukan tak mungkin lebih merupakan strategi pemilik media untuk mengamankan aset atau menaikkan tiras media yang dikelolanya.

Apa peran pers sebenarnya? Di Indonesia, pers pada masa lalu kerap dibingkai dalam bahasa jargon. Ada banyak sebutan terhadap pers. Mulai dari “pers perjuangan”, “pers pembangunan”, “pers yang bebas tapi bertanggungjawab”, “pers Pancasila”. Orang lupa sebenarnya pers memikul fungsi sosial. Demikian pula wartawan tak lebih adalah seseorang yang tugasnya meliput sebuah kejadian. Tak lebih tak kurang.

Dengan demikian adalah terlalu berlebihan sebutan atau kiasan yang menggambarkan wartawan sebagai seekor “binatang” yang menggigit, apalagi menghisap darah, seperti yang tergambar lewat penyebutan “nyamuk pers” atau “anjing penjaga” (*watchdog*). Sama berlebihannya dengan menggambarkan pers sebagai sebuah pilar demokrasi.

Fungsi utama yang dijalankan media massa sebetulnya berperan sebagai saluran mediasi yang mencakup juga tugas “menghubungkan”, “menunjukkan arah” dan “mengintrepretasikan” serta tentu saja “mengoreksi”. Pengakuan pers sebagai bagian dari sistem pemerintahan memberikan kemungkinan pada pers untuk bertindak sebagai seorang inspektur yang selain “mengintrepretasikan” dan “mengoreksi” juga “mengritik” dan meminta sejumlah “pembenahan”.

Pakar komunikasi dari Universitas Amsterdam, Denis McQuail, membagi fungsi media massa secara sistematis menjadi lima bagian. Antara lain media massa menjalankan fungsi “informasi”, yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia; menunjukkan hubungan kekuasaan dan memudahkan inovasi, adaptasi serta kemajuan.

Media juga menjalankan fungsi “korelasi”, yaitu menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi; menunjang otoritas dan norma yang mapan; melakukan sosialisasi, mengkoordinasikan beberapa kegiatan; membentuk kesepakatan dan menentukan urutan prioritas serta memberikan status relatif.

Selain itu media juga menjalankan fungsi “kesinambungan”, yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subkultur) serta perkembangan budaya baru; dan meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai.

Fungsi yang lain adalah “hiburan”, yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi; meredakan ketegangan sosial.

Fungsi terakhir media massa adalah “mobilisasi”, yaitu mengampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama.

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 menyatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemerdekaan pers dijamin sebagaimana dinyatakan dalam konsideran bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Pers Indonesia mungkin kini saatnya melakukan aksi moratorium, berhenti mengutip kata-kata tokoh dan pejabat yang saling menyakiti satu sama lain. Pers harus dapat berperan menggerakkan masyarakat terlibat dalam upaya penyelesaian dan penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Fungsi media saat ini harus dikembalikan ke asalnya, yaitu lebih menyoroti persoalan kemasyarakatan ketimbang konflik para elit yang tak bermutu.

Jurnalisme modern dipraktekkan di atas prinsip-prinsip profesionalitas. Untuk itulah dibuat standar dan aturan kerja yang baku. Termasuk dibentuk organisasi profesi dan upaya penegakan kode etik profesi.

Pekerjaan jurnalis yang hanya memegang kamera dan alat tulis, tak boleh dikait-kaitkan dengan nasionalisme. Sekali seorang jurnalis terlibat dalam pekerjaan pembelaan terhadap salah satu pihak/keompok, maka sesungguhnya ia telah menjalankan aksi propaganda.

Model *embedded journalism* dan pelatihan militer para jurnalis sebagai upaya mempraktekkan jurnalisme patriotis, ternyata banyak menimbulkan masalah, seperti terlihat dalam pengalaman Perang Vietnam.

Buku yang merupakan catatan Saudara Stanley saat menjadi Ombudsman majalah *Acehkita* ini menarik untuk dicermati kembali. Catatan yang ada tak dapat dilepaskan dari situasi pers dan politik yang ada

pada seputar pemberlakuan status darurat militer di Aceh pada Mei 2003. Dari kumpulan catatan ini kita dapat menemukan persoalan dan peran pers yang masih relevan saat ini.

Dalam kondisi apapun, pers seharusnya diberi kesempatan bekerja sebagaimana mestinya. Jurnalis yang bekerja meliput tak seharusnya dihambat, karena jurnalis pada dasarnya bekerja di lapangan seperti petugas Palang Merah: profesional sesuai standar profesi, non-partisan dan independen. Dengan memberi uniform, pelatihan khusus, perlengkapan militer dan lain-lain akan menjadikan seorang jurnalis tak memiliki netralitas sebagaimana dipersyaratkan dalam nilai-nilai profesionalitas.

Semestinya media dan jurnalis dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah dan siapa pun agar tak melakukan penyimpangan. Bila ini terlaksana, akan terjadi sinergi yang sesungguhnya tanpa perlu ada kesangsian dan pertanyaan tentang nilai-nilai patriotisme dari satu pihak atas pihak yang lain.

Bertrand Russell (1872-1970) menyatakan “*partriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons*” atau patriotisme adalah kesediaan untuk membunuh dan dibunuh karena alasan-alasan yang sepele. Mungkin keberadaan jurnalisisme patriotis perlu direnungkan kembali. Karena patriotisme bagi pers adalah juga berarti tetap menjadi *watch dog* bagi jalannya pemerintahan dan selalu mengingatkan pemerintah, terus mengungkap skandal-skandal korupsi, mengungkap ketidakadilan dan nasib rakyat kecil, dan juga membangun optimisme bangsa secara bersama-sama.***

PENGANTAR

Kami, di Antara Perang dan Ombudsman

Dandhy Laksono

Pemimpin Redaksi Acehkita (2003-2005)

19 Maret 2003, Amerika Serikat tanpa restu PBB melakukan invasi militer ke Irak dengan mengirim 200.000 pasukan. Inilah yang disebut Perang Teluk II. Tak ingin dipermalukan atau kecolongan seperti saat CNN merajai pemberitaan Perang Teluk I (1990), semua media berlomba-lomba mengirim wartawan dan melaporkan jalannya perang.

Media di Indonesia dilanda *euforia* yang sama. Sebuah stasiun televisi milik grup Kompas-Gramedia yang baru berdiri, TV7, menemukan momentum untuk mencuri hati penonton dengan me-*relay* siaran *Al Jazeera* yang berbahasa Arab. Para penerjemah dipasang secara bergantian. Nama CNN pun meroket saat Perang Teluk I karena para jurnalisnya berada di kota Baghdad dan memiliki teknologi yang dapat melakukan siaran langsung ke Atlanta.

Di Perang Teluk II kali ini, *Al Jazeera* yang di atas angin dan TV7 ikut menunggangi angin.

Media-media bermodal besar mengirim para jurnalisnya ke medan tempur. Sebagai negara dengan penduduk (beridentitas) muslim terbesar

di dunia, emosi mayoritas rakyat Indonesia memang menolak invasi. Bendera Amerika dibakar di kota-kota di Indonesia dalam rangkaian aksi unjuk rasa. Intinya, semua menolak perang. Segmen pasar ini lah yang dibidik media massa.

Tapi itu hanya sebentar saja. Persis dua bulan setelah agresi militer itu, 19 Mei 2003, giliran pemerintah Indonesia di bawah komando Panglima Tertinggi TNI yang juga Presiden, Megawati Soekarnoputri, menyatakan perang terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Posisi pasar langsung berbalik. Rakyat yang tadinya anti-perang, tiba-tiba berkobar-kobar mendukung perang. Media massa dengan gesit menangkap peluang itu.

Lewat jargon “jurnalisme patriotik”, apa yang pernah mereka cibir dari CNN saat Perang Teluk I dan II, kini mereka lakukan sendiri.

Menjelang pengumuman Darurat Militer itu, wartawan dimobilisasi untuk mengikuti latihan dasar-dasar ketentaraan di Sangga Buwana, Jawa Barat. Tentara melatih mereka agar mampu beradaptasi di medan tempur saat meliput. Ada teknik tiarap, meloncat, dan berguling menghindari serangan (*ambush*). Ada pula teknik bertahan hidup di hutan dengan meminum darah ular. Semua dalam balutan seragam tentara.

Media berlomba mengirimkan jurnalisnya untuk dididik di Sangga Buwana, dengan harapan mendapat tiket di kursi terdepan saat perang terjadi. Sementara tentara ingin memastikan dukungan media terhadap kampanye perang berbiaya Rp 4,5 triliun yang akan mereka gelar di Aceh.

Ketika peluit perang ditiup dan pasukan terjun payung dimuntahkan dari perut *Hercules* di langit Takengon, media-media di Indonesia benar-benar menerapkan “jurnalisme NKRI harga mati”.

Harian *Kompas* membuat rubrik khusus berjudul “Operasi Pembebasan Aceh”. Mirip “*Operation Iraqi Freedom*” yang menjadi jargon Amerika di Irak. Radio Elshinta setiap malam membuka telepon pendengarnya yang sebagian besar dari Jawa untuk memberi dukungan terhadap perang atas nama NKRI. Begitu juga dengan *MetroTV* yang memiliki program khusus setiap tengah malam tentang rangkuman berita-berita jalannya perang.

Detik.com, yang juga memiliki usaha *web developer*, membantu Markas Besar TNI membuat situs khusus untuk operasi militer ini.

Hasilnya bisa ditebak. Demam perang Irak telah menular. Jika Amerika mengusung jargon demokrasi di Irak, Indonesia mengusung “integritas wilayah NKRI” di Aceh. Dan di kedua kampanye militer itu, media menjadi “pemandu soraknya”.

Media tidak lagi menulis “Gerakan Aceh Merdeka”, melainkan “Gerakan Separatis Aceh”, istilah yang digunakan TNI/Polri. Media menulis “tewas” untuk warga sipil atau mereka yang dianggap gerilyawan, dan menulis “gugur” untuk pasukan dari Jakarta. Setiap hari disajikan kisah pertempuran antara “kebaikan versus kejahatan”, statistik perang, dan pernyataan para politisi atau jenderal.

Dalam suasana seperti itulah, situs *Acehkita.com* diluncurkan pada 19 Juli 2003. Tak ada tempat untuk warga sipil. Padahal, pelajaran terdekat dapat diambil dari jalannya perang Irak, di mana gegap gempita di awal perang diberitakan hingga penonton bosan, sementara tragedi kemanusiaan sesungguhnya justru mulai terjadi.

Begitu juga di Aceh. Setelah enam bulan, media mulai kelelahan atau kehabisan uang. Penonton mulai bosan, karena jalannya perang bukan seperti yang mereka tonton di CNN atau Al Jazeera. Perang di Aceh lebih “membosankan” karena tak ada pertempuran skala besar yang terbuka seperti di Mosul atau Tikrit. Perang di Aceh adalah perang gerilya. Perang di kampung Indrapuri, ladang di Keude Geurubak, atau di rimba Ulu Masen. Bukan di gurun terbuka atau di kota.

Tepat di saat semua sudah mulai jenuh, satu per satu orang hilang atau mati dengan berbagai kondisi.

Wartawan Anonim dan Ombudsman

Kami mendirikan situs *Acehkita.com* dan majalah *Acehkita*, dengan kesadaran bahwa kami tidak bisa memberitakan Aceh dengan leluasa. Untuk meliput di Aceh, wartawan harus mengantongi kartu pers khusus yang dikeluarkan Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Karena berstatus darurat militer, maka semua hukum sipil, termasuk UU Pers, dianggap tidak berlaku.

Maklumat dikeluarkan agar pers tidak mengutip sumber-sumber GAM. Tanpa ikut rombongan tentara atau polisi, wartawan tidak bisa leluasa keluar masuk kampung mencari informasi. Setiap sore, ada *press briefing* di markas komando operasi.

Maka satu-satunya pilihan untuk mendapatkan informasi adalah sama seperti yang dilakukan kombatan: jalan “gerilya”.

Wartawan *Acehkita* diberi pilihan untuk menggunakan nama samaran atau nama asli untuk penulisan *feature*, dan cukup kode “AK” (akronim *Acehkita*) untuk *straight news*. Hingga dua tahun berjalan, kami memiliki AK-42, sesuai jumlah jaringan kontributor saat itu.

Memilih menjadi media alternatif punya risiko berita-beritanya dianggap tidak bermutu dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Karena itu kami memublikasikan alamat dan nomor telepon redaksi yang jelas. Mencantumkan nama semua penanggung jawab redaksi yang ada di Jakarta.

Lalu untuk menjaga kualitas dan integritas, kami pun sepakat menunjuk *Ombudsman*. Ini adalah pihak ke tiga yang akan menjembatani redaksi dan pembaca.

Sebagai pengawas, *Ombudsman* tidak berada di bawah redaksi. Dia bekerja independen untuk mengaudit kerja-kerja redaksi bila ada keluhan dari pembaca. Karena itu, dia harus lebih sakti dari orang yang paling sakti di redaksi. Bila ini media alternatif di medan tempur, seorang *Ombudsman* haruslah orang yang juga pernah bekerja di masa-masa konflik.

Tak banyak yang cocok untuk pekerjaan ini. Kalau pun ada yang cocok, belum tentu bersedia. Risiko, kerepotan, dan honor yang diterima dari yayasan, barangkali tak sebanding.

Maka kami pun mengundang Yosep Adi Prasetyo alias Stanley untuk mengawasi kami. Apakah kami sengaja memilih wartawan yang paling lunak untuk mengawasi kami? Saya tak perlu menulis ulang siapa Stanley dan latar belakangnya.

Lewat catatan-catatannya di buku ini, kita bisa menilai bersama-sama apakah jenis wartawan seperti ini bisa kami tipu-tipu dengan berbagai dalih teknis jurnalistik dan masalah-masalah di lapangan.

Seorang *Ombudsman* bahkan berhak memeriksa catatan wartawan, meminta rekaman, juga melihat notulensi rapat redaksi. Sesuatu yang bila dilakukan orang lain, bisa kena delik pidana penghalang-halangan kerja jurnalistik dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Tapi kami juga tidak ingin diawasi oleh jurnalis yang secara sadar memilih “NKRI harga mati”. Sebab kami hadir justru sebagai gugatan terhadap jargon itu.

Maka integritas yang diuji dan dipertaruhkan di sini adalah apakah kami meliput secara independen dan taat metodologi (etik).

Ketika banyak keluhan yang masuk ke redaksi karena kami dianggap pro-GAM, Stanley dengan tekun membongkar satu per satu berita kami dan membuat catatan.

Ketika foto-foto kami dikritik karena dianggap mengumbar sadisme (korban konflik), *Ombudsman Aceh* menulis catatan khusus sembari

merujuk praktik jurnalisme foto dalam konflik di berbagai negara.

Begitu juga saat banyak karya *Acehkita* yang dicomot media lain dan mengancam keselamatan sumber berita kami, Stanley justru membuat catatan yang menohok:

“Lantas siapa yang harus dipersalahkan? Kasus ini menyimpulkan bahwa kesalahan ada pada kedua belah pihak yang berperang. Perang seharusnya tak melibatkan orang-orang sipil yang umumnya justru menderita karena peperangan tersebut.” (lihat tulisan “*Caption* dan Foto”).

Padahal kami mengharapkan “vonis” yang lebih berpihak kepada redaksi. Tabloid *Modus*, yang mencomot foto kami tanpa permissi, jelas-jelas telah memelintir keterangan foto seorang warga sipil yang dimobilisasi untuk mencari kombatan GAM di hutan. Ini membahayakan keselamatan diri dan keluarganya.

Sebagai wartawan foto yang berpengalaman, wartawan *Acehkita* hanya menyodorkan sebuah fakta. Tak lebih tak kurang. Foto lelaki itu adalah bagian dari rentetan panjang kesaksiannya tentang tragedi kemanusiaan di Aceh yang banyak dipublikasikan media, baik di dalam maupun di luar negeri. Foto tersebut merupakan salah satu dari jepretan foto yang diambil tatkala ikrar kesetiaan dilakukan di sebuah lapangan, yang terbuka untuk publik umum.

Sedangkan dari sisi redaksional *Acehkita*, Stanley selaku ombudsman menegaskan bahwa pemuatan foto dan *caption* yang netral dan tak menjurus kepada undangan bermusuhan yang dibuat *Acehkita* sama sekali tak mengandung kesalahan. *Caption* yang dibuat telah memenuhi ketentuan 5W + 1H yang diperlukan untuk menjelaskan tentang kejadian foto. Tugas utama *caption* foto tak lain adalah untuk menyempurnakan pesan foto dan mendukung benang komunikasi yang kurang jelas pada foto tersebut.

Untuk pengambilan foto *Acehkita* oleh *Modus*, Stanley menganggapnya bukan hanya sebagai “kesalahan prosedural” karena mengambil foto tanpa izin tapi juga pelanggaran etika jurnalistik sebagai sebuah norma yang semestinya juga menjadi pedoman dan acuan utama kerja setiap wartawan dan media. Termasuk prosedur dan tatakrama pengutipan atau penggunaan bahan tulisan atau foto sebuah media oleh media lain. *Modus* bukan hanya tak menghormati koe etik tapi juga telah membelokkan substansi foto tersebut (lihat tulisan “Plagiarisme”).

Namun Stanley tampaknya lebih menitikberatkan pada peperangan yang semestinya tak melibatkan masyarakat sipil. Itulah fungsi Ombudsman yang lebih sakti dari jajaran redaksi. Substansi sebenarnya memang

persoalan warga sipil yang tak boleh dimobilisasi dalam perang horizontal melawan kombatan. Substansinya terletak pada pelanggaran hukum perang internasional. Bukan hanya soal hak cipta dan memanipulasi keterangan foto.

Stanley menyampaikan apresiasi redaksi *Acehkita* yang mencoba menemui si lelaki dan menjelaskan duduk perkaranya dan berusaha terus memantau keselamatan si lelaki.

Ketika perjanjian damai Helsinki ditandatangani, 15 Agustus 2005, justru kami lah di redaksi yang gantian berperang dengan pihak yayasan. Ombudsman Stanley yang notabene mendapat honor dari pihak yayasan, hanya memerdulikan satu hal: hak publik atas informasi. Stanley tidak masuk pada substansi konflik kami, dan hanya hirau pada apa yang menjadi mandat utamanya: publik atau pembaca.

Sebagai ombudsman, Stanley bertanya: Bukankah memang itu tujuan media alternatif seperti *Acehkita* dilahirkan? Mengapa justru *Acehkita* dimatikan?

Pondokgede, 28 Februari 2016

Pemberitaan Aceh

Para jurnalis mengabarkan bahwa perpanjangan masa darurat militer di Aceh kian mempersulit pekerjaan jurnalis. Ke mana saja pergi setiap jurnalis selalu dikuntit aparat. Sejumlah teman jurnalis yang pernah bertugas di Aceh mengatakan bahwa di sana tak ada lagi “binatang” bernama “nyamuk” (pers) dan “anjing” (pengawas dari *watchdog*), juga tak tersisa manusia yang berprofesi sebagai “kuli” (tinta dan disket). Yang ada, semuanya tinggal jurnalis “buaya”.

Benarkah pengetatan terhadap kerja telah mengubah jurnalis menjadi buaya? Pertanyaan ini benar-benar mengganggu saya. Benarkah pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap kerja jurnalis di Aceh telah memupuskan semangat kerja jurnalis Indonesia, sehingga tak ada lagi jurnalis jempolan yang bersedia bertugas meliput Aceh. Kegagalan saya kian bertambah bila melihat masyarakat saat ini sudah tidak terlalu peduli lagi dengan pemberitaan mengenai Aceh. Atau, kalau pun ada yang peduli, umumnya pembaca tak sepenuhnya percaya pada kejujuran berita yang bernada tunggal.

Salah satu hasil polling yang dilakukan media ini mengenai apakah media massa ikut mendorong atau setidaknya membiarkan wacana perpanjangan darurat militer menunjukkan bahwa masyarakat mempersalahkan media

massa. Dari 299 responden, 226 (atau 75,59%) penjawab berpendapat bahwa media massa telah ikut merndorong wacana perpanjangan darurat militer. Artinya, masyarakat menilai jurnalis media massa tidak secara baik menjalankan fungsinya sebagai nyamuk yang bertugas “menggigit” dan anjing yang bertugas “menggonggong”.

Media cetak dan televisi yang pada awal masa darurat militer berlomba-lomba membuat rubrik tentang “Operasi Terpadu” kini nyaris tak lagi memberikan tempat untuk pemberitaan mengenai Aceh. Berita yang muncul lebih banyak bersumber dari sumber militer. Belakangan, menjelang terjadinya peringatan hari jadi kelompok GAM, media lebih banyak memberitakan tentang aksi-aksi penolakan masyarakat Aceh terhadap GAM yang disertai aksi vandalisme berupa pembakaran bendera GAM dan patung Hasan Tiro. Pemberitaan Aceh sepertinya mengalami proses marginalisasi.

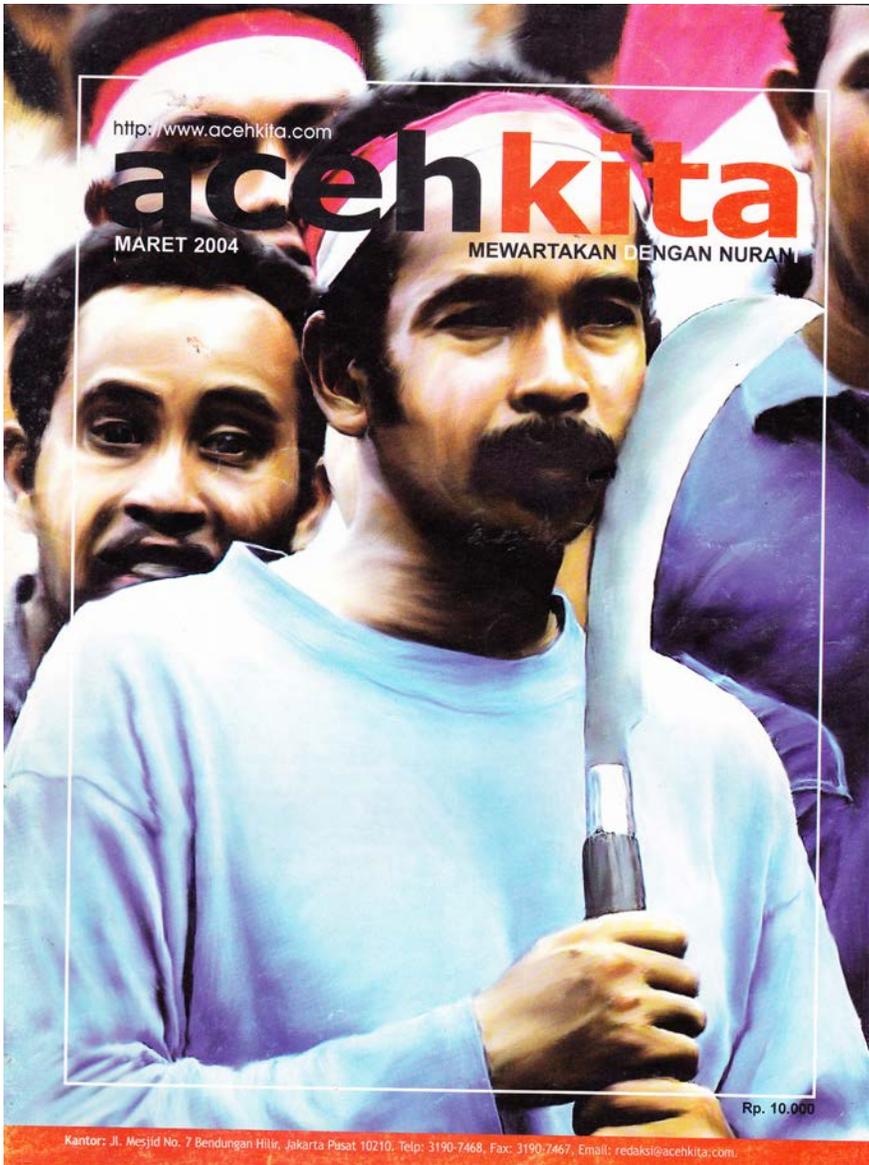
Mengapa mutu pemberitaan Aceh bisa merosot seperti itu? Penyebabnya jelas, tak adanya akses bagi jurnalis untuk mendapatkan fakta-fakta langsung di lapangan membuat hampir semua berita menjadi kering dan menjemukan. Jangankan sebuah laporan investigasi, jurnalis hanya bisa menulis secara 4 W saja dalam berita yang dibuatnya. Yaitu hanya *What, Who, Where* dan *When*. Jurnalis tak mampu mengemukakan unsur yang terpenting dalam sebuah berita yaitu *Why* dan *How*. Sebuah hal yang menimbulkan pertanyaan, apa memang benar ini bagian dari paradigma jurnalisisme patriotisme yang dulu didengung-dengungkan di awal pemberlakuan status darurat militer.

Barangkali juga ada banyak penyebab lain misalnya pemberitaan mengenai hasil seleksi partai-partai peserta Pemilu, korupsi BNI dan BRI, pencalonan Mbak Tutut sebagai calon presiden mendatang dan ancaman kembalinya Orde Baru yang lebih seksi saat ini.

Tidak akurat dan jeleknya kualitas berita mengenai Aceh inilah yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Banyak anggota masyarakat melihat persoalan Aceh sebagai persoalan NKRI dan pengkhianatan terhadapnya semata. Hal ini tercermin pula dari berbagai surat pembaca (rubrik Suara Pembaca) yang masuk, yang lebih banyak menulis masalah politik, ketimbang mempertanyakan *why* dan *how* setiap kejadian dalam pemberitaan mengenai Aceh.

Beberapa surat pembaca yang cukup membesarkan hati juga masuk ke redaksi. Salah satu surat (Sdr. Adelina Murni) memuji media ini yang dianggap lebih bisa mengungkap realitas yang terjadi di Serambi Mekah dan memberikan warna baru tentang Aceh.

Surat lainnya mempertanyakan tulisan dalam media ini yang seluruhnya berbentuk *features* dan bukannya *straight news*. Terus terang, saya tidak tahu, apakah media ini suatu saat akan memilih *straight news* dalam cara penulisannya. Justru penyajian model *features* yang mampu membebaskan seorang jurnalis dari kemungkinan terperangkap pada pembuatan berita “yang kering dan menjemukan”.*



Narasumber (1)

Siapa yang tak kenal Deep Throat? Siapa sebenarnya sosok manusia misterius yang menuntun pasangan jurnalis *Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein, untuk membongkar Skandal Watergate pada 1972 ini? Setiap jurnalis tahu bahwa yang menuntun kedua wartawan untuk mendapatkan Penghargaan Pulitzer tersebut adalah tokoh yang super misterius. Ia selalu muncul di balik kegelapan dengan topi yang sebagian menyembunyikan wajahnya. Informasi yang diberikannya selalu akurat dan menjadi bahan yang perlu ditelusuri.

Deep Throat tentunya adalah nama samaran dari narasumber kunci di balik pembongkaran skandal Watergate. Ia adalah tokoh yang tak bisa dihubungi. Ia hanya menghubungi Woodward apabila ada masalah yang sangat penting saja. Ia mengenal Woodward setelah *Washington Post* menurunkan serial investigasi mengenai tertangkapnya lima orang pencuri di markas Partai Demokrat yang penuh kejanggalan. Betapa tidak, ada pencuri masuk ke markas partai tertangkap basah dengan membawa sejumlah peralatan potret dan perlengkapan listrik.

Informasi digelontorkan Deep Throat setelah Woodward bersedia berjanji untuk tidak menyebut sumber, identitas atau kedudukannya kepada siapapun. Termasuk kesepakatan Woodward untuk tak mencatat namanya,

cukup hanya menyebut sebagai sumber yang tak mau disebutkan namanya. Deep Throat juga mensyaratkan bahwa pembicaraan dengannya hanya akan dilakukan untuk membenarkan suatu informasi yang diperolehnya dari sumber lain dengan beberapa tambahan saja.

Dalam praktek jurnalistik, informasi dari Deep Throat biasanya disebut sebagai *deep background* (sumber tersembunyi). Mula-mula Woodward mengusulkan kepada Howard Simons, pemimpin redaksi *Washington Post* untuk menyebut si tokoh dengan sebutan “seorang teman”. Namun, Simon mengusulkan untuk menyebut si tokoh dengan julukan “Deep Throat” saja. Nama ini diilhami dari film porno. Anda yang suka menonton film jenis beginian pasti tahu istilah yang populer hingga kini ini.

Kontak pertama antara Woodward dengan Deep Throat dilakukan melalui telepon, namun saat ketegangan Watergate kian memuncak, Deep Throat mulai kebingungan. Deep Throat tak mau berbicara melalui telepon, dan mengusulkan untuk mengadakan pertemuan rahasia di suatu tempat sewaktu-waktu.

Deep Throat juga tak mau menggunakan telepon untuk menentukan janji pertemuan. Dia memberikan saran kepada Woodward untuk membuka tirai jendela apartemennya sebagai isyarat setiap kali ingin bertemu dengan dirinya. Namun Woodward lebih terbiasa membiarkan sinar matahari masuk ke kamarnya. Hingga kesepakatan berupa isyarat bendera merah kecil yang dipasang di pot bekas tanaman bunga di dekat jendela apartemen. Setelah isyarat dipasang pada pagi hari, pertemuan ditetapkan akan dilaksanakan pada pukul 02.00 dinihari di salah satu garasi bawah tanah. Deep Throat harus yakin bahwa Woodward tak dibuntuti.

Sebaliknya bila Deep Throat ingin bertemu, Woodward bisa menangkap isyarat dari halaman 20 koran *New York Times* yang diterimanya di rumah yang selalu diterima sebelum pukul 07.00 pagi. Kalau pertemuan perlu diadakan, nomor halaman koran berlangganan akan diberi tanda lingkaran dan waktu pertemuan akan ditulis di sudut bawah halaman. Woodward sendiri tak habis pikir, bagaimana caranya Deep Throat bisa mendapatkan harian itu.

Pemimpin redaksi *Washington Post* tahu bahwa informasi yang berasal dari Deep Throat sangat penting dan peka. Belum pernah apa yang disampaikan melalui Woodward adalah hal yang tidak benar. Bukan

hanya itu, Deep Throat menekankan bahwa *Washington Post* perlu berhati-hati karena perkara yang ditulis Bernstein dan Woodward melibatkan sejumlah orang dari CIA dan sekuriti nasional.

Deep Throat bukan hanya memberi informasi, tapi ia juga mendorong *Washington Post* untuk membuka tabir misteri yang melibatkan otoritas Presiden Nixon sebagai kegiatan mata-mata. Suatu kali Deep Throat juga melancarkan kritikan pedas terhadap konsep berita yang dibuat Woodward untuk *Washington Post*. “Terlalu lunak,” katanya. Woodward terpaksa merevisi beritanya sesuai anjuran Deep Throat.

Kini, setelah 30 tahun Presiden Nixon dipaksa mundur dari tampuk jabatannya sebagai Presiden AS, masyarakat Amerika dan kaum jurnalis masih dipenuhi teka-teki akan tokoh Deep Throat. Siapakah dia? Yang jelas bisa diduga ia adalah seorang tokoh yang mempunyai posisi kunci dalam pemerintahan Nixon. Banyak kalangan menduga-duga si Deep Throat tak lain adalah Kepala Staf Gedung Putih sendiri, yaitu Jendral Alexander Haig yang dikemudian hari menjadi tokoh penting dalam pemerintahan AS berikutnya. Namun, boleh saja orang menerka karena baik Deep Throat maupun Bernstein tetap pada komitmen mereka untuk menutup jatidiri Deep Throat.

Kasus Watergate memberikan ilustrasi yang menarik perihal peranan penting nasarsumber dalam kehidupan jurnalistik Amerika Serikat. Jurnalis berhak dan harus menutup identitas narasumber bila tahu bahwa hal itu berkonsekuensi pada keselamatan dan nyawa narasumbernya. Masyarakat menghormati hal itu. Artinya, masyarakat percaya pada jurnalis yang telah menjalankan pekerjaannya secara benar dan telah menguji kredibilitas narasumber yang dilindunginya. Nilai-nilai ini masih terus dihormati hingga sekarang, meski ada banyak skandal jurnalistik di AS yang melibatkan narasumber fiktif yang sengaja diciptakan oleh jurnalis.

Bagaimana kita di Indonesia? Di awal penerbitan *Acehkita* banyak mendapat pertanyaan, tak sedikit yang berupa kecaman, tentang nama-nama narasumber yang disamarkan. Sebagian dari mereka adalah para jurnalis dengan jam terbang cukup. Rupanya mereka merasa tak *sreg* bila jurnalis di alam kebebasan (reformasi) sekarang ini masih mencoba menutup-nutupi pekerjaannya. Mereka tak pernah tahu bahwa para jurnalis rupanya masih berada pada suatu iklim di mana mereka harus bekerja di tengah represi. Kalau bukan aparat keamanan, satgas parpol, ya kelompok preman siap mengintimidasi jurnalis yang dianggap merugikan kepentingan seorang “tokoh”.

Banyak orang lupa bahwa penyembunyian identitas narasumber sebetulnya hanyalah taktik yang dalam tradisi jurnalistik adalah sebuah kehormatan. Wawancara dan memburu informasi dari narasumber penting adalah bagian dari pekerjaan jurnalis untuk mengungkap kebenaran di balik berbagai praktek kebusukan dan pat-pat gulipat kekuasaan.

Penghormatan terhadap narasumber dengan menyamarkan identitas kini kerap mendapat kecaman. Orang lupa bahwa kita pernah punya H.B. Yasin yang bersedia masuk penjara hanya karena bertahan mati-matian untuk tak membuka identitas Ki Panji Kusmin yang telah menghebohkan masyarakat lantaran tulisan Langit Makin Mendung. Barangkali karena itulah kita tak pernah menemukan kasus pengungkapan skandal oleh jurnalis. Jurnalis lebih suka mempraktekkan *talking news*, sedangkan narasumber pemerintah lebih suka bertutur secara *officially* dan yang baik-baik saja sesuai standar staf humas.

Mungkin karena itulah Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara terkorp di dunia, tapi tak pernah ada koruptornya. Jurnalis juga tak pernah bisa membantu negeri ini menemukan penjahat, pelanggaran HAM dan kriminal besar lainnya.*

Narasumber (2)

Narasumber di mata seorang jurnalis profesional haruslah seseorang yang kredibel. Keterangan atau kesaksian yang diberikannya harus bisa dipercaya kebenarannya. Ucapannya bukan sekadar nilai-nilai normatif yang umum, tapi spesifik mengenai suatu hal atau topik yang sedang ditelusuri oleh si jurnalis. Narasumber yang baik adalah orang yang bisa mengeluarkan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan jabatannya. Bila perlu menyatakan pendapatnya sebagai individu.

Di Indonesia jurnalis kerap mewawancarai orang tanpa jelas juntrungannya. Jurnalis yang *ngepos* di sebuah tempat (biasanya instansi pemerintah) umumnya suka mewawancarai tokoh yang mereka temui secara beramai-ramai. Bahkan tak jarang umumnya ada banyak jurnalis yang tak siap berwawancara. Mereka hanya menyodorkan *tape recorder* dan merekam jawaban si narasumber atas pertanyaan yang diajukan beberapa teman sesama jurnalis. Si jurnalis perlu merekam pernyataan si narasumber meski terkadang tak bermakna untuk menambah jumlah narasumber berita mereka atau kadang demi menjaga azas “keseimbangan”. Seolah dengan mengutip pendapat banyak orang, terutama kedua belah pihak yang bersengketa plus pengamat, keseimbangan sudah ditegakkan.

Wawancara yang berlangsung secara sekenanya itu kerap disebut para jurnalis kawakan sebagai “wawancara tanpa makna”. Yang bertanya barangkali tak memahami makna dan persoalan yang hendak ditanyakan, yang menjawab memberi jawaban seasalnya saja. Wawancara model seperti ini bisa kita saksikan setiap hari dalam tayangan televisi. Demikian pula roh yang sama bisa kita temukan pada halaman koran, tabloid dan majalah. Salah satu penyebabnya adalah kesalah-kaprahan dalam hal melihat eksistensi narasumber. Banyak jurnalis terlanjur mempercayai bahwa kian banyak narasumber yang diwawancarai akan menghasilkan “keseimbangan”, tanpa memperhatikan kualitas narasumber yang kerap setingkat “asal-asalan” saja.

Jangan heran ada banyak status baru yang diciptakan media yang menyulap seorang akademisi yang pandai berkomentar menjadi “pengamat ini” dan “pengamat itu”, atau menyulap seorang pensiunan jendral atau intel menjadi “pengamat militer” dan “pengamat intelijen”. Bahkan ada banyak penulis di media, yang sebetulnya berperan sebagai seorang narasumber untuk masyarakat, memperkenalkan profesi baru yaitu “penikmat”, mulai dari sastra atau seni hingga filsafat.

Seorang redaktur kerap membuat surat penugasan kepada reporter berupa tugas berwawancara dengan sejumlah narasumber perihal suatu topik yang sedang aktual. Wawancara kemudian dilakukan oleh sejumlah jurnalis media yang bersangkutan berdasarkan pertanyaan pada surat tugas. Lantas si redaktur merangkum hasil wawancara. Apa hasilnya? Bukan sebuah rekonstruksi fakta, tapi sebuah rangkuman opini narasumber. Acap kali berita yang diturunkan malah hanya tanggapan atas pendapat yang kemudian berkembang menjadi tanggapan atas tanggapan. Kalangan dunia pers menyebut fenomena ini sebagai jurnalisme adu jangkrik, yaitu cara mudah jurnalis untuk menciptakan berita ketika tak ada berita yang seksi (“menjual”).

Narasumber memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang jurnalis. Selain untuk merekonstruksi sebuah kejadian, keterangan yang diberikan narasumber juga dibutuhkan oleh jurnalis untuk membangun sebuah obyektivitas. Bagaimana obyektivitas bisa dibangun dari pendapat seorang pengamat militer yang mantan jendral TNI yang notabene masih keluarga besar TNI (misalnya jadi anggota Pepabri).

Jurnalis, sebagaimana masyarakat umumnya, kerap silau dengan posisi dan jabatan seseorang. Kian tinggi dan penting jabatan seorang narasumber kian besar nilainya dan seolah-oleh merepresentasikan sejumlah kebenaran. Dalam jurnalistik dikenal sebagai *prominence*. Kaidah jurnalis “*big name big news, no name no news*” dalam paradigma wacana media di Indonesia di masa lalu, khususnya yang menyangkut pejabat, adalah mesin produksi berbagai anti-realitas. Di masa itu masyarakat bisa membaca pernyataan sejumlah pejabat tentang situasi yang aman, tertib dan terkendali, justru ketika kekacauan merebak di wilayah-wilayah yang menjadi tanggungjawab mereka.

Kita juga bisa merefleksikan kembali kasus yang pernah terjadi pada Oktober 1972. Saat itu orang masih awam dengan benda bernama *tape recorder*, apalagi yang berukuran mini. Ada seorang perempuan bernama Cut Zahara Fonna yang mengaku dirinya hamil 14 bulan. Bayi yang dikandungnya bukan sembarang bayi karena ia pandai bicara. Setiap orang yang mendekatkan telinganya pada perut Cut Zahara akan mendengar tangisan bayi dan pembacaan ayat suci Al Qur’an. Berbagai pemuka masyarakat, tokoh politik dan tokoh utama kenegaraan berlomba-lomba membesuk “bayi ajaib” dan menyatakan kekagumannya. Mereka juga meminta agar masyarakat ikut menyaksikan peristiwa ajaib itu.

Sejumlah pejabat negara, termasuk wapres Adam Malik dan Ibu Tien Soeharto, secara terang-terangan bahkan menyatakan kekaguman dan kepercayaannya akan adanya seorang “bayi ajaib”. Selidik punya selidik, tim dokter akhirnya menyimpulkan bahwa Cut Zahara tak lebih dari seorang perempuan penipu yang menyembunyikan kaset beserta *tape recorder*nya di balik stagen yang dibelitkannya pada perutnya. Bahkan dia tak mengandung janin apa pun juga, alias perutnya kosong-kosong saja kecuali diganjal sejumlah lapisan kain.

Pers pada waktu itu ikut larut dalam decak kekaguman akan fenomena ajaib tersebut. Hampir tak ada yang bisa membangun sikap kritis terhadap aksi berlebihan pejabat tinggi negara saat itu. Hanya Mochtar Lubis dan *Indonesia Raya* yang mengecam habis perilaku irasional dan pemujaan pada takhayul yang berlaku di kalangan para pejabat. Pers menyatakan bahwa kasus Cut Zahara adalah sebuah skandal memalukan dari pejabat tinggi negara. Tapi kasusnya sendiri kemudian tak berlanjut. Ekspos di

media dihentikan oleh penguasa. Namun, masyarakat saat itu sepertinya berharap media massa dapat terus berperan dalam memerangi sikap irasional yang masih tumbuh di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pers dianggap jadi alat pembebasan dan pemerdekaan pikiran rakyat, juga pejabat negara, dari kebodohan dan ketertindasan budaya. Pers juga dianggap bisa memfungsikan diri sebagai anjing penjaga terhadap penguasa agar bertindak lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaannya. Kaum jurnalis saat itu memetik pelajaran penting bahwa membangun obyektivitas dan sikap kritis jauh lebih penting daripada kemampuan meliput para pejabat.

Narasumber harus diposisikan sebagai alat untuk merekonstruksi sebuah kejadian. Jurnalis bertugas untuk membeberkan fakta-fakta menjadi berita (*news*), bukan membangun fakta-fakta pandangan orang (*views*).*

Narasumber (3)

Narasumber adalah orang yang ditemui jurnalis untuk dimintai penjelasan atau kesaksiannya mengenai suatu hal. Seorang narasumber mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menentukan status dirinya. Ia bisa menentukan bahwa apa yang dikatakannya hanya sekadar untuk latar belakang (*backgrounder*) saja, atau hanya beberapa bagian dari keterangannya yang boleh dikutip (*attribution*). Bahkan karena berisiko, ia bisa meminta agar keterangan yang diberikannya boleh dimuat asal namanya tak disebut atau dianonimkan. Untuk informasi berkualifikasi rahasia dan tak untuk konsumsi umum, ia bisa menentukan bahwa keterangan yang diberikannya tidak untuk dimuat (*off the record*).

Wartawan yang mewawancarai atau sedang mendengarkan penjelasan narasumber terikat pada ketentuan tersebut. Inilah prinsip dalam etika kerja jurnalistik. Bila hal ini dilanggar wartawan yang melanggarnya akan menjadi orang yang berstatus sebagai “orang yang tak layak dipercaya”. Dengan demikian ia akan kesulitan untuk mendapatkan informasi, terutama yang berdasarkan wawancara. Si wartawan juga akan dianggap sebagai orang yang tak tahu etika dan bukan wartawan profesional. Ia juga akan kesulitan untuk mendapatkan informasi berharga dari sumber-sumber penting.

Di Indonesia, para wartawan umumnya menghormati ketentuan ini. Bahkan di masa Orde Baru, para wartawan selalu berinisiatif untuk melindungi narasumber yang berposisi *underdog*. Acap kali seorang narasumber penting mendapat teguran dari atasannya atau pejabat politik yang lebih berkuasa akibat keterangan yang diberikannya pada wartawan. Dalam beberapa kasus bahkan narasumber yang umumnya adalah orang kecil, mendapat teror bahkan dibunuh oleh pihak yang tak menyukainya.

Karena itulah wartawan Indonesia umumnya merasa memiliki kewajiban melindungi narasumbernya. Terutama bila ada anggapan bahwa keterangan yang diberikan narasumber berpotensi menimbulkan sejumlah aksi balas dendam dari pihak yang tak menyukainya. Meski terkadang sang narasumber --terutama dari kalangan rakyat kecil-- menyatakan tak berkeberatan bila semua ucapannya dimuat atau disiarkan. Termasuk bila sang wartawan telah menanyakan ulang soal kesiapan narasumber menanggung risiko. Itulah tanggung jawab moral yang kerap ditunjukkan wartawan di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi tentang pemberitaan Aceh setelah pemutaran film "In Bed With TNI", sejumlah wartawan Indonesia mempertanyakan sikap moral si pembuat film yang merasa tak punya tanggung jawab dengan narasumber yang menyatakan tak berkeberatan untuk dimuat ucapannya. "Saya telah meminta ijin dan memberitahu risikonya. Bahkan ia meminta saya untuk menyiarkannya," ujar si pembuat film. Si narasumber, seorang ibu muda yang tengah menggendong bayi menyatakan bahwa dirinya adalah pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam film diambil wajahnya secara *close up*. Sejumlah wartawan muda merasa galau, jangan si ibu nasibnya juga akan sama dengan nasib sejumlah narasumber yang hilang atau terbunuh setelah wajah dan wawancaranya ditayangkan oleh stasiun TV.

Narasumber yang baik adalah narasumber yang tidak mengada-ada. Ia harus bisa membantu wartawan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa hingga mendekati kebenaran. Ia tidak boleh menyesatkan sebuah kejadian dengan bumbu-bumbu cerita yang tak ada hubungannya dengan fakta. Ia harus bisa menceritakan fakta-fakta yang dilihat, didengar atau diketahuinya. Seorang narasumber harus bisa mengungkapkan kenyataan sosiologis (fakta) dan bukan kenyataan psikologis yang kerap hanya berupa

makian, kebencian (*animosity*) atau rasa permusuhan semata.

Sebaliknya, si wartawan juga memiliki kewajiban untuk memotong atau tidak memuat sama sekali ucapan narasumber yang berisi kenyataan psikologis, yang kadang menghina akal sehat. Di masa lalu kita pernah melihat seorang jenderal menyatakan “saya bisa membedakan seorang komunis atau bukan hanya dari mendengar cara bersiulnya saja”, seorang presiden menyatakan “demonstrasi itu dilakukan oleh orang sinting” atau “ada setan gundul ikut mimbar bebas di kantor PDI”. Kita juga tahu bagaimana himbuan “seret Soeharto ke Sidang Umum” yang datang dari kalangan aktivis direspon aparat secara berbeda. Wartawan sebaiknya tidak sekadar memuat kata-kata yang sekadar kontroversial dan *eye catching* demi sensasi dan tiras semata, tapi juga harus mempertimbangkan unsur terpenuhinya akal sehat dan kewajiban melindungi keselamatan narasumber.

Seorang wartawan tak boleh mengada-adakan narasumber yang sebetulnya tak pernah ada, apalagi hanya karena kemalasan. Kerap seorang wartawan mengutip sebuah pernyataan atau keterangan berdasarkan “sebuah sumber yang bisa dipercaya” atau “seorang narasumber yang tak ingin diungkap jati dirinya”. Si wartawan ingin menunjukkan bahwa ia berhasil mendapatkan informasi eksklusif dari sebuah sumber penting yang menggambarkan situasi yang berbeda dari analisis atau kesimpulan yang ada. Kerap pula kutipan seperti ini dimuat hanya untuk menunjukkan bahwa ia menjalankan kewajiban meliput dari dua sisi (*cover both side*). Namun bila disimak lebih lanjut ucapannya sesungguhnya tak berisi apa-apa. Apalagi berisiko bagi si narasumber, andaikata si narasumber memang betul-betul ada.

Mengada-adakan narasumber, bagi seorang wartawan bisa berakibat fatal. Kalangan pers menyebut hal ini sebagai dosa profesional. Pengalaman *Washington Post* edisi 28 September 1980 yang memuat cerita penyebaran heroin di Ghetto, Washington, yang ditulis Janet Cooke adalah pelajaran yang berharga yang perlu dipetik para wartawan. Dalam tulisannya, Janet memuat kisah dramatis yang menurutnya ia saksikan sendiri, yaitu seorang anak bernama Jimmy berusia 8 tahun yang disuntik heroin oleh pacar ibunya yang seorang pengedar. Liputan yang menyentuh ini menimbulkan perhatian masyarakat luas dan polisi dipaksa bertindak. Polisi berupaya

mencari “Jimmy”, sang ibu, dan pengedar heroin yang jadi pacar ibunya. Tapi upaya polisi sia-sia. *Post* sendiri menyatakan tak bersedia membantu. Alasan yang dikemukakan *Post*, Janet Cooke telah berjanji kepada keluarga yang bersangkutan untuk melindungi rahasia mereka. *Post* kemudian menyertakan liputan ini ke perlombaan Hadiah Pulitzer dan Janet Cooke menerima hadiah bergengsi ini pada 13 April 1981.

Benarkah liputan Janet Cooke berdasar pada fakta? Masalahnya terungkap ketika anggota staf *Toledo Blade*, tempat Cooke bekerja sebelum pindah ke *Post* menemukan kejanggalan. Setahu mereka Cooke hanya mempunyai gelar sarjana muda. Namun *Associated Press (AP)* yang memberitakan soal pemenang Hadiah Pulitzer menulis, berdasarkan wawancara, bahwa Cooke adalah sarjana dari Universitas Toledo. Staf *Toledo Blade* lantas menanyakan kebenaran yang sesungguhnya dari *AP*. *AP* kemudian mengeceknya ke Vassar College, sekolah yang bersangkutan. Jawaban yang didapat ternyata Cooke hanya sempat kuliah satu tahun setelah menerima BA-nya, alias hanya sarjana muda.

Jadilah cerita Cooke menjadi skandal. *AP* dan Vassar College meneruskan temuannya ke *Post* pada 14 April 1981. Para editor *Post* mulai mempertanyakan riwayat hidup Cooke, termasuk kejujurannya. Beberapa anggota redaksi *Post* yang sejak semula merasa skeptis dengan kebenaran liputan Janet Cooke menggagas pemeriksaan terhadap integritas Cooke terutama yang menyangkut kejujuran. Melalui serangkaian pemeriksaan yang berkepanjangan dan emosional, Janet Cooke mengakui kecurangannya dan mengundurkan diri dari *Post*. *Post* tidak punya pilihan lain kecuali mengembalikan Hadiah Pulitzer dan menulis sebuah editorial berisikan permintaan maaf kepada para pembaca dan bersumpah untuk menyelidiki kasus ini. “Satu kejadian ini sudah terlalu banyak,” tulis editorial *Post*.

Tak hanya itu, pada edisi 19 April 1981, seorang mantan wartawan dan pejabat Duke University yang menjadi ombudsman koran tersebut, Bill Green, menurunkan tulisan sepanjang 18 ribu kata yang menyatakan bahwa tragedi Cooke bagi *Post* tak bisa dimaafkan. Green menggambarkan bahwa jajaran redaksi *Post* gagal dalam membangun komunikasi, penyuntingan, dan pemeriksaan yang memungkinkan seorang wartawan berusia 26 tahun yang baru 9 bulan bekerja di *Post* telah menyeret koran tersebut ke dalam skandal yang paling memalukan.

Green menyatakan bahwa kegagalan *Post* salah satunya adalah karena tak seorang pun dari atasannya secara langsung yang pernah mendesak Cooke untuk memberitahu identitas “Jimmy” yang sebenarnya. Para wartawan dan staf redaksi yang meragukan cerita Cooke tak pernah menyatakan keraguan mereka secara jelas dan tegas. Dan orang yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah editor kota Milton Coleman dan asisten editor pengelola Bob Woodward. Perlu diketahui nama terakhir ini adalah salah satu penerima Hadiah Pulitzer lantaran prestasinya dalam mengungkap Skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon.

Dalam Kasus Cooke, telah terjadi apa yang dinamakan upaya pencampuradukan fakta dan fiksi. Menulis berdasarkan fakta adalah dasar moralitas dan profesionalisme seorang wartawan. Tidak ada tempat bagi fiksi. Dengan demikian prinsip melindungi narasumber harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Di Amerika kasus Janet Cooke terjadi berulang-ulang dan menjadi skandal sejumlah media terkemuka.

Bagaimana di Indonesia? Kini ada banyak media sensasional hadir di masyarakat. Sejumlah media terkemuka juga tengah menghadapi tuntutan hukum. Wartawan harus membangun kembali sikap profesionalitasnya dan menemukan kembali tuntutan moral di balik profesinya. Apalagi saat ini ada banyak konglomerat dan pejabat yang bisa membayar mahal sejumlah pengacara untuk memaksa wartawan mengungkap jati diri narasumber yang sengaja dilindungi. Pengadilan juga bisa memaksa wartawan melakukannya, meski sebetulnya hukum internasional memberikan hak kepada sejumlah profesi untuk tidak mengungkap narasumber atau kliennya. Seperti halnya pastor, dokter dan advokat, wartawan mempunyai hak istimewa yang disebut sebagai hak ingkar. Jangan sampai wartawan mengingkari sendiri hak mereka sendiri.*



www.acehkita.com

aceh kita

informasi yang lebih jujur

Orang Aceh Pilih

SBY Mega atau Golput?

EKSKLUSIF: FOTO-FOTO KORBAN DARURAT MILITER

Rp 7.000,-

AGUSTUS 2004

12240 Acehkita

Hari ini tanggal 11 Februari 2004. Keadaan Darurat Militer di Aceh telah diberlakukan selama 268 hari. Media *Acehkita* telah berusia 204 hari sejak diluncurkan di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki. Andai saja waktu berhenti berdetak dan kita menoleh lagi ke belakang, kita akan menemukan banyak hal yang bisa kita renungkan. Lewat kedua hal ini kita bisa memeriksa kembali apa yang telah terjadi selama ini.

Selama 268 hari atau 16.080 jam media mengalami kemunduran sejak keterbukaan dimulai saat harian *Kompas* menurunkan headline berjudul “Selamat Tinggal Orde Baru” pada 21 Mei 1998. Nilai-nilai profesional jurnalistik telah tenggelam dan digantikan dengan wacana dominan RI sebagai sebuah negara kesatuan dan patriotisme yang menggebu-gebu. Di sisi lain, media tak menggunakan potensinya yang paling besar, yaitu kemampuan menggalang opini publik, untuk mempertanyakan berbagai kebijakan yang kontra-produktif bagi upaya penegakan HAM. Selama ini pula media mengondisikan masyarakat untuk menerima perang sebagai satu-satunya opsi yang bisa diambil.

Hasil pemantauan ISAI melalui *Aceh News Watch* sejak pemberlakuan Darurat Militer di Aceh hingga 31 Desember 2003 menunjukkan bahwa, media cetak dan televisi masih bekerja dalam paradigma pers Orde

Baru. Media lebih banyak mewawancarai pejabat dan petinggi TNI. Dengan demikian pemberitaan lebih merupakan sebuah perspektif yang elitis-birokratis. Media ternyata memiliki kemampuan rendah untuk mengungkap realitas di lapangan. Ada kemungkinan karena adanya hambatan dari penguasa darurat militer dan keputusan pemerintah untuk membatasi kegiatan jurnalis di Aceh. Yang jelas para wartawan lebih suka menghadirkan fakta psikologis para pejabat ketimbang fakta sosiologis. Dengan kata lain, praktek *talking news* ternyata masih merupakan gagasan dan tumpuan model kerja yang dipilih wartawan.

Melihat kecenderungan pemberitaan sejumlah media cetak dan televisi, bisa disimpulkan bahwa institusi media berada dalam taraf yang perlu digugat oleh masyarakat pembaca/pemirsanya. Media bukan hanya tak memiliki agenda dan menekankan orientasi nasionalisme semata, tapi ternyata juga tak mampu menurunkan berita secara profesional. Baik media cetak maupun televisi sama sekali tak melakukan cek dan ricek, tak meliput secara berimbang (*cover both side*). Semuanya tenggelam dalam hegemoni tentang NKRI. Yang lebih menyedihkan lagi, berdasar intensitas peliputan ternyata media menjadikan pemberitaan Aceh hanya sebagai “hiburan” dan “berita” *an sich*. Hanya meliput ketika suasana sedang panas.

Dalam memberitakan persoalan Aceh, media kehilangan daya “gigitan” nyamuk pers dan “gonggongan” anjing penjaga (*watch dog*). Tak salah bila sejumlah pegiat hak asasi manusia menuding wartawan Indonesia telah menyalah-gunakan kemampuan dan kewajibannya untuk membuat berita yang independen, kritis dan obyektif. Mereka menuding wartawan Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan perang di Aceh. Seharusnya wartawan Indonesia berkewajiban untuk melaporkan dan mengingatkan aparat keamanan agar tak menjadikan sasaran sipil sebagai bagian target operasi militer. Misalnya, pengecatan dan penandaan rumah penduduk sipil yang anggota keluarganya terlibat GAM, sama sekali tak dapat dibenarkan. Dalam dunia hukum, kejahatan perorangan tak bisa dijadikan dasar bagi munculnya penghukuman kolektif.

Bukan tak mungkin bila suatu saat wartawan Indonesia akan dituding telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kemampuan dan keberdayaan untuk melaporkan fakta-fakta di lapangan telah disalahgunakan sedemikian rupa hanya untuk mendukung sebuah

ideologi perang.

Lantas apa yang telah dilakukan *Acehkita*?! Saya mencatat selama 12.240 jam media ini, melalui dunia maya *cyberspace*, tetap konsisten menghadirkan fakta-fakta sosiologis dari lapangan. Fakta-fakta empiris ini dibangun dari persepsi dan kesaksian korban, dalam hal ini rakyat sipil. Sebuah persepsi alternatif yang disodorkan dalam paradigma jurnalisme damai.

Media ini sepertinya juga ingin mendobrak kemapanan media *mainstream* dengan menghadirkan hal yang dalam jurnalisme disebut sebagai jurnalisme advokasi (*advocacy journalism*). Pilihan terakhir ini tentu saja membawa konsekuensi sebuah sikap keberpihakan, yaitu harus membela kelompok yang lemah (*underdog*) dan lebih mewakili kepentingan publik yang barangkali, kalau bukan korban secara langsung, merasa lelah atau bosan dengan konflik. Pengelola media ini tampaknya yakin pada *vox populi vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, kebenaran bisa dikumpulkan dari ceceran fakta di sekitar korban dan mereka yang dianggap “hina dina” hanya karena tak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan. Sebuah sikap yang kemudian menjadi anomali di antara prinsip-prinsip profesionalitas seorang wartawan yang harus non-partisan dan berjarak agar selalu bisa obyektif.

Ketika opsi damai versus opsi perang saling dipertentangkan dan pilihan perang dibungkus dengan nasionalisme yang memojokkan pihak yang menolak perang sebagai pihak anasionalis, maka tak ada pilihan lain kecuali memilih sikap waras. Sikap ini yang sepertinya menjadi opsi pengelola media ini.

Pilihan ini bukan tanpa risiko. Ada banyak pembaca yang menghujat media kita ini sebagai a-nasionalis dan pembela gerakan separatis (GSA). Saya mencatat dari total 115 surat pembaca yang masuk ke redaksi hingga saat ini, tercatat ada 35 orang (atau 30%) yang menilai pemberitaan *Acehkita* secara negatif. “Terus saja memojokkan TNI dan pemerintah,” tulis Hamba Allah.” “Tolong dong, jangan terlalu menyalahkan TNI/Polri karena mereka hanya menjalankan tugas untuk mempertahankan negara ini...,” tulis Dennaldry. Tudingan keras juga dilancarkan oleh seorang pembaca bernama Atin yang menulis, “Aceh adalah wilayah NKRI, semua pemberitaan di situs ini merupakan provokasi yang sengaja diciptakan

untuk mewedahi segelintir orang yang ingin Aceh lepas dari NKRI. Pemberitaan situs ini tak berimbang. Berita-berita yang ditampilkan hanya aspek-aspek negatif dari pemberlakuan darurat militer...”

Kita tak boleh menebak-nebak mewakili kepentingan siapakah penulis yang mengecam media ini. Dalam demokrasi boleh saja setiap pihak menyampaikan pendapatnya. Apalagi melalui dunia maya dimana nama bisa disamarkan dan identitas individu bukan hal penting lagi. Namun, yang perlu saya sampaikan di sini, pujian terhadap media kita ini yang masuk melalui surat pembaca total mencapai 40 orang (atau 34% dari 115). Mereka menyambut secara positif kehadiran media ini. “Terus terang saya salut dengan situs ini yang berani tampil beda di saat pers Indonesia sedang sekarat didikte TNI/Polri,” tulis Fernando. “Selamat atas keberanian *Acehkita.com* yang mengungkapkan fakta dan data yang lebih obyektif mengenai kondisi Aceh. Saya yakin keberanian dalam mengungkap fakta bukanlah gampang, penuh risiko,” tulis Syafruddin Siregar. “Saya bangga dengan kehadiran *Acehkita* karena dengan kehadiran *Acehkita* banyak sekali informasi yang saya dapat karena informasi tentang Aceh disimpan oleh PDMD semua,” ujar Erna.

Siapakah para pemuji media ini? Mereka mewakili masyarakat pembaca awam yang haus informasi yang jujur? Mereka mewakili masyarakat yang kecewa pada *media mainstream*? Mereka mewakili warga Indonesia yang cinta NKRI sekaligus yang mencintai perdamaian? Ataukah mereka mewakili anasir-anasir GAM sebagaimana dilansir oleh kelompok pembaca yang menuding media ini menjadi kendaraan GAM? Dari beberapa surat pembaca yang saya periksa, pemuji media ini adalah mereka yang mewakili domain yang ke tiga yang tak mewakili mereka yang membela NKRI atau pun GAM. Mereka adalah orang yang meratapi bertambahnya deretan korban (*victims*) dan kurban (*sacrifices*) di negeri ini. Mereka adalah orang kecil yang dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini tak pernah memikirkan secara langsung apa itu ideologi negara, pertikaian politik, konflik elit, mega korupsi, tersumbatnya arus informasi dan banyak hal yang dicemaskan oleh kaum cerdik pandai di negeri ini.

Ada banyak pembaca lain (36% dari 115 pembaca) yang menilai media ini sebagai biasa-biasa saja. Netral. Mereka beranggapan media ini tak lebih dari sebuah media. Banyak di antara mereka yang ingin menggunakan

rubrik “surat pembaca” untuk menyampaikan informasi (misalnya tentang tindakan penyelewengan oknum Polri di Tegal), ucapan bela sungkawa terhadap kematian Ersu Siregar dan lain-lain.

Semoga penulis surat pembaca ini mewakili gambaran riil *Acehkita*. Sebab saya yakin dalam masyarakat kita saat ini masih dominan apa yang kerap disebut sebagai mayoritas diam (*silent majority*). Di zaman Orde Baru sedang kuat-kuatnya berkuasa, seorang teman dari tanah seberang pernah menyatakan penilaiannya terhadap pers Indonesia saat itu. Menurutnya, semua koran yang dibacanya saat itu isinya semua adalah kebohongan. Kalau ada kenaikan BBM, selalu ditulis tak ada “kenaikan” yang ada adalah “penyesuaian”. Tak ada “penangkapan” yang ada adalah “pengamanan”. Tak ada “penyiksaan” yang ada adalah “pembinaan”. Di tengah situasi kacau dan amuk media melaporkan keadaan dengan mengutip ucapan pejabat yang mengatakan “keadaan aman terkendali”. Dan seterusnya.

Teman saya juga mengatakan bahwa untuk menemukan fakta dalam media pembaca surat kabar Indonesia harus bisa meng”Invers”kan berita yang dibaca. Misalkan ada pejabat menyatakan “tak ada perpecahan dalam kabinet, berarti yang terjadi sesungguhnya adalah “kabinet sedang mengalami perpecahan”. Sebuah bantahan harus diartikan sebagai membenaran. Sebuah penyangkalan harus dimengerti sebagai sebuah penyangkalan. Itu di zaman Orde Baru.

Lebih lanjut teman saya, bahwa dalam represi Orde Baru, media di Indonesia yang bisa dipercaya kebenarannya hanya ada 2, yaitu rubrik “surat pembaca” dan “pojok/sindiran”. Sisanya berisi eufemisme, kebohongan, bantahan dan pernyataan. Bukan fakta-fakta.

Acehkita di titik 12.240 dan darurat militer Aceh di titik 16.080. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan media? Di mana gerangan wartawan? Saya merasa sendiri dalam kesunyian. Barangkali kita tengah berada di titik nol peradaban media.*

EKSKLUSIF: FOTO-FOTO KORBAN KONFLIK

www.acehkita.com

acehkita

informasi yang lebih jujur

Aceh Tinggal Ampas?

4.400

Karyawan
Proyek-Proyek Vital
Dirumahkan

ISSN 1829-8427



ISSN: 1829-8427

Rp 7.000,-

SEPTEMBER 2004

Konflik Kepentingan

“Era pers perjuangan telah berakhir,” kata banyak jurnalis. Memang, pers tak lagi berjuang melawan penjajahan dan segala bentuk penindasan, tapi kini pers berjuang meraih oplah setinggi-tingginya, berjuang memakmurkan karyawan dan memajukan perusahaan.

Pergeseran peran jurnalis tampak di kalangan tokoh-tokoh pimpinan media. Kerap orang menyaksikan mereka menghadiri acara-acara mewah di hotel berbintang lima. Atau duduk semeja dengan jenderal, pejabat atau konglomerat. Tak jelas apa yang mereka perbincangkan, kecuali sekali-sekali tampak tertawa terkekeh-kekeh.

Adakah yang salah? Tak ada. Jurnalis pada dasarnya memang harus orang yang supel yang bisa bergaul dengan siapa saja. Ia harus bisa akrab mulai dengan gelandangan hingga presiden. Yang dilarang hanyalah melakukan persekongkolan. Boleh saja membangun lobi, tapi harus tetap mengambil jarak, bersikap kritis, dan mempertahankan independensi.

Kedekatan seorang jurnalis –terutama kalau ia pemimpin media— dengan seorang petinggi baik pejabat sipil maupun militer kerap berujung pada terjadinya persekongkolan. Si jurnalis menggunakan si pejabat untuk sarana melakukan *rechecking* atau konfirmasi, sedangkan si pejabat menggunakannya untuk mengarahkan informasi. Dalam sejumlah kasus

di mana nama si pejabat dan jajarannya dipertaruhkan, kerap ia meminta bantuan si jurnalis mulai dari tidak menulis ini dan menulis itu hingga tidak memberitakan kasus tersebut.

Pada zaman Orde Baru reportase seorang wartawan kerap diedit oleh pimpinan mediana atas permintaan pejabat yang jadi kenalan pimpinan media. Ada banyak pejabat yang kerap meminta ini dan itu. Mulai dari kejaksaan, dinas penerangan, Cilangkap, Deppen hingga Setneg. Acap kali hal beginian menimbulkan frustrasi bagi kalangan jurnalis di lapangan yang rata-rata memiliki idealisme tinggi.

Ada banyak model kedekatan jurnalis dengan pejabat atau pengusaha yang sebetulnya bisa menimbulkan konflik kepentingan. Mulai dari undangan meliput di mana tiket pesawat, hotel dan uang saku disediakan sang pengundang. Bahkan kerap masih diberi barang cendera mata yang bentuknya bisa beragam mulai dari tas, gantungan kunci, topi, jaket, hingga barang elektronik yang berharga jutaan rupiah.

Di kalangan jurnalis yang bekerja di lapangan dikenal istilah amplop. Fenomena amplop tak lain sebetulnya adalah fenomena sogokan di mana uang pemberian diberikan dengan cara dimasukkan amplop. Umumnya pemberian ini diberikan saat jurnalis diundang menghadiri undangan instansi pemerintah, BUMN atau militer, atau acara peluncuran sebuah produk oleh perusahaan. Biasanya acara bagi-bagi amplop telah dikoordinir wartawan kepercayaan instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Tidak pernah diketahui, berapa besar uang yang diterima para koordinator itu. Yang jelas, sang koordinator membagi amplop secara seragam pada teman-temannya. Kemungkinan kelebihan amplop disimpan sendiri oleh sang koordinator. Demikian pula dengan liputan acara hiburan, seni, dunia selebritis dan artis tak jauh berbeda. Masing-masing telah punya koordinator sendiri.

Wartawan di Indonesia menganggap pemberian amplop adalah hal yang wajar. Apalagi wartawan senior yang juga pernah jadi ketua Dewan Kehormatan PWI, Rosihan Anwar, malah menganjurkan agar para wartawan tak menolak pemberian amplop. Pada zaman PWI di bawah kepemimpinan Sofyan Lubis, sang ketua juga menganjurkan hal serupa. “Sejauh hal itu tak ada paksaan dari si wartawan atau sumber berita,” ujar Sofyan Lubis mencoba berkilah bahwa hal itu tidak bertentangan dengan

kode etik dan moralitas seorang wartawan.

Masalah amplop adalah masalah pelik yang juga terkait dengan fenomena para “penjahat”, para “oknum” yang mempunyai jabatan dan usaha penting. Mereka ini punya kepentingan dengan adanya publikasi positif tentang dirinya. Untuk itu mereka melakukan gerakan amplopisme sebagai upaya sogokan. Yang terjadi kemudian adalah sebuah simbiosis mutualistis, di mana si wartawan dapat uang dan si tokoh dapat nama baik.

Sejumlah kalangan lebih melihat moralitas sebagai salah satu penyebab menjamurnya budaya amplop. Menurut mereka nilai-nilai moralitas bangsa ini memang tengah merosot drastis. Hal ini antara lain bisa dilihat bagaimana para jurnalis yang menghadiri undangan seminar sehari biasanya datang menjelang waktu makan siang dan segera pergi setelah menikmati makan siang gratis. Artinya, peristiwa politik dan perjumpaan dengan narasumber, di mata kebanyakan jurnalis, tak lebih adalah peristiwa ekonomi biasa, yaitu sekadar cari bahan dan formalitas wawancara serta bisa makan gratis.

Selain itu juga dikenal istilah “wartawan Bodrex”. Tentu saja hal ini tak memiliki kaitan dengan obat sakit kepala produksi PT. Bayer Indonesia. Wartawan dari kalangan ini setiap tengah bulan selalu “sakit kepala” akibat harus memikirkan kebutuhan diri dan keluarga yang tak tercukupi. Para wartawan yang umumnya tak memiliki media tempat bekerja ini kemudian mencari-cari kesalahan orang yang bisa diperas dengan cara menuliskannya sebagai berita dan kemudian mendatangi si tokoh. Kepada sang tokoh si wartawan menyodorkan berita yang dibuatnya dan menawarkan apakah si tokoh berkeberatan dengan tulisan tersebut. Bila berkeberatan si tokoh bisa mengambil “konsep” berita tersebut asal membayar dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Wartawan jenis Bodrex umumnya suka berkumpul dan duduk-duduk di lobi hotel-hotel terkemuka. Mereka memiliki jaringan informasi yang kuat. Dengan cepat mereka mampu mengendus acara-acara yang layak didatangi. Kalau tak mendapatkan amplop, ya umumnya mereka akan ikut makan siang atau malam secara gratis. Mereka umumnya menggunakan ponsel untuk berkomunikasi di antara sesama mereka dan berpenampilan mirip wartawan, lengkap dengan *blocknote* dan perekam. Sebagian besar dari mereka bahkan memiliki kartu pers, namun kalau diteliti lebih

detail identitas medianya, kita tak akan pernah menemukan media yang bersangkutan.

Cara kerja lain wartawan Bodrex adalah menggunakan model pemerasan. Mereka mendatangi pengusaha dengan menunjukkan kartu pers dan menyatakan ingin wawancara. Para pengusaha yang umumnya telah hafal dengan langgam semacam ini biasanya akan langsung menyodorkan segepok uang sambil mempersilakan si wartawan untuk pergi.

Sejak 6 tahun terakhir sejumlah wartawan yang medianya menerapkan kebijakan melarang menerima amplop memilih jalan lain yang lebih canggih, halus dan tak mencolok mata. Mereka memberikan nomor rekening bank pada sang narasumber, hingga uang bisa langsung ditransfer ke rekening bank wartawan bersangkutan. Demikian juga parcel yang di sejumlah media diputuskan dibagi rata untuk seluruh karyawan, oleh wartawan kalangan ini dianjurkan untuk langsung di antar ke rumah, bukan ke tempat kerja. Luar biasa.

Fenomena amplopisme hampir merata di kalangan wartawan. Termasuk di kalangan media terkemuka di Jakarta. Kalau pun ada media yang malu-malu menolak amplop, pemimpin media justru tak malu menerima tiket pesawat, fasilitas penginapan di hotel, liburan di spa, jamuan makan, tiket nonton, bahkan undangan main golf dan layanan khusus mulai dari belanja dengan kartu kredit hingga limit tertentu sampai servis "lady escort". Artinya, yang kecil harus ditolak oleh reporter tapi yang lebih besar dan lebih nikmat diterima dengan tangan terbuka oleh pimpinan media.

Konflik kepentingan memang menghantui profesi seorang jurnalis. Bila seorang jurnalis mengalaminya bukan tak mungkin, ia akan kehilangan kredibilitasnya. Organisasi tempat ia bernaung juga akan ikut terpuruk. Pada dasarnya seorang jurnalis adalah sasaran dari sikap manis banyak pihak. Banyak kalangan berlomba memberikan sesuatu dan menunjukkan sikap manis pada jurnalis yang ditemuinya. Semuanya tidak lain sebetulnya merupakan sogokan yang bisa ditendensikan sebagai memiliki kepentingan untuk mempengaruhi pemberitaan dan cara kerja seorang jurnalis.

Siapa saja yang biasanya mencoba memberikan sogokan kepada jurnalis? Ada banyak pihak. Mulai dari pejabat, pembesar, event organizer, artis, tokoh, kepala humas perusahaan swasta/BUMN, staf humas instansi pemerintah instansi militer yang di sejumlah tempat memberikan semacam

tunjangan hidup atau “tunjangan kemahalan” bagi jurnalis. Tentu saja yang paling kerap adalah mereka yang berkategori sebagai penjahat, yaitu pengusaha bermasalah, penjudi, koruptor, serta birokrat problematik. Di musim menjelang Pemilu 2004 ini, daftar mereka yang berpotensi menjadi penyogok jurnalis kian panjang dengan masuknya partai dan para caleg yang berkepentingan agar namanya bisa terpublikasi secara luas.*

EDISI KHUSUS HUT TNI

www.acehkita.com

acehkita

informasi yang lebih jujur

Perang Untuk Siapa?

ISSN 1829-8427



Rp 7.000,-

OKTOBER 2004

Desas-Desus (1)

Negeri ini adalah negeri desas-desus, tempat di mana batas antara kebenaran dan ketidakbenaran begitu tipis. Banyak orang membicarakan tentang praktek korupsi yang merajalela di hampir semua lini, tapi sedikit koruptor yang bisa ditemukan untuk kemudian dihukum. Tapi toh negeri ini dianugerahi kehormatan sebagai negeri terkorup nomor 1 di dunia. Pemimpin negeri ini didesas-desuskan sebagai orang yang tak memiliki kecakapan memimpin, toh kenyataannya bisa terus memimpin. Desas-desus melanda hampir semua departemen, pejabat, aparat dan para tokoh di negeri ini. Mulai dari masalah sembako hingga masalah kehidupan pribadi para pemimpin.

Begitu populernya desas-desus, hingga stasiun TV berlomba-lomba mengangkatnya sebagai salah satu tayangan favorit. Jadi jangan heran kalau ada acara berjudul Go(sip) Show, E ko Ngegosip, Check and Recheck (yang tak lain hanya mengonfirmasi gosip), Hot Shot, Kabar-Kabari, dan lain-lain. Acara berkategori hiburan yang sarat dengan desas-desus ini sama halnya dengan berita-berita politik lainnya di televisi tentang sakit presiden, manuver pimpinan partai politik, ulah pejabat, tindakan sewenang-wenang oknum, praktek korupsi pejabat, hasil kerja departemen yang mengundang

tanda tanya, pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sebagainya. Semuanya berada pada batas antara ada dan tiada.

Kini Indonesia tengah memasuki musim kampanye Pemilu. Para tokoh dan partai politik mulai mengumbar banyak janji dan berlomba menyatakan seolah partainya adalah kecap dengan rasa nomor 1. Ada jenderal yang nekad mengabaikan aspirasi mayoritas masyarakat dengan mengatakan, “Mari jadi antek Orde Baru”. Sang jenderal pensiunan rupanya percaya pada rumus matematika $1: \sim = 0$, artinya sebuah pemerintahan (1) yang mengecewakan banyak rakyatnya (tak berhingga) akan menghasilkan nol dukungan. Nah, rupanya sang jenderal menafsirkan nol dukungan ini sebagai hal yang bisa dimanfaatkan dan dialihkan untuk mendukung junjungannya. Ia percaya bahwa masyarakat yang kecewa pada pemerintahan sekarang bisa dimanfaatkan rasa sentimen mereka menjadi kerinduan akan masa lalu. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia sekarang sedang dihinggapi SARS alias Sindrom Akut Rindu Soeharto.

Kita bisa melihat ada capres dari partai mengomentari soal partainya yang jadi sarang koruptor dalam salah satu kampanyenya. Besoknya si pimpinan partai yang juga berstatus calon presiden mengirim surat teguran kepada sang pelontar isu dan meminta agar si pelontar isu bisa langsung tunjuk hidung. Lucunya si pembuat surat teguran adalah seorang mantan tertuduh kasus korupsi uang negara. Apa yang terjadi kemudian? Tak jelas, tak pernah ada klarifikasi lebih lanjut.

Media di Indonesia selama ini hidup di tengah desas-desus dan menjadi besar serta meningkat oplah karenanya. Jangan heran bila kini ada banyak media yang mengambil jalan pintas untuk meraih sukses dengan menggunakan teknik menjual desas-desus. Dengan model pemberitaan seperti ini media sebetulnya telah gagal menguak peristiwa yang bersifat skandal. Pemberitaan hanya lari dari satu isu ke isu lainnya. Jurnalisme investigasi tak pernah bisa dipraktikkan di negeri ini. Malah ada tuduhan bahwa media adalah bagian dari pengidap amnesia bangsa ini yang kerap dengan segera melupakan peristiwa yang telah berlalu.

Barangkali ini yang membuat berbagai peristiwa penting dalam sejarah negeri ini masih bersisa sebagai sebuah misteri. Mulai kematian Tan Malaka, Peristiwa G30S, Supersemar, kematian Soekarno, penyanderaan mahasiswa Trisakti di Puncak Jaya, Peristiwa Tanjung Priuk, penculikan

para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan II, kerusuhan di Timor Timur, kematian Marsinah serta Udin, dan lain-lain.

Yang luar biasa adalah cerita kekejaman Gerwani yang menyiksa para Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya sebelum kemudian menghabisinya. Cerita ini berbeda dengan hasil otopsi para pahlawan. Kisah tentang tarian harum bunga, pesta orgy dan suntikan obat perangsang ternyata bersumber pada 3 koran yang saat itu berafiliasi pada kelompok Soeharto. Sungguh luar biasa, desas-desus bisa masuk sebagai bahan pelajaran sejarah dan menghiasi monumen Lubang Buaya.

Di zaman Orde Baru, setiap memasuki akhir Juli dan awal Agustus pemerintah akan mengumumkan bahwa telah diketemukan berbagai benda berlambangkan komunis. Mulai dari permen, ballpoint, kalung, buku, hingga lain seragam loreng. Lantas pihak militer akan mengingatkan kembali tentang bahaya komunisme kemudian disusul dengan munculnya pernyataan dari sejumlah tokoh tentang pengkhianatan PKI. Pada malam 30 September TVRI memutar film Pengkhianatan G30S/PKI dan *long march* obor malam ke taman makam di berbagai kota. Ritual akan ditutup dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya yang langsung dipimpin Presiden Soeharto. Dengan demikian desas-desus diciptakan dan kemudian dipelihara.

Saya khawatir, pemerintah dan intelijen menjadi pihak yang paling mempercayai dan mengantisipasi desas-desus. Penelusuran ihwal desas-desus dipercaya sebagai bagian dari *early warning system* pemerintahan. Meski mantan Kabakin Sutopo Juwono (alm) pernah menyatakan bahwa tugas intelijen itu antara lain adalah melemparkan isu dan kemudian menelusurinya sedemikian rupa sehingga masyarakat percaya bahwa isu itu memang ada.

Pada 1971 ada desas-desus yang mengegegerkan. Seorang perempuan asal Aceh, bernama Cut Zahara Fonna, yang tengah hamil 6 bulan mengaku mengandung seorang bayi ajaib. Bila orang menempelkan telinganya ke perut sang Nyonya Zahara orang akan mendengar si bayi bisa mengumandangkan sholat dan ayat-ayat Al Quran. Sejumlah pejabat negara berbondong-bondong menengok Cut Zahara Fonna yang dirawat di ruang VIP RS Cipto Mangunkusumo. Tak kurang dari Wakil Presiden

Adam Malik dan Ibu Tien Soeharto menyatakan kekaguman mereka. Bahkan Adam Malik menyatakan, “Boleh jadi telah ada 7 keajaiban dunia. Namun keajaiban dunia yang ke-8 akan lahir di Indonesia, melalui perut Nyonya Cut Zahara Fonna.”

Apa yang terjadi? Rupanya kasus ini tak lain adalah sebuah kasus penipuan biasa, dimana Nyonya Cut Zahara memasukkan *tape recorder* kecil yang masih langka ketika itu dalam belitan stagennya. Tak kurang wartawan kawakan seperti Mochtar Lubis mengkritik hilangnya daya nalar dan tenggelamnya para pejabat Indonesia ke dalam tahayul. Pemberitaan media atas skandal memalukan ini berhenti saat Presiden Soeharto mengimbau agar pers tak lagi memberitakan hal memalukan yang melibatkan sang istri.

Begitu kuatnya desas-desus hingga kadang orang tak lagi bisa membedakan mana fakta (realitas) dan mana yang pernyataan (opini). Ketika demam berdarah melanda tanah air dan membuat rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat karena tak mampu menampung pasien, ketika sudah lebih dari 600 korban meninggal akibat demam berdarah; presiden kita menyatakan bahwa dirinya terkejut. Fakta seketika menjadi imajinasi, tepatnya semacam fatamorgana.

Pada dasarnya, memang banyak orang saat ini tak paham dengan pengertian desas-desus sesungguhnya. Padahal desas-desus terus terjadi dan diproduksi banyak kalangan, terutama politisi, di negeri ini setiap hari. Desas-desus politik sengaja diciptakan untuk mensukseskan program politik kelompok sendiri dan menjatuhkan lawan politik. Bisa juga sekadar mempopulerkan tokoh atau kelompok tertentu. Bukan tak mungkin, idiom dan olokan yang bernada negatif kadang justru mendongkrak popularitas.

Di negeri di mana tak ada orang yang ditangkap (yang ada cuma diamankan), harga sembako dan BBM, listrik, telepon tak pernah dinaikkan (yang ada hanya disesuaikan, istilah baru: *rebalancing*), tak pernah ada penyimpangan aparat (karena yang menyimpang hanyalah para oknum), situasi keamanan selalu aman terkendali (tapi ditengarai ada banyak OTB, OTK dan GPK) ini desas-desus masih efektif sebagai sebuah cara komunikasi. Fakta dan imajinasi sengaja diletakkan di sebuah garis batas yang samar-samar dan orang diminta mereka-reka sendiri.

Ketika pemberitaan Aceh nyaris tak ada dan digantikan hiruk-pikuk

berita kampanye Pemilu 2004, barangkali kita perlu mempertanyakan kembali batas fakta dan imajinasi ini. Jangan-jangan desas-desus di kalangan akar rumput sedang marak, seiring dengan maraknya desas-desus kemungkinan koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar.*

BUKTI-BUKTI KEJAHATAN PERANG

www.acehkita.com

acehkita

informasi yang lebih jujur

Puasa Yes
Perang ~~No~~ Yes

ISSN 1829-8427



RP 7.000,-

EDISI 009 TAHUN II NOVEMBER 2004

Desas-Desus (2)

Desas-desus itu mirip bunyi iklan minuman ringan, bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Baik dalam masa perang maupun masa damai. Desas-desus juga tidak memilih tempat khusus. Ia bisa muncul di ujung jalan, di tengah kampung, di desa, perkotaan, negara berkembang hingga negara maju. Ia juga berkembang biak dalam model budaya negara agraris maupun industrialis. Ia juga tak mengenal agama. Desas-desus menyebar lewat mulut ke mulut, menyeruduk ke sana ke mari.

Dalam banyak kasus, munculnya desas-desus tak bisa dilepaskan dari peranan intelijen yang menggunakannya sebagai sarana penggalangan propaganda. Desas-desus model ini sengaja dimunculkan untuk mengacaukan pikiran orang mengenai batas antara ada dan tiada, antara khayalan dan realitas. Yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menyelesaikan sasaran yang ingin dicapai pihak intelijen, yang kerap menggunakan amuk dan kekacauan modus operasi. Dalam banyak kasus, desas-desus juga digunakan untuk menutupi fakta yang sebenarnya agar tujuan tercapai tanpa terjadi amuk.

Pers dalam membuat pemberitaan sering terperangkap dengan desas-desus dan perangkap propaganda yang lebih besar. Penyebabnya antara lain adalah kebiasaan wartawan untuk mengutip ucapan pejabat yang kerap

melontarkan desas-desus tanpa dicek lebih jauh. Misalnya, menjelang pelaksanaan Pemilu 5 April 2004 lalu, aparat keamanan di Papua melansir pernyataan ditemukannya sejumlah bukti bahwa pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) berniat menggagalkan Pemilu. Kalau ditelusuri lebih lanjut sumber berita ternyata berasal dari kalangan militer setempat. Si wartawan tampak tak berupaya mencari informasi lebih jauh. Sumber militer dianggap sebagai sumber yang mewakili kebenaran. Padahal ada banyak pengamat masalah Papua tertawa membaca berita yang tak masuk akal tersebut. Tanpa sadar, si wartawan sebetulnya telah menyampaikan desas-desus sebagai sebuah berita.

Di zaman Orde Baru, desas-desus diresmikan sebagai kebijakan baru untuk menutupi kegagalan pemerintahan dalam mengelola politik, ekonomi, keamanan, sosial dan sejumlah bidang lain. Antara lain dengan membantah fakta-fakta yang ada dan menggunakan eufemisme untuk mengelabui masyarakat bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebetulnya sangat aspiratif. Akibatnya, jangan heran bila para wartawan kemudian ikut melakukan pembodohan melalui bahasa. Seolah-olah di zaman Orde Baru, pemerintah tak pernah “menaikkan” harga BBM sebab pemerintah hanya melakukan “penyesuaian”. Aparat keamanan tak pernah melakukan “penyiksaan” terhadap orang-orang yang dituduh membahayakan, sebab aparat hanya melakukan “pembinaan”. Tak ada satupun “warga negara” yang ditangkap, mereka hanya “diamankan”, dan seterusnya. Dengan demikian muncul lah desas-desus resmi melalui media massa.

Coba kembali ingat saat Presiden Soeharto diserang stroke pada awal 1997. Tak ada satu pun media yang memberitakan soal sakitnya RI-1 ketika itu. Yang muncul hanyalah berita TVRI, yang rupanya dibuat atas pesanan Setneg, tentang Pak Harto yang mengambil cuti panjang. “Hal ini dilakukan beliau, karena sudah lama beliau tak pernah mengambil cuti,” ujar Mensesneg saat itu. Lantas liputan menggambarkan Pak Harto tengah mengenakan sarung di rumahnya di Jl. Cendana sedang santai dan bermain dengan burung perkutut. Liptutan sama sekali tak menayangkan suara Pak Harto. Banyak kalangan masyarakat yang mendapat kabar bahwa Pak Harto saat itu diserang stroke ringan, konon pencapaian gara-gara *road show* ke sejumlah negara.

Hal ini kembali terulang ketika Pak Harto diserang stroke berat yang kemudian membuat cacat sebagian memorinya pada penghujung 1999. Pada saat itu tak ada satu media pun yang berhasil mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya dengan mantan orang kuat RI tersebut. Secara formal media hanya melihat bagaimana Pak Harto dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP) dengan mengenakan masker oksigen dan kemudian satu persatu anak, menantu, mantan menteri dan orang terdekat membesuk Pak Harto. Seriuskah penyakit Pak Harto? Sebuah stasiun televisi yang mewawancarai pengacara keluarga Cendana, Juan Felix Tampubolon, hanya mendapat jawaban bahwa Pak Harto dalam keadaan sehat tak kurang apa pun. “Beliau hanya tengah menjalani proses *general check up* sebagaimana yang telah direncanakan,” ujar Juan Felix. Padahal semua orang tahu mantan orang kuat tersebut tengah berjuang melawan stroke.

Yang lucu adalah media yang saat itu tak berhasil mengorek keterangan dari tim dokter yang rupanya melakukan GTM (gerakan tutup mulut), kemudian mengada-adakan pemberitaan dengan mewawancarai kembali tim pengacara Cendana yang terus menutupi fakta. Media yang lain melakukan wawancara dengan dokter dengan topik tentang penyakit stroke, hubungan nasi kebuli (santapan kesukaan Pak Harto) dengan stroke, dampak stroke bagi mereka yang pernah terserang penyakit ini. Dan yang lebih gila, ada media yang mewawancarai tokoh selebritis, tokoh organisasi kepemudaan, atlet bulutangkis, dan lain-lain tentang perasaan mereka terhadap Pak Harto. Padahal media tersebut tak pernah memberitakan secara pasti apa yang sebetulnya terjadi dengan diri Pak Harto. Dengan demikian desas-desus muncul dalam berbagai versi. Apalagi kemudian ada media yang memberitakan soal perilaku seorang paranormal yang berkamat-kamit di depan jalan RSPP dan tangannya bergoyang bergetaran sambil menunjuk jendela kamar tempat Pak Harto dirawat.

Kini, barangkali kita sadar betapa lemahnya kemampuan wartawan dalam mengungkap fakta. Terlebih yang disembunyikan sekelompok orang yang mempunyai pengaruh, kekuasaan, dan bisa menyewa orang untuk memanipulasi fakta. Betapa menyedihkannya keadaan ini. Ada beberapa teman wartawan yang mengatakan, “aku malu menjadi wartawan Indonesia.”

Kenapa? Mereka mereka merasa selama ini hanya menjadi permainan desas-desus. Banyak di antara mereka yang beberapa malam terpaksa tidur di ruang tunggu RSPP untuk mendapatkan kebenaran, merasa gagal melakukan pekerjaan investigasi.

Media di Indonesia memang tak pernah menjadikan unsur *provetic* (pembuktian) sebaik tumpuan dalam pemberitaan. Informasi sepotong, sudah dianggap layak diberitakan asal ditambah dengan wawancara dengan pengamat, ahli, pakar, akademisi dan lain-lain yang dipersepsikan oleh si wartawan sebagai narasumber layak kutip.

Apa yang ada sekarang? Jangan heran, negeri ini kini telah berubah menjadi negara desas-desus yang paling canggih. Pelaku kejahatan kemanusiaan, penculik, pemerkosa, koruptor, pembobol bank, pembunuh, dan penjahat kelas kakap bisa lolos dari jeratan hukum. Mereka bisa menyewa para pengacara mahal yang mampu menyulap fakta menjadi cuma desas-desus yang tak bisa dibuktikan. Celaknya lagi, sistem hukum formal kita juga telah melembagakan desas-desus sebagai bagian dari hukum beracara.

Negeri ini telah berubah menjadi negeri desas-desus, di mana masyarakatnya lebih mempercayai desas-desus sebagai sebuah fakta ketimbang media massa, proses hukum dan kebijakan formal sebagaimana yang dikatakan oleh pejabat resmi. Seluruh kebijakan resmi selalu muncul bersamaan dengan munculnya desas-desus. Dan, orang lebih percaya bahwa pada *side issue* ketimbang *main issue*.*

Desas-Desus (3)

Seiring dengan kabar akan dicabutnya status Darurat Militer (DM) di Aceh untuk digantikan dengan pemberlakuan status darurat sipil, berbagai desas-desus muncul. Mulai dari soal kemenangan kubu Gubernur Abdullah Puteh yang sempat dituduh menyelewengkan dana APBD, tetap akan diberlakukannya operasi militer, permintaan masyarakat untuk tetap mempertahankan DM hingga soal kepentingan kampanye Presiden Megawati di balik rencana pencabutan DM.

Orang tak pernah bisa mengetahui apa yang sebetulnya tengah terjadi di Aceh. Hal ini diakibatkan jurnalis belum bisa bekerja optimal untuk melaporkan semua kejadian dari wilayah yang telah dinilai cukup aman tersebut. Ukuran “telah aman”, “berhasil ditumpas”, “pemerintahan telah pulih” dan seterusnya lebih merupakan desas-desus yang bersumber pada ucapan pejabat yang dikutip kalangan jurnalis. Bukan laporan pandangan mata jurnalis di lapangan.

Yang lebih menarik, memasuki putaran ke-2 masa kampanye Pemilu 2004 tak ada satu pun partai yang mencoba mengangkat persoalan Aceh sebagai bahan kampanye. Kecuali calon dari Golkar, Surya Paloh, yang akhirnya dapat teguran dari partainya. Pasangan capres-cawapres juga tak menunjukkan tanda-tanda akan berani mengangkat permasalahan Aceh

dalam kampanye mereka mendatang. Dengan demikian semua hal yang berhubungan dengan Aceh akan tetap tenggelam sebagai desas-desus.

Masyarakat pada umumnya juga tak akan peduli dengan kelanjutan pengusutan kasus korupsi di Aceh, atau belum adanya seorang pun panglima GAM yang tertangkap. Tak akan ada orang yang mempertanyakan keberhasilan hasil satu tahun masa DM. Orang lebih memilih memperbincangkan nasib Gus Dur yang tak lolos pencalonan capres atau meramal arah dukungan massa NU apakah ke pasangan Wiranto-Gus Solah atau Mega-Hasyim. Barangkali inilah musim desas-desus yang paling marak.

Banyak kalangan menyatakan bahwa manusia Indonesia adalah pengidap amnesia yang paling parah. Memori orang Indonesia sangat terbatas, karena itu mudah lupa. Desas-desus yang mengiringi setiap kejadian penting dalam perpolitikan di negeri ini dengan mudah dilupakan. Alih-alih punya ingatan pada peristiwa besar seperti Peristiwa 65, orang kini telah lupa pada peristiwa penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, hingga Semanggi I dan II.

Orang juga lupa pada Kerusuhan 27 Juli 1996, sebagaimana ditunjukkan oleh Megawati yang memilih Sutiyoso sebagai Gubernur DKI mengalahkan calon dari partainya sendiri. Orang di Aceh juga mungkin sudah lupa pada Operasi Jaring Merah, juga ucapan presidennya sendiri yang mengatakan, “Cuk Nyak berjanji tak akan ada lagi darah yang menetes di bumi Aceh”. Orang juga lupa pada Wakil Presiden, Menko Polkam, para Menteri dan juga Ketua MPR yang menyetujui pemberlakuan DM di Aceh.

Bisa jadi bangsa ini adalah bangsa pemaaf hingga membuat mantan penguasa pers yang juga pernah jadi Ketua MPR, Harmoko, berani keluar dari lubang persembunyian. Bahkan ia berani menawarkan diri menjadi jurukampanye bagi Partai Golkar pada Pemilu putaran I.

Luar biasa, memang. Membaca berita-berita dalam pers Indonesia kita akan menemukan berbagai model desas-desus dengan logikanya sendiri. Sedangkan fakta akan berjalan secara berbeda. Coba saja lihat, pada 1997 ketika krisis moneter melanda Indonesia, para pejabat membuat gerakan “Aku Cinta Indonesia” (ACI) dan “Aku Cinta Rupiah” (ACR). Saat itu orang berlomba-lomba menyumbangkan dolar dan emas perhiasan yang dimiliki yang hingga kini tak diketahui bagaimana nasib harta benda

tersebut. Sekelompok wartawan ketika itu juga menerbitkan buku berjudul *Manajemen Pak Harto* yang berisi pujian setinggi langit terhadap gaya kepemimpinan Soeharto. Kambing hitam saat itu adalah para pengusaha Cina yang dituduh menimbun barang atau melarikan modalnya ke luar negeri.

Itu sebabnya pada kerusuhan Mei 1998, masyarakat keturunan Cina jadi sasaran amuk massa. Pihak yang merekayasa dengan mudah bisa menciptakan kekacauan dengan menyulut isu rasialis.

Bagaimana kini? Setiap pasangan capres-cawapres berlomba-lomba berbaik hati dan melobi kelompok yang pernah dituduh anasionalis. Begitu pula sebaliknya, banyak pengusaha ikut bergabung menjadi tim sukses capres dari balik layar.

Sejumlah *center* kini telah berdiri. Bila sebelumnya telah ada Amin Rais Center, Wapres Center (yang tak jelas juntrungannya), kini telah menyusul berdiri Mega Center, SBY-Kalla Center dan lainnya. Semuanya didirikan dalam rangka bisa menjadi semacam pusat informasi.

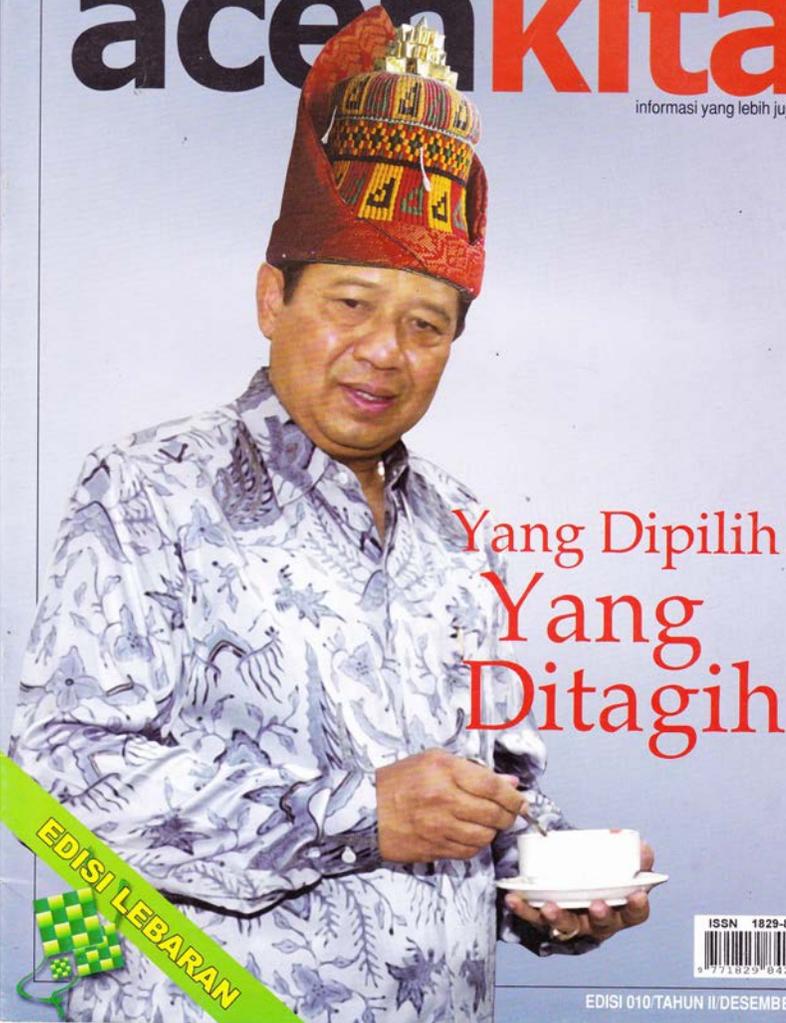
Apakah demikian halnya? Banyak orang tak terlalu yakin. Mereka khawatir di tengah beredarnya berbagai macam desas-desus menjelang Pemilu presiden dan larangan melakukan *black campaign*, *center* hanya akan menjadi semacam *media centre* di Aceh. Hanya menjadi alat pengabsah desas-desus, tanpa memiliki kemampuan untuk mengubah desas-desus menjadi sebuah fakta yang sesungguhnya.*

LAPORAN INVESTIGASI KORBAN SIPIL

www.acehKita.com

aceh **kita**

informasi yang lebih jujur



Yang Dipilih
Yang
Ditagih

EDISI LEBARAN

ISSN 1829-8427



EDISI 010 TAHUN II/DESEMBER 2004

Rp 7.000,-

Sikap Jurnalis Adalah Independen dan Terbuka

Di zaman Orde Baru, juga kini, ada banyak pejabat mengeluh, “kenapa jurnalis lebih suka memberitakan hal-hal yang negatif saja.” Mengapa hal yang positif seperti keberhasilan pembangunan, kesuksesan seorang pejabat, keberhasilan pemerintah dan lain-lain tak pernah diberitakan oleh jurnalis, meskipun banyak jurnalis datang meliput.

“Kenapa saat kami meresmikan proyek pembangunan, jurnalis tak memberitakannya,” tanya beberapa pejabat kepada saya. “Apakah memang sudah jadi kebiasaan jurnalis untuk melulu memberitakan kegagalan,” lanjut mereka.

Keluhan lainnya adalah tentang kebiasaan wartawan untuk memotong pemberitaan atau ucapan. Dari sejumlah keterangan yang diberikan seorang pejabat hanya dikutip secuil. Itupun hanya bagian yang kontroversial. Jangan heran, bila dalam wawancara dengan SCTV beberapa waktu lalu ibu presiden kita juga menunjukkan sikap serupa. “Saya tak suka dengan pertanyaan Anda!” dan “Sebentar! Jangan memotong kalau saya sedang bicara!” berkali-kali keluar sebagai ucapan presiden kita.

Apakah yang salah? Rupanya banyak orang, termasuk pejabat, tak paham dengan nilai-nilai jurnalistik. Dalam jurnalistik yang disebut sebuah berita yang layak salah satunya adalah kriteria kontroversial, makanya berlaku kaidah “anjing menggigit orang bukan berita, orang menggigit anjing itu berita”. Bersama kriteria lain seperti skandal dan kejahatan adalah ukuran kelayakan berita yang sesungguhnya telah menjadi klasik dalam dunia jurnalistik.

Kriteria tentang keberhasilan, cerita sukses, sebetulnya menjadi tugas kehumasan yang dimiliki sebuah instansi. Bukan tugas jurnalis untuk memberitakannya. Makanya muncul istilah yang seram-seram tentang jurnalis misalnya “nyamuk pers” dan “anjing penjaga” dengan pekerjaannya yang berbekal kepandaian dalam menulis dan menjatuhkan yang memunculkan idiom terkenal dari Napoleon bahwa “pena lebih tajam daripada pedang”.

Banyak orang tak tahu bahwa tugas seorang jurnalis adalah menggali informasi, melakukan konfirmasi, mencek kebenaran, dan menuliskannya sebagai informasi untuk dibaca masyarakat luas. Dalam wawancara, tugas jurnalis bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Bahkan bila perlu, seorang jurnalis bisa melemparkan pertanyaan dengan gaya *devil advocate*. Dalam mengajukan pertanyaan model terakhir ini, seorang jurnalis tidak lagi menggunakan gaya menyangsikan, tapi menyerang dengan menggunakan dasar opini masyarakat atau fakta-fakta tandingan.

Nah, di sini, masyarakat Indonesia, terutama pejabatnya, belum terbiasa. Mereka yang bermental feodal umumnya langsung marah dan menyatakan bahwa jurnalis telah bersikap partisan, suka melintir berita dan sebagainya.

Sebagai seorang profesional, setiap jurnalis dituntut untuk menghormati nilai-nilai dan etika yang berlaku di profesi jurnalistik. Antara lain independen dan terbuka. Kedua hal ini yang membawa konsekuensi seorang jurnalis harus selalu bersikap kritis. Bila perlu dengan menyangsikan semua hal (terutama pernyataan) sebelum mencek dan menverifikasi informasi secara langsung kepada sumber-sumber yang secara berita bisa dipertanggungjawabkan.

Seorang pembaca *Aceh*kita mempertanyakan sikap profesionalitas media ini dengan menulis:

“n(t)ampaknya pemberitaan yang anda buat sudah tidak seimbang lagi. anda jarang sekali memberitakan kejahatan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh GAM, sementara anda sangat aktif memberitakan “kesalahan” yang dibuat oleh TNI. saya jadi curiga situs ini adalah corong dari GAM”
submitted by antigam from 202.155.147.59

Surat ini bisa merupakan sebuah tuduhan berat, sebagaimana serangan yang pernah ditunjukkan Menpen Harmoko kepada pers, juga Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur di zaman pemerintahan mereka. Sebagaimana juga yang kini ditunjukkan Presiden Megawati. Namun, sebagaimana layaknya orang yang menyerang media, si penulis tak cukup paham tentang nilai dan kemandirian redaksi.

Sebagai orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pembaca oleh media ini, saya telah mencoba meneliti kembali berita-berita yang dimuat yang mungkin mengindikasikan terjadinya salah kelola pemberitaan. Saya mencoba membaca kembali setiap berita yang turun, yang patut diduga bahwa media ini telah menjadi corong Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasilnya adalah negatif.

Acehkita justru mempraktekkan genre baru di bidang jurnalistik yang disebut sebagai jurnalisme damai. Pada jurnalisme model ini liputan difokuskan pada penderitaan kaum perempuan, anak-anak, dan orang tua. Sebuah kelompok yang sebetulnya tidak ikut bertikai tapi kerap menjadi korban. Media yang menganut model ini, sebagaimana juga *Acehkita*, tampaknya selalu ingin memberikan ruang dan empati pada semua suara.

Ide tentang jurnalisme damai sebetulnya berangkat dari kemukaan wartawan, akademisi dan masyarakat yang melihat bagaimana kelompok masyarakat menikmati liputan peperangan sebagai sebuah hiburan. Kemukaan ini muncul saat terjadi Amerika melakukan “Operasi Badai Gurun” dimana CNN membuat siaran langsung dari detik ke detik. Sekelompok orang yang galau melihat hal tersebut memunculkan upaya untuk melakukan *rethinking* atas nilai-nilai jurnalisme yang melihat konflik sebagai sebuah hal yang paling memiliki nilai berita. Upaya para wartawan senior tersebut kian dipicu oleh serangkaian ceramah pakar perdamaian, Profesor Dr. Johan Galtung dalam sebuah kuliah sekolah musim panas di Taplow Court, Buckinghamshire, Inggris pada Agustus 1997.

Pilihan meliput dari sisi pemerintah Indonesia, tentunya membawa konsekuensi media ini lebih banyak meliput TNI. Dengan kata lain, *Acehkita* menjadi semacam *watchdog* penguasa darurat militer (PDMD). Dalam paradigma NKRI, posisi ini sebetulnya justru meletakkan media ini dalam posisi paradoks, yaitu sebagai bagian yang “embedded” dengan NKRI. Kasarnya, tugas wartawan GAM lah untuk menulis soal keburukan dan pelanggaran yang dilakukan GAM.

Tentu saja pembagian tugas model ini adalah pengandaian yang juga tak sepenuhnya benar, meski juga tak sepenuhnya salah. Tugas jurnalis yang lebih utama adalah melalui tulisannya ia bertugas mengangkat dan menjaga peradaban manusia.

Setiap jurnalis tahu bahwa ia harus mengupayakan munculnya perimbangan. Namun dalam tugas, apalagi di daerah konflik seorang jurnalis selalu dibatasi untuk mendapatkan akses informasi. Semua gerak-gerik jurnalis di kawasan konflik selalu diawasi. Mereka harus mempunyai kartu identitas khusus plus ijin dari penguasa setempat. Belum lagi, kalau mediana membuat laporan yang tajam akan mengundang kemarahan pihak-pihak tertentu. Tentu saja, dengan kondisi kerja yang tak kondusif dan penerimaan penguasa yang masih mencurigai jurnalis menyulitkan orang untuk mengupayakan keseimbangan.

Untuk itulah, saya mewakili pembaca *Acehkita*, berharap pemberlakuan status darurat sipil bisa membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat di Aceh. Sebab dengan adanya perbaikan ini, bukan tak mungkin kualitas laporan jurnalistik juga akan mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas. Jurnalis tak akan lagi berada dalam jebakan isu peperangan semata.*

Menanggapi Suara Pembaca (1)

Seorang pembaca *Acehkita* bernama Bung Kourniawan menulis surat pada redaksi *Acehkita* yang memuji liputan media ini, tapi sekaligus mempertanyakan kemungkinan bias akibat hanya meliput dari satu sisi saja. Dengan kata lain, media ini hanya meliput para korban dari sisi anggota TNI sebagai pelaku. Berikut petikan dua surat Bung Kourniawan:

[.....Saya acungkan jempol pada *acehkita.com* yang telah menurunkan hasil2 liputan ttg Aceh yang tidak dapat dijumpai pada mediamassa lainnya. Namun, saya mengusulkan. Jika saja hasil2 liputan *acehkita.com* ini mengcover 2 sisi (*two back sides cover*) akan lebih bagus, dan tentunya akan terhindar dari bias.

Jadi bukan cuman kekejaman yang dilakukan oleh pasukan pemerintah saja yang diberitakan, tapi juga kekejaman terhadap rakyat yg dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan demikian kami, para pembaca, dapat memberikan penilaian yang sebenarnya.

submitted by Kourniawan from 62.139.170.137

[...Terima kasih kepada para pembaca yang telah menanggapi surat saya dengan segala pro dan kontranya. Juga kepada Bung Stanley yang

telah berkenan memberikan tanggapan langsung.

Sebelumnya perlu saya katakan kepada para pembaca, baik yang pro GAM maupun pro TNI, bahwasanya saya terlepas dan steril dari kedua belah pihak yang tengah bertikai. Karena saya hanya peduli dengan penderitaan rakyat sipil Aceh akibat konflik dua kekuatan militer di atas.

Ketika saya membaca bentuk jurnalistik yang hendak diketengahkan komisi ombudsman sebagaimana tercantum di bawah, bahwasanya jurnalistik yang hendak diketengahkan adalah jurnalistik damai, peduli dengan penderitaan rakyat sipil, anak-anak, wanita, para lanjut usia di tengah konflik militer. Namun ketika saya membaca lebih banyak lagi. Saya mendapati bahwasanya berita-berita *Acehkita.com* lebih banyak didominasi penderitaan rakyat sipil akibat tindakan repressif pasukan pemerintah. Lalu dimanakah penderitaan rakyat sipil Aceh akibat tindakan represif GAM? Bukankah dalam konflik militer rakyat sipil adalah pihak yang dirugikan oleh kedua belah pihak? Saya rasa mustahil GAM tidak pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat sipil.

Bukankah ini konflik bersenjata yang melibatkan dua pihak? Dan saya yakin, dari sekian juta rakyat sipil Aceh hanya beberapa persen saja yang mendukung GAM, alias tidak semua.

Saya bukan hendak meminta Redaksi untuk memberitakan berita-berita tentang pembangunan di Aceh, sama sekali bukan. Sebagaimana mukadimah tanggapan Bung Stanley. Saya juga bukan hendak mengatakan bahwasanya rekan-rekan wartawan lokal Aceh takut untuk memberitakan tentang kebrutalan GAM. Namun saya mengusulkan, alangkah baiknya jika penderitaan rakyat sipil Aceh diangkat secara utuh, tanpa sepotong-sepotong. Karena hal ini adalah bukti bahwa Komisi Ombudsman cq. *Acehkita.com* mampu menggapai tujuannya, alias tidak bekerja e cara parsial.

Bagaimapun juga, saya salut dengan kerja Komisi Ombudsman yang telah menghadirkan genre baru dalam dunia jurnalistik kita. “Katakan kebenaran walaupun itu pahit”. “Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu”

submitted by kourniawan from 62.139.170.141

Surat Bung Kourniawan ini, yang mendapat tanggapan balik dari sejumlah pembaca, antara lain oleh Sdr. Irma Suryani (from 203.130.233.225) dan Sdr. Hendra Saputra (from 202.152.162.205), perlu mendapat tanggapan secara baik agar pembaca media ini paham situasi yang dihadapi para wartawan di Aceh, khususnya para wartawan *Acehkita*. Apalagi Bung Kourniawan mengajukan pertanyaannya dengan penuh niat baik disertai empati kepada para korban.

Secara pribadi, selaku ombudsman, saya juga mendapat surat pribadi yang dikirim oleh pembaca langsung ke email saya. Umumnya mereka menjadi lebih paham akan persoalan Aceh dan juga misi yang diusung media ini berkat tulisan di edisi lalu.

Begini. Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan selalu mencoba menghadirkan kebenaran sebagai tujuan dari pekerjaannya. Mulai dari memilih narasumber, wawancara hingga saat menuliskannya sebagai berita. Namun, wartawan jarang memperoleh kesempatan, sumber, atau pengetahuan seorang ahli untuk mendapatkan kebenaran sendiri. Karena itulah seorang wartawan selalu mengupayakan mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari mereka yang memiliki semua itu.

Ketika seorang wartawan mewawancarai korban di sebuah daerah konflik, ia kerap telah mengetahui bahwa orang yang diwawancarai adalah korban kekerasan yang dilakukan pihak A. Namun ada kalanya ia hanya mendatangi kamp pengungsi tanpa tahu sebelumnya siapa orang yang akan diwawancarai. Si wartawan hanya berasumsi bahwa di kamp pengungsian ada banyak orang menderita. Pasti di antara mereka ada yang menjadi korban kekerasan. Wartawan selama berwawancara akan menggunakan naluri untuk membedakan mana cerita imajinatif (bohong) dan mana cerita yang benar. Karena itulah wartawan selalu menolak suatu wawancara yang mendapatkan pengarahan, misalnya didampingi ‘petugas’ atau dalam suasana resmi di mana si narasumber berada dalam tekanan, dan seterusnya.

Nah, di sinilah letak kesulitannya. Tak semua wartawan punya akses untuk menemui pihak-pihak yang bertikai di sebuah daerah konflik, seperti halnya di Aceh. Kalupun dia punya, belum tentu setiap pihak, termasuk aparat keamanan, mengizinkan si wartawan melakukan wawancara dengan pihak yang bisa dianggap merugikan kelompoknya.

Ada pengalaman dari crew CNN saat meliput konflik di Ambon pada

akhir 1997. Saat kerusuhan sedang hebat-hebatnya berkecamuk di kawasan tersebut, CNN mengirimkan dua crewnya untuk meliput. Wartawan yang dikirim adalah seorang wartawan perempuan asal Filipina yang beragama Kristen. Ia ditemani seorang kamerawan pria asal Afrika yang beragama Islam. Dari namanya, orang awam bisa menebak bahwa yang perempuan adalah Kristen dan yang lelaki adalah muslim. Mulanya mereka mencoba masuk ke wilayah merah yang dikuasai kelompok Kristen. Masyarakat setempat menyambut kedatangan si wartawan, tapi menolak kehadiran sang kamerawan. Tentu saja hal ini tak memungkinkan wartawan untuk membuat berita sesuai standar televisi CNN. Saat mereka memutuskan masuk ke daerah putih, ganti si wartawan ditolak mentah-mentah, apalagi dalam anggapan masyarakat setempat mereka mewakili CNN yang jelas-jelas Barat dan Kristen.

Persoalan yang sama dihadapi para wartawan (terutama orang lokal) di Aceh yang diharuskan memiliki KTP Merah Putih dan juga kartu identitas yang dikeluarkan Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Bisa dibayangkan dengan kartu identitas seperti itu, yang selalu ditanyakan di mana-mana (oleh setiap orang) telah membuat ruang gerak wartawan menjadi terbatas. Salah masuk ke daerah dan kemudian salah identifikasi (karena keberpihakan media tempat bekerja) akan membuat si wartawan disandera. Hal ini yang menyebabkan wartawan yang baru datang dari Jakarta, lebih memilih aman dengan meliput dari hotel atau pergi mencari berita ke media centre yang dibangun oleh PDMD.

Tak ada yang salah dengan liputan seperti itu, asalkan ada upaya *crosscheck* ke lapangan. Tapi bagaimana bila si wartawan tak menguasai medan, tak memiliki jaringan dengan penduduk setempat, dan satu-satunya akses yang bisa diandalkan adalah keterangan yang bersumber dari pejabat resmi. Kita bisa memeriksa kembali pemberitaan media massa selama pemberlakuan masa darurat militer di Aceh yang sarat dengan bias. Nah, wartawan media ini sejak awal tampaknya memang mencoba keluar dari lingkaran yang menyesatkan itu. Mereka lebih mengutamakan kerja investigasi dan menemui sumber-sumber langsung di lapangan yang jauh dari kemungkinan rekayasa pernyataan. Setengah bercanda saya katakan, bahwa mereka mungkin yakin pada *vox populi vox dei* alias “suara rakyat kecil yang tak berdaya adalah suara Tuhan”.

Mungkin setidaknya hal ini menjadi prioritas wartawan media ini. Kita bisa melihat bagaimana wartawan media ini adalah pihak yang untuk pertama kalinya mengangkat masalah penyilangan rumah penduduk dengan cat merah oleh aparat TNI. Pemberitaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh BBC London ini berhasil membuat PDMD mengeluarkan perintah penghentian aksi yang bisa menjurus kepada kejahatan perang tersebut.

Bagi wartawan media ini sebetulnya mudah untuk menemukan sumber yang bisa bercerita tentang kekejaman GAM, namun menurut sejumlah wartawan media ini, “kredibilitas” dan “obyektivitas” sumber-sumber tersebut meragukan. Para wartawan yang saya tanyai menyatakan, kebanyakan dari mereka adalah pihak yang terlibat dalam silang sengkaret persoalan di Aceh. “Mereka bukan rakyat biasa,” ujar para wartawan yang saya hubungi. Kalau mereka bukan keluarga para “cuak”, ya pasti orang binaan dari pihak tertentu.

Sejumlah wartawan dari Jakarta maupun lokal yang berhasil masuk ke wilayah terpencil dan menemui penduduk pada umumnya memang berkeluh-kesah soal TNI. Kenapa demikian? Para wartawan yang saya tanya hanya mengangkat pundak mereka. “Mungkin Operasi Jaring Merah (DOM) yang digelar sejak 1989 hingga 1999 memang telah menimbulkan korban yang tidak sedikit dan rasa traumatis yang mendalam,” ungkap sebagian dari mereka.

Mengapa jarang ada yang mengeluh jadi korban GAM? Saya tak berani menjawabnya, karena saya tak mau masuk ke wilayah politik. Apalagi beberapa waktu lalu ada kalangan petinggi TNI yang meminta agar dada setiap wartawan Indonesia adalah Merah Putih sebagai cerminan patriotisme dan cinta tanah air.

Sebagai seorang wartawan, saya sendiri pernah mempertanyakan “jurnalisme patriotisme” yang dirilis sejumlah pejabat pada Mei 2003 lalu. Pada hemat saya, jurnalisme model tersebut berpotensi membenamkan nama baik wartawan Indonesia ke lumpur kenistaan sebagaimana yang pernah dilakukan sebagian wartawan Amerika saat meliput perang Vietnam. Saya perlu mengutip Bertrand Russell yang mengatakan, “*patriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons*”.

Patriotisme adalah kesediaan untuk membunuh dan dibunuh karena alasan-alasan yang sepele.*

INVESTIGASI PENGUNGI ACEH

www.acehkita.com

acehkita

informasi yang lebih jujur

Duka Aceh Duka Dunia



ISSN 1628-9627 RRP 7.000,-



9 7713233 010271

Edisi 012 TAHUN 103 JANUARI 2005

Pers Vs Kekuasaan

Banyak orang bertanya-tanya, di mana sebenarnya posisi pers yang ideal terutama dalam berhadapan dengan kekuasaan. Di negara Komunis, pers diletakkan sebagai bagian dari kekuasaan. Pers sepenuhnya dianggap sebagai milik negara dan kontrol media yang super ketat semata-mata karena media dianggap sebagai kepanjangan tangan negara. Pers dilarang melakukan kritik terhadap partai (dan penguasa), termasuk semua kebijakan yang dibuat partai.

Pada akhir 1980-an saya berdiskusi dengan seorang mahasiswa Amerika yang melakukan studi perbandingan antara Pancasila dan kewajiban mengikuti P-4 di Indonesia dengan Komunisme dan kewajiban mempelajarinya di Uni Sovyet. Saya tanyakan, “apa kesimpulan Anda?” Jawaban yang muncul mengejutkan saya, “apa yang terjadi di Indonesia mirip dengan yang terjadi di Uni Sovyet pada zaman Stalin.”

Dikatakannya lebih lanjut, penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat *screening* dan memilah-milahkan ideologi masyarakat. Pancasila digunakan sebagai penapis antara mereka yang loyal terhadap negara dengan mereka yang masuk dalam kelompok “mbalelo”.

Di Indonesia sejak pasca Malari 1974, di mana terjadi pembredelan terhadap sejumlah pers, diberlakukan berbagai macam aturan untuk mengontrol pers agar jangan ada lagi pers macam *Indonesia Raya* dan

Mahasiswa Indonesia yang terlalu vokal. Ketika mahasiswa pada akhir 1997 mulai memprotes kebulatan tekak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI, pemerintah segera membuldoser demo-demo mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan NKK-BKK. Lantas muncul pula yang namanya Eka Prasetya Panca Karsa yang kemudian diikuti dengan kewajiban mengikuti P-4 bagi setiap warga bangsa.

Dalam dunia pers diperkenalkan istilah Pers Pancasila. Sistem pers yang dipraktekkan secara masif sejak zaman Menpen Ali Murtopo ini kemudian diteruskan secara lebih canggih oleh Harmoko. Ada semacam chauvinisme bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, yang tidak ini dan tidak itu, tapi mempunyai Pancasila sebagai pegangan hidup rakyatnya. Muncul berbagai sebutan aneh seperti “Sepakbola Pancasila”, “Ekonomi Pancasila”, “Demokrasi Pancasila”, dan lain-lain. Bahkan di IKIP Malang didirikan sebuah laboratorium Pancasila.

Apa tujuan dari semua ini? Tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk mendukung dan memperkuat politik pemerintah dengan meniadakan oposisi. Ideologi yang ditekankan adalah pembangunan, stabilisasi, dan pemerataan. Ruang yang tersisa bagi pers merupakan ruang hiburan.

Lembaga pers tak lain hanya merupakan representasi negara atau swasta yang telah dikontrol dan teruji loyalitasnya. Pimpinan pers nasional ketika itu diminta menandatangani ikrar kesediaan untuk dibina pemerintah.

Penerbitan pers diatur dan diawasi melalui ketentuan SIT (kemudian SIUPP) dan STT. Berbagai imbauan, teguran, dan panggilan terhadap redaksi dilancarkan oleh sejumlah instansi. Mulai dari Mabes ABRI Cilangkap, Kejaksaan Agung, Direktorat PPG, Deppen, PWI, SPS hingga organisasi preman yang bernaung di bawah ketiak kekuasaan. Terjadi sejumlah teror dan penangkapan wartawan. Sejumlah perusahaan pers ditutup dengan alasan telah menyerang kekuasaan, membocorkan rahasia negara, menyebarkan kebencian dan sebagainya. Dengan demikian pemerintah Orde Baru secara perlahan mengembangkan apa yang disebut sebagai “kekuasaan hegemonis”.

Apa yang terjadi kemudian? Pers yang mau bertahan hidup terpaksa melakukan swasensor. Semua berita tentang *the first family*, perpecahan elit, praktek KKN, pertikaian SARA, isu sakitnya kepala negara, skandal pejabat tinggi, dan sebagainya terpaksa disapu ke bawah karpet. Masyarakat

umum tak lagi bisa menemukan fakta-fakta. Untuk menuliskan isu yang peka pers terpaksa menggunakan kata-kata berbentuk eufemisme.

Jadi, jangan heran bila semua pemberitaan tentang Timor Timur, sejak daerah ini dinyatakan terbuka pada 1986, adalah pemberitaan yang bernada positif. Tayangan TV selalu mempertontonkan bagaimana kedatangan pejabat Indonesia ke provinsi tersebut selalu disambut dengan tari-tarian gadis yang mengenakan tais Timor Timur. Kelompok anti integrasi sudah tereliminasi dan nyaris punah di gunung-gunung. Kita semua tercenung ketika pada jajak pendapat, ternyata pihak yang pro-integrasi kalah total. Mayoritas rakyat Timor Timur ternyata tak pernah menghendaki kehadiran Indonesia. Siapa yang salah? Tak lain adalah pers yang selama itu tunduk pada kehendak kekuasaan.

Sejak keruntuhan rezim Soeharto, pers Indonesia sebetulnya telah berada pada era kebebasan. Ada banyak media yang tadinya dilarang terbit bisa terbit kembali. Ketentuan SIUPP dan STT sudah tak berlaku lagi. Dimana posisi pers pada era kebebasan seperti sekarang ini?

Tak mudah menjawabnya. Ancaman pers kini telah berubah dari vertikal (negara) ke horisontal. Ancaman kini datang dalam bentuk komunalisme, gugatan pengusaha bermasalah, termasuk ancaman dari pemodal. Mendefinisikan kekuasaan di zaman era kebebasan ini butuh rincian dan detil.

Ancaman terhadap pers bisa datang secara tidak langsung. Misalnya datang dari kelompok konservatif yang mencoba menggolkan pasal-pasal “represif” dan “patriotis” dalam berbagai rancangan undang-undang. Mulai dari RUU Intelijen, RUU Kebebasan Informasi, hingga RUU TNI.

Pers seharusnya berada pada posisi yang “selalu kritis” dan “independen” terhadap kekuasaan. Ketika penguasa menyembunyikan berbagai hal, termasuk kegagalan, pers harus berani membocorkannya kepada masyarakat. Pembocoran merupakan tindakan pengawasan. Rakyat umum seharusnya dapat mengritik penyimpangan yang ada, memberi masukan. Penyembunyian fakta sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip demokratis.*

LIPUTAN DARI BASIS GAM

MAJALAH

aceh **kita**

www.acehkita.com

informasi yang lebih jujur



Perang Di Tengah Tsunami



EDISI 013/TAHUN II/FEBRUARI 2005

Wartawan, Intel, dan Kebebasan

Pekerjaan wartawan adalah memburu dan meliput sampai dapat. Sebuah pekerjaan yang mirip dengan yang dilakukan seorang intel, spion atau reserse. Keduanya sama-sama melakukan pekerjaan menyelidiki, mencari dan mengumpulkan data, melakukan pencarian jatidiri seseorang, mengumpulkan informasi, menanyai saksi mata dan membuat laporan.

Perbedaannya, seorang intel membuat laporan tertutup untuk disampaikan hanya kepada atasannya guna ditinjaulanjuti berdasar garis komando. Laporan yang dibuat seorang intel, sebelum kasusnya diungkap masih bersifat rahasia negara. Sedangkan wartawan, membuat laporan untuk sesegera mungkin disiarkan kepada publik, pada masyarakat luas. Dalam membuat laporan, seorang wartawan selalu berkejaran dengan waktu.

Laporan intelijen yang salah akan menghasilkan sejumlah orang yang tak bersalah dihukum, atau cara pandang yang salah terhadap sebuah masalah. Tapi laporan jurnalistik yang salah akan menghasilkan sebuah konsekuensi hukum yang bukan tak mungkin akan mengakhiri seluruh bisnis pers tersebut, misalnya dituntut ke pengadilan atau diserbu oleh sekelompok massa yang merasa tak puas dengan pemberitaannya.

Namun demikian dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus memiliki kebebasan. Dalam hal ini adanya kebebasan yang berarti terbukanya kemungkinan untuk memilih sebanyak-banyaknya hal yang bisa dipilih merupakan prasyarat atas munculnya sikap independen dan netral. Jenis kebebasan yang dibutuhkan wartawan adalah “lepas sama sekali” (tak terhalang, tak tergantung, boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya secara leluasa), “lepas dari” (kewajiban tuntutan, ketakutan, tak dikenai hukuman, tak terikat dan terbatas) serta “merdeka” (tak diperintah atau dipengaruhi). Namun demikian seorang wartawan tetap terkungkung oleh kode etik profesi, peraturan yang berlaku di tempat kerja, UU Pers dan KUHP. Inilah yang membedakannya dengan aparat intelijen yang memiliki diskresi untuk bertindak dengan melanggar hukum yang berlaku di lingkungannya.

Sebuah hal yang barangkali secara pas bisa kita baca dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*setiap orang berhak akan kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan pikiran-pikirannya; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mempunyai pendapat yang tak boleh dicampuri orang lain serta kebebasan untuk mencari, menerima dan menyiarkan keterangan dan pikiran dengan perantaraan alat pengantar apapun juga serta dengan tak usah mengindahkan batas-batas negara.*”

Kebebasan yang dimiliki pers adalah kebebasan spesifik yang sesungguhnya juga dibatasi. Kebebasan yang berlaku dalam pers melingkupi empat aspek, yaitu *free expression press*; pelarangan sensor preventif dan kontrol yang bertentangan dengan prinsip pers merdeka; adanya pengertian bahwa kebebasan yang ada adalah bukan kebebasan yang tak terbatas; serta diterimanya pengertian bahwa kebebasan pers merupakan kemerdekaan yang kerap disesuaikan dengan tugas pers yang tak saja negatif dalam karakternya tapi juga kadang harus berkarakter positif. Hal terakhir yang di pers Amerika dikenal sebagai asas “*fair comment and criticism*” ini merupakan asas wartawan yang harus dihormati setiap wartawan guna menyampaikan usul dan inisiatif pemerintah yang sah yang disertai tujuan baik kepada khalayak.

Dengan demikian pers yang independen memiliki sejumlah kaidah dalam penyampaian kritik. Ada 9 kaidah penyampaian kritik yang digagas pakar hukum pers Oemar Seno Adjie S.H. (alm). Antara lain bahwa kritik merupakan kebebasan beropini, komentar boleh mengandung suatu “*disapproval*” terhadap perbuatan dari pemerintah, *policy* dan tindakan lain. Kritik boleh mengandung pernyataan tak setuju terhadap sebuah rancangan undang-undang. Kritik dapat membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada lembaga-lembaga negara ataupun pejabat umum. Kritik atau komentar boleh menganjurkan pergantian pemerintahan melalui jalur konstitusional. Kritik harus dilakukan dengan cara “*zakelijk*”, sopan, meski kadang dengan nada keras.

Selain itu, sebuah kritik harus konstruktif dan sedapat mungkin memberikan sebuah alternatif. Kritik bisa menjadi penghinaan formal, apabila dilakukan dengan cara dan jalan yang kasar dan tak sopan. Kritik dan komentar, apabila ditujukan terhadap pejabat umum, pemerintah, kemungkinan dapat mengandung sebuah penghinaan material, sedangkan penghinaan formal tidak. Kritik tak boleh dilakukan dengan “*actual malice*”, yaitu menjelaskan dan meragukan motif dari orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan kehidupan pribadinya.

Di era reformasi yang kian menuntut terwujudnya demokrasi ini masih banyak orang, terutama kalangan pejabat yang merasa alergi dengan kritik yang dilontarkan kalangan pers. Di antara mereka yang sempat maju menjadi capres bahkan berniat menghidupkan kembali Departemen Penerangan sebagai sebuah “lembaga pembinaan” sekaligus “lembaga kontrol”.

Di kalangan para pendukung kebebasan berekspresi merasa khawatir zaman kegelapan akan kembali berulang di Indonesia di mana wartawan terpaksa lebih banyak menggunakan laporan intelijen sebagai dasar pembuatan berita ketimbang kejadian dan fakta di lapangan. Akan muncul kembali fenomena jurnalisme omongan (*talking journalism*) yang akan lebih berorientasi pada pengejaran sumber-sumber pejabat tinggi negara dan militer sebagai dasar legitimasi “fakta kebenaran” yang memunculkan peresmian desas-desus, rumor dan mungkin juga cerita fiksi. Sebagaimana

pada zaman Soeharto berkuasa, kalangan pejabat militer dan intelijen kerap melontarkan desas-desus dan tuduhan yang sama sekali mengada-ada.

Dalam hal ini, contoh yang paling ekstrem adalah Peristiwa 27 Juli 1996. Saat itu, peristiwa yang sesungguhnya merupakan eksekusi dari penyerbuan aparat keamanan ke kantor PDI Pro Mega mengakibatkan kemarahan rakyat hingga mengamuk dan melakukan perusakan serta pembakaran gedung di sejumlah tempat di Jakarta dengan mudah diubah menjadi tanggung jawab tunggal kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD). Saat itu kalangan pers mengutip semua ucapan pejabat tinggi militer dan intelijen sebagai kebenaran. Tuduhan bahwa PRD adalah kelompok komunis yang militan, gerombolan setan gundul, dan kelompok pengacau keamanan dilansir berbagai media tanpa memberikan kesempatan pada PRD, para pendukung dan keluarga aktivis PRD untuk membela diri.

Hebatnya, dalam situasi seperti ini beberapa media mengutip ucapan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, yang mengatakan, “Saya bisa tahu bahwa mereka itu komunis hanya dari mendengar cara mereka bernyanyi atau bersiul.”

Media dan wartawan saat itu seperti bungkam saat menerima “pengarahan” dan kebohongan versi militer, meski di antara wartawan banyak yang jadi saksi bahwa pelaku penyerbuan kantor DPP PDI adalah pasukan militer. Yang agak keterlaluan ada sebuah majalah yang bukan hanya sekadar menurunkan wawancara tapi menggunakan akses dan kedekatan dengan kelompok militer untuk membuka semua file pemeriksaan dan interogasi militer yang mempersepsikan PRD sebagai kelompok komunis yang berbahaya. Baru sekarang media mengungkap bahwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 tersebut tak lain adalah sebuah operasi intelijen.

Nah, gambaran bakal menyatunya kembali kerja wartawan dan intelijen inilah yang mengkhawatirkan banyak kalangan, terutama para penganjur kebebasan informasi.*

Caption dan Foto

Para fotografer seringkali mengatakan bahwa selembat foto lebih bermakna ketimbang sejuta kata-kata. Betul. Meski masih ada staf redaksi yang hingga kini salah memosisikan foto hanya sebagai pelengkap dari berita, atau hanya sebagai pemanis di sampul majalah. Fotografer, terutama fotografer berita, sebetulnya adalah wartawan. Selain harus trampil menggunakan kamera, seorang wartawan foto harus memiliki naluri untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat agar memperoleh cerita yang maksimal melalui gambar yang dijepretnya.

Kekuatan dan efek yang bisa ditimbulkan dari sebuah foto itulah yang menjadi awal masalah bagi *Acehkita*. Seorang lelaki berprofesi sebagai tukang ikan, penduduk yang bersahaja, merasa galau lantaran sampul depan Tabloid *Modus* terbitan Banda Aceh memuat gambar dirinya. Sang lelaki mengaku hidupnya menjadi tak tenang. “Seakan-akan saya ini anggota front,” ujar sang lelaki. Kekuatiran itu yang menyebabkannya datang ke kantor NGO HAM di kawasan Geuce, Banda Aceh.

Sang lelaki bersama dengan sejumlah warga masyarakat lainnya di Kecamatan Darul Imarah dikerahkan oleh camat setempat, setelah sebelumnya ikut apel ikrar bersama, untuk melakukan penyisiran mencari anggota GAM. Dengan mengenakan ikat kepala merah putih mereka naik turun gunung mencari anggota gerilyawan. Lelaki itu membawa sebuah

parang untuk keperluan menebas tetumbuhan liar.

Fotografer kawakan Hotli Simanjuntak mengabadikan adegan ikrar bersama tersebut dalam beberapa jepreten yang kemudian dikirim ke redaksi *Acehkita*. Media ini kemudian menggunakan salah satu foto yang bergambar si lelaki sedang menggenggam parang sebagai sampul depan pada edisi Mei 2004. Sebagai kelengkapan foto, *Acehkita* mencantumkan *caption* “Sejumlah warga dengan parang dan bambu runcing bersiap-siap melakukan pencarian anggota GAM di Desa Pekan Biluy, Aceh Besar (14/1). Setelah ikrar-ikrar kesetiaan, kini warga sipil Aceh mulai dilibatkan dalam konflik secara langsung, terbuka dan frontal”.

Sampai sini tak ada yang salah secara redaksional maupun pekerjaan jurnalistik lainnya. Memang benar, *caption* foto yang dibuat justru ingin menyampaikan pesan bahwa rakyat sipil, sebagaimana juga si lelaki, rawan untuk diadu-domba. Masalah baru muncul setelah Tabloid *Modus Aceh* menggunakan foto yang sama sebagai sampul depan untuk Edisi 8/ Tahun II/2-15 Agustus 2004. Dan, celakanya lagi Tabloid *Modus Aceh* memuat foto tersebut tanpa meminta ijin atau melakukan konfirmasi kepada *Acehkita*.

Siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab atas kegalauan si lelaki? Si fotografer? Redaksi *Acehkita*? Atau Tabloid *Modus Aceh*? Atau situasi perang dan aparat pemerintah yang terlibat yang harus dipersalahkan? Sebagai ombudsman saya telah mencoba melakukan penelusuran masalah dan memeriksa tanggapan redaksi *Acehkita* serta melihat dokumen surat-menyurat antara *Acehkita-Modus Aceh-NGO HAM* dan bisa saya temukan beberapa hal.

Pertama, jelas di tingkat fotografer tak ada kesalahan. Sebagai wartawan foto yang berpengalaman, Hotli Simanjuntak hanya menyodorkan sebuah fakta. Tak lebih tak kurang. Foto lelaki itu adalah bagian dari rentetan panjang kesaksiannya tentang tragedi kemanusiaan di Aceh yang banyak dipublikasikan media, baik di dalam maupun di luar negeri. Foto tersebut merupakan salah satu dari jepretan foto yang diambil tatkala ikrar kesetiaan dilakukan di sebuah lapangan, yang terbuka untuk publik umum. Kesediaan Hotli untuk menemui lelaki yang tengah galau di kantor NGO HAM adalah sikap rendah hati dan kejujuran yang selalu ditunjukkannya.

Kedua, dari sisi redaksional *Acehkita*. Pemuatan foto dan *caption*

yang netral dan tak menjurus kepada undangan bermusuhan yang dibuat *Acehkita* sama sekali tak mengandung kesalahan. *Caption* yang dibuat telah memenuhi ketentuan 5W + 1H yang diperlukan untuk menjelaskan tentang kejadian foto. Tugas utama *caption* foto tak lain adalah untuk menyempurnakan pesan foto dan mendukung benang komunikasi yang kurang jelas pada foto tersebut. Upaya redaksi *Acehkita* untuk menemui si lelaki dan menjelaskan duduk perkaranya dan berusaha terus memantau si lelaki, saya kira merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan. Saya menghargai upaya redaksi *Acehkita* untuk memberikan klarifikasi hal ini.

Ketiga, dari sisi pemuatan foto oleh *Modus Aceh*. Kesalahan yang terjadi adalah lebih prosedural yaitu *Modus Aceh* tak pernah meminta ijin kepada *Acehkita*. Terus terang saya belum membaca *Modus Aceh* edisi yang bermasalah ini. Saya juga tak tahu apakah foto yang diambil dari *Acehkita* hanya dijadikan tempelan atau disambungkan dengan teks/tulisan tertentu hingga bisa menimbulkan makna baru atau tidak. Seharusnya sebuah media tak memakai foto dari media lain yang bisa menimbulkan makna baru hanya untuk kepentingan berita yang dibuatnya. Mungkin kali lain, *Modus Aceh* perlu menghormati prosedur dan tatakrama yang berlaku di lingkungan media dan wartawan.

Lantas siapa yang harus dipersalahkan? Kasus ini menyimpulkan bahwa kesalahan ada pada kedua belah pihak yang berperang. Perang seharusnya tak melibatkan orang-orang sipil yang umumnya justru menderita karena peperangan tersebut. Camat yang terlibat dalam apel siaga dan ikrar kesetiaan serta pengerahan warga sipil untuk melakukan penyisiran terhadap anggota GAM bisa dikenai tuduhan sebagai terlibat dalam kejahatan perang (*crimes of war*). Dia bisa dikenai membahayakan nyawa warga sipil (*non-combatan*) untuk berhadapan dengan kelompok yang jelas-jelas bersenjata (*combatan*). Apalagi bila diketahui bahwa yang menjadi Pak Camat adalah anggota tentara.

Dalam perang, tak ada satu pihak pun yang terlibat peperangan, boleh menggunakan warga sipil untuk menjadi kaki tangan ataupun cuak. Masing-masing pihak justru berkewajiban menjaga keselamatan setiap nyawa orang-orang sipil yang ditemui. Karena itulah adalah wacana baru tentang pentingnya meredefinisikan kembali pengertian “perang rakyat semesta” sebagaimana tercantum dalam undang-undang kita, khususnya

ketika perang modern telah berkembang menjadi perang inkonvensional yang melibatkan penguasaan ekonomi dan teknologi.

Namun pelajaran berharga dari kasus ini adalah kita, para wartawan, harus lebih berhati-hati dalam memberitakan sesuatu. Nama dan identitas (termasuk wajah) yang kadang tak berarti apa-apa bagi kita yang berada di luar area konflik, bisa berarti malapetaka bagi mereka yang terperangkap dalam area konflik. Sebagai contoh, potret seorang anak menyandang senjata M-16 dan bendera GAM bisa hanya berarti sebagai sampul depan majalah *Tempo* (edisi Juli 2003), tapi bagi si anak bisa berdampak luar biasa. Bukan tak mungkin si anak akan mengalami penghilangan secara paksa atau menjadi korban petrus (penembakan misterius).

Menampilkan wajah kerumunan (banyak orang) kadang lebih tidak berisiko ketimbang menampilkan wajah seseorang secara *close up*. Menampilkan sosok wajah secara siluet atau dari sisi samping atau sisi belakang juga menjadi salah satu alternatif yang kerap jadi pilihan. Melindungi obyek kita yang posisinya *underdog*, yang setiap saat bisa menjadi korban, adalah kewajiban setiap wartawan. Untuk itulah lebih baik gunakan nama samaran. Dan bila kita, para wartawan, diminta untuk membuka jatidiri orang yang menjadi obyek pemberitaan, perjuangkan mati-matian untuk tidak usah membukanya. Gunakan, hak tolak (hak ingkar), yang dimiliki dalam profesi kewartawanan.*

Pers Alternatif

Terus terang hingga kini belum ada definisi baku tentang pers alternatif. Banyak orang memahaminya sebagai lawan pers profesional, semacam *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Suara Pembaruan*, *Republika* dan lain-lain. Tapi juga bukan media komunitas sebagaimana yang diterbitkan oleh sejumlah pengembang untuk warganya. Ada yang mengategorisasikannya sebagai media yang berada di luar *mainframe* negara, terdiri mulai terbitan mahasiswa (pers mahasiswa), kampus (pers kampus), terbitan ornop, pers terbitan pondok pesantren hingga terbitan yang dikelola sejumlah wartawan yang muncul jauh sebelum era reformasi macam *Suara Independen*, *Xpos* atau *SiaR*.

Dari model penyajian, pers profesional di masa lalu banyak menggunakan eufemisme bahasa untuk menghaluskan realitas, sedangkan pers alternatif justru tampil lugas. Banyak orang melihat pers alternatif adalah cerminan suara rakyat dan lebih merupakan sebuah media perjuangan seperti halnya pers bawah tanah yang pernah berkembang di Prancis saat Perang Dunia II.

Isi pers alternatif biasanya kritis pada kemapanan (*statusquo*). Tak banyak memuat pernyataan pejabat negara sebagai sumber utama rujukan. Kandungan tulisan yang disajikan pada umumnya membela pada

penggelingingan proses demokratisasi dengan memberikan empati besar kepada rakyat.

Penguasa negara di masa lalu, menganggap pers alternatif sebagai musuh. Untuk itu, sejumlah pers alternatif dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung dan pengelolanya dijebloskan ke penjara. Peranan dan kualitas pers alternatif pada akhir paruh 80-an hingga 1997 memang luar biasa hingga penguasa perlu merasa kuatir. Pakar pers Indonesia dari Australia, David T. Hill berpendapat bahwa pers alternatif di Indonesia punya peranan yang besar dalam menjatuhkan pemerintahan Soeharto.

Namun, tampaknya pemahaman orang akan pers alternatif berbeda-beda pada tahun 80-an, tahun 90-an dan kini. Pada tahun 90-an, khususnya pasca pembredelan *Tempo-DeTIK-Editor* pada 1994, yang ditandai dengan banyak bermunculannya pers alternatif orang lebih mengenal sebagai sebuah media perlawanan, media yang meloloskan diri dari kontrol politik.

Kini pengertian alternatif telah mengalami pergeseran. Reformasi Mei 1998 di Indonesia telah mengubah wajah negara-bangsa yang selama 32 tahun menamakan diri sebagai “Republik Persatuan dan Kesatuan Pembangunan Indonesia” secara total. Departemen Penerangan, Kejaksaan Agung, Mabes Cilangkap dan institusi militer lainnya tak lagi mengontrol kantor redaksi. Angin sejuk seperti bertiuip dan mampu membuka koridor informasi yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh penguasa. Namun era kebebasan ini tak sepenuhnya berjalan, karena musuh pers baru bermunculan. Antara lain melalu aksi komunalisme, gugatan pejabat dan pengusaha bermasalah yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Unsur-unsur pemerintah berulang-kali berusaha mendiskreditkan pers dengan menggunakan wacana dan jargon-jargon resmi, seperti nasionalisme, etika publik, ketertiban sosial, stabilitas nasional, dan lain-lain. Dalam kasus Aceh misalnya, pers disudutkan dengan tuduhan tidak nasionalis. Dalam kasus-kasus korupsi, pers dituduh melanggar privasi dan asas praduga tak bersalah. Pers juga disudutkan dengan tuduhan memprovokasi konflik, menyebarkan fitnah dan kebencian, serta merusak moral bangsa dengan pornografi.

Di sisi lain, kelompok-kelompok yang tidak bahagia dengan iklim kebebasan pers juga menggunakan pendekatan legal-formal untuk melawan kebebasan pers. UU Keadaan Darurat Militer digunakan TNI

untuk membatasi akses media ke wilayah konflik di Aceh. Yang lebih membahayakan adalah upaya-upaya untuk memejahjaukan institusi atau individu pers yang belakangan ini kian marak.

Perubahan situasi ini menimbulkan dampak yang jauh lebih serius bagi komunitas pers. Kasus-kasus pengaduan terhadap institusi media atau wartawan benar-benar menguras energi dan konsentrasi komunitas media. Sanksi hukum yang memberatkan pihak media bukan hanya menimbulkan kerugian material, namun juga kerugian moral yang jauh lebih memukul. Kalangan media menjadi sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM. Mereka selalu ketakutan diperkarakan ke pengadilan. Langkah-langkah hukum itu tiba-tiba menempatkan pers sebagai terdakwa, yang secara simbolik terposisikan sebagai pihak yang *illegitimate*.

Sebaliknya, karena berhasil memenangkan pertempuran di pengadilan, para pengusaha dan pejabat bermasalah tiba-tiba saja muncul dalam konstruksi sosial yang sangat *legitimate*: sebagai hamba hukum yang baik, anti-kekerasan, dan sanggup menyelesaikan masalah dengan taat asas dan taat hukum. Hal ini terjadi karena Dewan Pers sendiri sejak tahun 2000 mengampanyekan pentingnya menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui cara-cara non kekerasan, salah-satunya melalui jalur hukum.

Bagaimana pers alternatif? Ada yang mengatakan, kini tak ada lagi pers alternatif. Sebutan “alternatif” telah pudar bersamaan dengan bangkrutnya rejim Orde Baru. Semua pers kini berlomba-lomba menjadi alternatif. Baik isi, cara penyajian, *angle* maupun topik yang diangkat. Semua media berlomba membuat liputan yang bersifat alternatif.

Yang disebut dengan pers alternatif selama ini ternyata adalah pers yang sebetulnya mencoba keluar dari model otoritarian, Soviet-totalitarian dan pers Pancasila (yang merupakan antitesis terhadap model otoritarian dan libertarian). Pers alternatif di Indonesia menggunakan gabungan unsur “kebebasan” dalam model libertarian dan “kontrol diri” pada model tanggung jawab sosial.

Yang terakhir ini dikembangkan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah baku jurnalisme profesional modern yang banyak dipelajari para wartawan muda yang kemudian menularkan ilmu mereka pada adik-adiknya yang masih berada di kampus. Model alternatif menjadi jawaban

atas gagalnya model pers Indonesia yang kondang disebut sebagai pers Pancasila, di mana Departemen Penerangan dan Mabes ABRI jadi pusat semua kebijakan redaksional yang sesungguhnya.

Pernyataan media alternatif telah mati tak sepenuhnya benar, meski pada kenyataannya banyak pesaing baru bermunculan. Orang menganggap pengertian pers alternatif kini sebagai sebuah media kritis yang isinya tak bombastis, cuma memaki dan mengabaikan unsur akurasi. Kini, orang mengkaitkan unsur “alternatif” dengan berita yang bisa dipercaya, sebuah *side information* ketimbang *main information* yang muncul ke permukaan. Kita bisa melihat bagaimana jurnalisisme investigatif kini mulai dikembangkan kembali di sejumlah mediamassa.

Pada 2004 ini, penyajian alternatif tak banyak lagi diperankan oleh media cetak. Para “aktivis” lebih memilih model penyebaran informasi melalui milis dan *dotcom*. Media *mainframe* terlalu sibuk dengan pemberitaan politik elit Jakarta dan belum sepenuhnya mampu menyuarakan kaum tak bersuara, sebagaimana yang menjadi tujuan perjuangan pers alternatif.*

Penyamaran

Apakah seorang wartawan, dalam menjalankan pekerjaannya, diperbolehkan melakukan penyamaran? Pertanyaan ini berkali-kali saya ajukan kepada sejumlah wartawan. Sebagian dari mereka meyakini bahwa secara etik kerja, seorang wartawan harus bisa dan wajib menunjukkan identitasnya. Misalnya ketika hendak mewawancarai seseorang, si wartawan harus memperkenalkan diri, terlebih bila si narasumber mempersanyakannya. Karena itulah, salah satu tujuan kartu pers, dibuat. Hal inilah yang membedakan pekerjaan antara seorang wartawan dengan seorang intel.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa seorang wartawan tidak wajib menunjukkan kartu persnya. Pekerjaan seorang wartawan sejati tidak pernah macam-macam. Legalitas pekerjaannya tak perlu diperoleh dari selembar kartu pers atau surat penugasan. Seorang wartawan dalam bekerja tak perlu pamer menunjukkan perlengkapan yang dibawanya seperti kamera, *tape recorder*, kaset atau *block note*. Menurut kelompok ini, justru para wartawan yang berkategori bodrex dan tukang peras yang kerap mempunyai kartu pers atau surat tugas dengan penampilan mencolok, lengkap dengan rompi mereka. Identitas hanya dibuka bila diperlukan, misalnya ada orang yang meragukannya.

Jawaban kedua kelompok wartawan itu sebetulnya hanya menjawab pekerjaan seorang wartawan yang bersifat “formal” seperti wawancara dan meliput secara langsung. Bagaimana dengan pekerjaan yang bersifat investigatif?

Tidak mudah menjawabnya, apalagi sejak jaman Orde Baru hingga kini ada banyak wartawan palsu. Sudah bukan rahasia bahwa ada sejumlah media cetak, termasuk kantor berita nasional *Antara* memberikan kartu pers kepada aparat intelijen. Wartawan yang kerap turun meliput demonstrasi, pemogokan atau ke daerah konflik sering berjumpa dengan mereka ini. Kritik mengenai hal ini pernah saya sampaikan langsung kepada Kang Sobary. Menurut beliau, sejak kepemimpinannya kebiasaan memberikan kartu pers *Antara* kepada anggota intelijen sudah dihentikan.

Wartawan dalam bekerja, menurut saya, harus memegang prinsip transparansi. Baik dalam mengumpulkan berita maupun berkenaan dengan cara wartawan dalam berhubungan dengan sumber-sumber mereka. Dalam proses mencari ataupun menyampaikan kebenaran kepada publik, seorang wartawan tak boleh berbohong atau menyesatkan narasumber mereka.

Namun, kenyataan di lapangan acapkali berbeda. Wartawan kerap terpaksa menggertak si narasumber dan gagal untuk berterus terang kepada sumber tentang tujuan sesungguhnya dari cerita yang akan dibeberkan. Bahkan ada banyak wartawan sengaja menggunakan teknik berbohong kepada sumber tentang tujuan pencarian berita yang sebenarnya. Ada banyak penyebab alasan berbohong, mulai alasan demi keamanan hingga demi mendapatkan cerita yang jujur dari sumber, sebab ada banyak kalangan yang tak nyaman bila harus bicara dengan wartawan.

Dalam bekerja wartawan memang kerap terpaksa menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Teknik penyamaran sebetulnya bukan hal yang baru. Pada awal Abad XX, seorang wartawan investigator bernama Nellie Bly pura-pura menjadi orang gila agar bisa menjadi penghuni sebuah rumah sakit jiwa. Ia sengaja menyamar untuk mendapatkan bukti-bukti tentang buruknya perawatan rumah sakit jiwa yang ada bagi penderita gangguan jiwa. Kini wartawan televisi kerap menggunakan kamera tersembunyi (*candid camera*) untuk mendapatkan bukti-bukti tentang ketidakberesan.

Pada 1992, saat masih bekerja sebagai wartawan pada sebuah majalah

berita, saya harus memimpin sebuah tim investigasi untuk mengungkap praktek aborsi yang saat itu telah marak di Jakarta. Praktek ilegal yang setengah terbuka ini betul-betul tertutup bagi wartawan. Kalau sekedar informasi mengenai tarif, dokter yang melakukan atau intensitas dan latar belakang pasien yang datang, sangat mudah untuk didapatkan baik melalui pengamatan langsung, wawancara dengan para makelar, atau langsung dengan pasien rata-rata bermasalah dan mudah berbagi cerita. Tapi waktu itu saya ingin tim saya bisa masuk ke ruang aborsi dan melihat dengan mata kepala sendiri praktek aborsi saat dijalankan, lengkap dengan gambaran suasana, ruangan, peralatan yang ada dan orang-orang dalam ruangan yang kami gambarkan sebagai tempat penjalangan tersebut.

Meski sempat muncul perdebatan tentang etika dan nurani, akhirnya kami memutuskan tak ada cara lain selain menggunakan cara penyamaran. Sebab tak mungkin kami akan bisa mendapatkan bahan yang lengkap dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan kepada jaringan aborsi ilegal tersebut.

Untuk mengorek informasi dari para calo kami meminta sejumlah wartawati untuk menyamar sebagai gadis yang hamil sebelum menikah. Untuk bisa masuk ke ruangan dan membuat reportase langsung dari “tempat kejadian perkara”, saya meminta seorang wartawan untuk mendampingi dan menyaru sebagai pacar dari seorang pasien yang berniat mengugurkan kandungannya. Tentu saja dengan persetujuan dan kerja sama dari si pasien. Sejumlah cara lain kami gunakan untuk mendapatkan laporan investigasi yang eksklusif. Alhasil, tim kami berhasil menurunkan laporan utama sepanjang 14 halaman lengkap dengan sketsa ruangan tempat praktek aborsi. Termasuk wawancara panjang eksklusif dengan seorang gadis yang baru saja menggugurkan kandungannya.

Tak banyak media yang mengungkap apa yang telah kami kerjakan. Padahal tempat yang kami paparkan adalah sejumlah klinik di kawasan Raden Saleh, Kebayoran Baru dan Tanah Tinggi. Baru 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1997, media dihebohkan dengan terbongkarnya praktek aborsi ilegal oleh sebuah klinik di kawasan Tanah Tinggi. Sebuah tempat yang pernah kami selidiki 5 tahun sebelumnya.

Yang jadi pertanyaan sekarang, kapan seorang wartawan boleh melakukan penyamaran atau tidak berlaku transparan kepada sumbernya?

Mantan pemimpin redaksi *Atlanta Journal-Constitution* dan kepala biro harian *New York Times*, Bill Kovach, mengatakan bahwa ide wartawan tak boleh menyesatkan sumber tidak harus menghalangi wartawan untuk melakukan penyamaran. Namun, menurutnya, sebelum menggunakan teknik tersebut si wartawan harus melakukan pengujian yang serupa dengan konsep pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Setidaknya ada 3 langkah pengujian konsep tersebut.

Pertama, informasi yang dicari harus cukup vital untuk kepentingan publik. Pertimbangan “vital untuk kepentingan publik” ini demikian pentingnya hingga bisa membenarkan dipakainya teknik penyamaran. Kedua, wartawan tak boleh memakai penyamaran kecuali tak ada jalan lain untuk mendapatkan cerita. Ketiga, si wartawan harus mengungkapkan kepada pembacanya manakala mereka menyesatkan sumber-sumber untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, si wartawan harus menjelaskan semua alasan yang melatarbelakangi penggunaan teknik penyamaran itu, termasuk mengapa laporan mereka dibenarkan perolehannya melalui cara penipuan dan mengapa hal itu menjadi satu-satunya cara.

Dengan cara demikian, pembaca akan mempunyai kesempatan dan diberi semacam hak untuk mengevaluasi apakah cara-cara yang telah digunakan si wartawan bisa dibenarkan atau tidak. Dalam hal ini si wartawan harus berterus terang bahwa pembaca dan masyarakat lah yang menjadi obyek loyalitas mereka dalam bekerja. Pembaca harus diberitahu tentang standar apa yang digunakan oleh si wartawan dan medianya saat bekerja.

Melalui model penyamaran ada banyak wartawan di dunia berhasil mengungkap berbagai skandal politik (disertai seks) dan korupsi. Model inilah yang tampaknya perlu terus dikembangkan untuk melengkapi jurnalisme investigasi yang kita perlukan untuk mengungkap berbagai kasus yang hingga kini masih tersembunyi di bawah karpet.*

1,5 Tahun Jurnalisme Patriotis

Satu setengah tahun sudah wartawan Indonesia dikenalkan dan mengenalkan dengan sebuah paradigma baru yang bernama jurnalisme patriotis. Pada awal Mei 2003, menjelang diperlakukannya operasi keamanan terpadu untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sejumlah pejabat dan juga suami presiden, menyatakan bahwa setiap insan pers Indonesia harus memihak kepentingan Tanah Air, tidak bisa tidak. Tak Cuma itu, sejumlah wartawan yang akan meliput ke Aceh harus ikut latihan dasar kemiliteran di perbukitan Sangga Buana, lengkap dengan mempelajari teknis *jungle survival* seperti minum darah ular dan sebagainya.

Benarkah jurnalisme patriotis adalah solusi dan bukan masalah baru? Di masa lalu (juga sampai sekarang) dengan mudah kekuasaan menuduh wartawan telah memelintir berita. Saat wartawan *Sidney Morning Herald*, David Jenkin, melaporkan bisnis keluarga Cendana, Menpen Harmoko segera melarang peredaran harian tersebut di Indonesia. Tak cuma itu, Harmoko juga menuduh bahwa para wartawan asing di Jakarta mempraktekkan jurnalisme alkohol. Harmoko menuduh para wartawan asing tak menulis berdasar fakta tapi lebih banyak menulis berdasar

ngrumpi sambil minum sampai mabuk di pub atau di café.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif pada awalnya mengimbau agar masyarakat mengerti tentang pembatasan liputan yang kemungkinan akan diberlakukan di Aceh dan kemudian melontarkan istilah jurnalisisme patriotis sebagai satu-satunya solusi. Pers diminta berpihak pada NKRI untuk menghadapi kelompok GAM. Sejak itu pula pers mengubah sebutan GAM menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA).

Bagi pemerintah tampaknya ini keputusan final yang tak dapat digugat. Untuk itulah media diminta terlibat untuk menjadi humas yang baik. Operasi militer yang dilihat secara telanjang mata oleh masyarakat secara perlahan diubah menjadi “Operasi Terpadu”. Sejumlah istilah yang lebih halus dan keras diproduksi. Antara lain operasi penumpasan GAM diubah menjadi operasi penegakan hukum dan pemulihan keamanan (operasi terpadu). Untuk memperoleh legitimasi politik istilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diubah menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA). Nasionalisme digelembungkan sedemikian rupa menjadi alat legitimasi untuk melakukan berbagai kebijakan yang sebetulnya tak populer. Dan, dengan mengatasnamakan nasionalisme pula sejumlah kelompok pemuda, melakukan tekanan dan meneror aktivis Kontras yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Aceh.

Apa yang salah dengan media dan kerja jurnalis? Banyak kalangan menyatakan bahwa pers kini telah bebas merdeka. Pada kenyataannya, di lapangan masih banyak wartawan dan fotografer dipukuli aparat militer secara membabi buta, bahkan ketika mereka telah menunjukkan kartu identitasnya sekali pun. Mereka diteriaki aparat negara dengan kata-kata, “Wartawan anjing, wartawan a-nasionalis.” Apa yang salah? Ada kemungkinan masyarakat dan juga Negara-Bangsa kita ini sedang sakit berat. Pers yang seharusnya menjadi dokter yang bisa melakukan diagnosis dan mencari solusi, kini malah justru terkapar dan menjadi pasien yang harus dirawat.

Pers sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara tampaknya memang hanya menjadi “angan-angan”, *das sein*. Sebab ada banyak negara yang anti-demokrasi mencoba menginterpretasikan kebebasan pers sesuai kepentingan kekuasaan.

Di negara antidemokrasi, pers kerap dianggap sebagai musuh. Laporan

pers dianggap berpotensi menjatuhkan pemerintah. Malah ada pemeo “mata pena lebih tajam dari pedang” atau ucapan Napoleon Bonaparte yang mengatakan “pena lebih berbahaya ketimbang peluru”.

Pers sebagai bagian dari kekuasaan memang bisa memiliki beberapa fungsi. Mulai dari menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberi status legitimasi, hingga mendefinisikan dan membentuk persepsi atas sebuah realitas. Praktek junalisme pernyataan yang lebih merupakan kutipan atas pernyataan seorang tokoh atau pejabat dan *counter* pakar atas suatu pernyataan pada hakekatnya telah menyulap *news paper* menjadi sebagai *views paper*. Artinya, media lebih memberitakan tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan pikiran para narasumber.

Apa peran pers sebenarnya? Di Indonesia, kerap kali pers dibingkai dalam bahasa jargon. Ada banyak sebutan terhadap pers. Mulai dari “pers perjuangan”, “pers pembangunan”, “pers yang bebas tapi bertanggung jawab”, “pers Pancasila”. Orang kerap lupa pada fungsi sebenarnya bahwa pers tak lebih dan tak kurang adalah pers, sebuah media yang punya fungsi sosial. Demikian pula wartawan tak lebih adalah wartawan, seseorang yang tugasnya meliput sebuah kejadian. Tak lebih tak kurang.

Dengan demikian adalah terlalu berlebihan sebutan atau kiasan yang menggambarkan wartawan sebagai seekor “binatang” yang menggigit, apalagi menghisap darah, seperti yang tergambar lewat penyebutan “nyamuk pers” atau “anjing penjaga” (*watchdog*). Sama berlebihannya dengan menggambarkan pers sebagai sebuah pilar demokrasi.

Pers Indonesia kini saatnya melakukan aksi moratorium, berhenti mengutip kata-kata tokoh dan pejabat yang saling menyakiti satu sama lain. Pers harus bisa berperan untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya penyelesaian dan penanganan konflik serta korban-korban konflik yang terus berjatuhan di banyak tempat.

Pekerjaan jurnalis yang hanya memegang kamera dan alat tulis seharusnya tak perlu dikait-kaitkan dengan nasionalisme. CNN yang mempraktekan jurnalisme patriotis kini telah kehilangan pamor dan dipertanyakan kredibilitasnya akibat partiotisme yang berlebihan. LKBN Antara juga pernah dipertanyakan kredibilitasnya saat menurunkan liputan

pasca jajak pendapat di Timor Timur, sebagaimana halnya ketika awal proses integrasi.

Semestinya media dan jurnalis bisa menjadi bagian dari sistem peringatan dini bagi TNI agar dalam melakukan operasi tak melakukan penyimpangan. Bila ini terlaksana, akan terjadi sinergi yang sesungguhnya tanpa perlu ada kesangsian dan pertanyaan tentang nilai-nilai patriotisme/nasionalisme dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Nasionalisme punya potensi yang bisa mengaburkan cara pandang seseorang terhadap fakta, sekaligus mereduksi rasa kemanusiaan sebagaimana pernah dinyatakan Bertrand Russell menyatakan bahwa “patriotisme adalah kesediaan untuk membunuh dan dibunuh karena alasan-alasan yang sepele”.

Kini 1,5 tahun telah berlalu. Puluhan wartawan datang “ke” dan pulang balik “dari” Aceh. Telah banyak liputan dihasilkan pada 3 bulan pemberlakuan status darurat militer pertama. Kini aparat keamanan telah menurunkan derajat keamanan Aceh menjadi berstatus darurat sipilnya. Lebih dari seribu orang telah gugur di kedua belah pihak. Ribuan lainnya hilang. Sebuah sumber menyebut konflik di Aceh telah menghasilkan 14.000 orang janda. Sejumlah Panglima GAM telah berhasil ditembak mati.

Begitu banyak pergantian telah terjadi di negeri ini. Cut Nyak yang dulu pernah berjanji untuk tak akan ada lagi darah yang akan menetes di tanah rencong kini kalah telak dalam Pemilu Presiden putaran dua. Ia hanya akan memerintah dalam hitungan hari saja. Rakyat Aceh tampaknya lebih suka memilih dan berharap pada sosok presiden baru, yang minimal tak pernah berjanji sambil menangis di depan kamera televisi yang ditonton puluhan jutaan rakyat.

Bagaimana perkembangan pers Indonesia? Sepertinya wartawan perlu mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang ada dan mengucapkan secara jujur “selamat jalan jurnalisisme patriotis”. Biarlah para wartawan Indonesia memilih langkahnya sendiri untuk menjadi bagian dari kekuatan kritis masyarakat yang bisa mengatakan *right is right and wrong is wrong* dan bukan *right or wrong is my country*. Karena yang terakhir inilah merupakan moral dasar dan nilai profesi yang melekat pada setiap diri wartawan profesional di manapun.*

Tentang Foto Korban

Sejumlah pertanyaan dilayangkan pembaca *Acehkita* mengenai foto-foto seram yang dimuat dalam website maupun dalam edisi cetak majalah *Acehkita*. Mereka bertanya mengapa foto-foto seseram itu ditampilkan *Acehkita*? Apakah tidak ada foto lain yang lebih ‘manusiawi’? Apakah ini tak melanggar etika jurnalisme foto? Apakah dengan pemuatan itu *Acehkita* sama saja dengan menyebarkan gambar-gambar sadisme?

Terus terang, tak mudah menjawab gugatan ini. Sebagai ombudsman, saya diminta untuk memeriksa dan meneliti kembali semua foto yang dikategorikan sebagai ‘seram’ dan ‘sadis’ itu. Foto-foto korban yang tampak sebagian besar telah berupa jenazah yang terbujur kaku. Sebagian dari tubuh mereka menampakkan lubang pelor dan lelehan darah. Yang lain tubuhnya gembung membusuk. Siapakah mereka itu? Nasib malang apakah yang menimpa mereka hingga harus meninggal dunia dengan cara menyedihkan seperti itu?

Melihat foto itu, melihat pakaian yang tersisa pada korban, melihat ekspresi wajah terakhir sebelum mereka meregang nyawa, kesimpulan yang bisa ditarik hanya satu. Mereka adalah orang-orang tak berdosa yang terperangkap di daerah konflik (baca: perang).

Kebanyakan wartawan (kecuali wartawan salon, tentu saja) pasti tak asing dengan pemandangan mengerikan seperti yang ada dalam foto *Acehkita*. Mereka yang pernah meliput kecelakaan seperti tabrakan kereta api Bintaro atau ke kamar mayat RSCM, pasti pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan.

Yang sulit untuk dijawab adalah hal yang berhubungan dengan etika. Apakah pemuatan foto-foto korban sebagaimana yang dimuat *Acehkita* melanggar etika atau tidak. Memeriksa kembali semua tulisan tentang etik fotografi, saya tak menemukan adanya ketentuan yang mengatur pemuatan gambar-gambar korban. Mungkin dikarenakan kalangan media dan pakar komunikasi belum cukup banyak memperbincangkan jurnalisme foto. Guru besar ilmu pengetahuan pers dari Universitas Indiana yang juga pernah menjabat jadi Direktur Lembaga Pengembangan Wartawan Internasional, Dr. Floyd G. Arpan, hanya menyebut 10 problem etika fotografi.

Dengan demikian, untuk memeriksa unsur benar-salah dalam pemuatan foto-foto korban oleh *Acehkita*, mau tidak mau kita harus memeriksa kembali niatan dan maksud pemuatan foto-foto tersebut. Dalam hal ini kita biasa memeriksa visi dan misi lembaga tempat bernaung *Acehkita*, yaitu mendorong penyelesaian konflik sesegera mungkin dengan cara diakhirinya semua bentuk kekerasan sesegera mungkin. Dengan kata lain, *Acehkita* ingin mendorong proses perdamaian. Hal ini tercermin dari model jurnalisme yang dianutnya, yang merupakan perpaduan antara *peace journalism* dan *advocacy journalism* yang sama-sama melihat korban sebagai fokus pemberitaan.

Dengan memahami sikap pengelola *Acehkita* seperti ini, kita bisa melihat lebih lanjut bahwa foto-foto yang dimuat *Acehkita* lebih merupakan gambar dari sosok korban yang tak berdaya, kesedihan, dan korban peperangan, sebagaimana gambaran pada umumnya masyarakat sipil di Aceh saat ini. Kelompok ini adalah kelompok yang tak tahu apa-apa dan sama sekali tak berkepentingan dengan peperangan, apalagi persoalan kalah-menang atau persetujuan abadi antara kaum kesatria dengan kelompok hipokrit.

Acehkita sengaja memuat foto-foto korban dengan tujuan untuk menampilkan kekejaman perang. *Acehkita* ingin mengajak semua pihak agar segera mengakhiri perang, sebab perang (konflik) hanya menimbulkan korban pada warga sipil yang sama sekali tak berkepentingan dengan

peperangan. Cara pandang ini tentu berbeda dengan cara pandang sejumlah koran kuning terbitan Jakarta yang banyak menampilkan foto jenazah korban kriminalitas. Bandingkan juga dengan pemuatan foto-foto korban di Lubang Buaya pada Oktober 1965 yang kemudian digunakan untuk mengobarkan kebencian rakyat yang kemudian berujung pada terjadinya pembunuhan massal secara sistematis dan meluas.

Dari sisi tampilan foto, *Acehkita* telah memilih foto berdasar pertimbangan estetika fotografi antara lain bagus secara fotografi, angle tepat, berdimensi kemanusiaan kuat, layak muat, serta jauh dari unsur eksploitasi dan pameran kekerasan. Foto yang dipilih *Acehkita* hanya foto korban kekerasan pasca konflik (*post factum*) yang tidak mengajak orang untuk menggunakan kekerasan yang sama. Dengan pertimbangan itu, tak heran bila *Acehkita* lebih banyak menampilkan foto-foto yang mengarah pada terjadinya kejahatan perang. Antara lain penyilangan rumah penduduk sipil, penggunaan tenaga sipil sebagai perbantuan, dan lain-lain.

Tentang tuduhan sadisme atau sadistik, foto yang dimuat *Acehkita* jauh dari hal itu. Foto yang dimuat *Acehkita* lazim sebagai sebuah foto yang banyak dihasilkan oleh jurnalis yang meliput konflik atau peperangan. Hal ini bisa diperbandingkan dengan foto James Natcway dari *Reuters* tentang pembantaian Ketapang, atau foto-foto korban pembantaian di Palangkaraya yang dimuat *Times*, foto Tarmizi tentang korban penyiksaan di Aceh yang mendapat penghargaan dari World Press Photographers. Juga sekuel foto “Saigon Execution” karya Eddie Adams dari *AP* yang merekam adegan kepala polisi Saigon saat menembak kepala seorang perwira Vietcong yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada 1969, atau foto Greg Marinovich dari *AP* tentang pembantaian di Afrika Selatan yang salah satunya fotonya memperlihatkan sebuah belati menancap di kepala korban yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada 1991.

Demikian pula dengan foto Paul Watson dari *Toronto Star* yang menggambarkan seorang tentara Amerika yang ditelanjangi, disiksa dan diseret di jalanan Mogadishu oleh para pengikut Mohammed Farah Aided. Juga serial foto *features* mengerikan dari *AP* mengenai pembantaian di Karumbamba, Rwanda, dimana ada mayat membusuk di dipan yang tengah dikerubungi ribuan belatung dan lalat. Foto terakhir ini juga yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada 1995.

Sebuah foto jelas lebih bermakna daripada sejuta kata-kata. Itu sebabnya setiap orang bisa menafsirkan sebuah hasil jepretan wartawan yang ada di lapangan. Ketika sebuah foto korban tampil, mungkin ada pembaca berdecak kaget dan bergumam, “kejam nian si pelaku.” Gumam yang sama kemungkinan telah muncul sejak saat si wartawan membidikkan kameranya kepada obyek yang dilihatnya, juga redaksi saat menerima kiriman dari si wartawan, juga bagian artistik saat akan memuatnya. Dengan demikian, si pembaca hanyalah orang nomor sekian yang mengalami kengerian. Yang paling banyak menyantap kengerian sehari-hari adalah wartawan yang menyaksikan secara langsung. Sang pembaca adalah orang yang hanya melihat hasil seleksi berlapis-lapis yang telah dilakukan redaksi.

Tuduhan *Acehkita* menyebarkan sadisme tentu tuduhan yang mengada-ada. Sadis adalah kejahatan, sedangkan sadisme adalah keinginan abnormal untuk berbuat kejam. Perlu dibedakan bahwa antara film dan foto adalah media yang jelas berbeda. Foto menampilkan fakta-fakta (biasanya *post conflict*), sedangkan film selain merekam korban umumnya juga menampilkan saat-saat kejadian. Film (terutama fiksi) punya potensi besar untuk menyebarkan sadisme, misalnya film Oliver Stone berjudul *Natural Born Killer's* yang sempat menimbulkan kontroversi.

Harus dibedakan pemahaman mengenai foto sadis dan sebuah foto jurnalistik. Dalam jurnalistik, foto hanya mewakili fakta-fakta yang terjadi. Sementara foto sadis belum tentu mewakili fakta sebenarnya, dan kerap lebih merupakan fiksi. Fakta dalam foto jurnalistik mempunyai posisi yang penting sebagai sebuah kesaksian. Ia menjadi mata bagi jutaan orang yang sama sekali tak peduli atau tidak tahu akan fakta-fakta yang terekam dalam foto.*

Etika Jurnalisme Foto (1)

Dalam pers dikenal kode etik jurnalistik. Berbagai organisasi pers telah menyusun kode etik sebagai panduan dan standar kerja. Demikian pula dengan organisasi jurnalis televisi. Bagaimana dengan jurnalis foto? Ada beberapa organisasi jurnalis foto yang telah berdiri sejak 1998, setelah sebelumnya semuanya diwadahi oleh PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui negara, namun tampaknya wacana tentang etika yang berlaku dalam jurnalis foto belum cukup banyak. Apa ini tak menunjukkan bahwa kemajuan teknologi fotografi yang telah menembus era digitalisasi ini belum diimbangi dengan pengetahuan dan filsafat.

Kita bisa melihat bagaimana kerja kaum paparazi di luar negeri yang bukan hanya kerap melanggar etika, tapi juga melanggar hak pribadi orang. Kita juga bisa melihat bagaimana 2 tahun lalu seorang jurnalis foto dari sebuah koran kenamaan Amerika memanipulasi hasil jepretannya di Afganistan. Hal ini menunjukkan etika fotografi masih jarang dibicarakan di kalangan jurnalis. Seolah-oleh jurnalisme fotografi itu sekadar tempelan dalam media hingga perannya tak terlalu penting. Padahal di era informasi yang serba cepat ini, teks berita dan foto adalah sama pentingnya.

Hampir semua mediamassa terkemuka kini mewajibkan jurnalisnya untuk juga memahami fotografi, sehingga selain bisa membuat berita juga

harus bisa memotret. Namun tak banyak lembaga pers yang memberikan pemahaman tentang etika fotografi, mereka hanya menekankan pada kode etik jurnalistik yang kerap menjadi rujukan dalam sengketa pemberitaan.

Karena itu barangkali problematik jurnalisme fotografi perlu dibuka lebih lebar dan menjadi sebuah wacana. Saya, selaku ombudman media ini, juga merasa perlu untuk melakukannya.

**

Etika dalam fotografi akan berkembang bila membentur masalah atau kasus. Tanpa itu etika akan menjadi hanya sebagai panduan umum yang tak berbunyi apa-apa. Kian banyak kasus akan kian kaya pemahaman kita mengenai etika.

Dalam fotografi terdapat berbagai masalah etika yang justru sama sekali tak mempunyai kemiripan dengan penyusunan berita biasa. Hal ini dapat dipahami karena foto memberikan pengaruh yang lebih sensitif ketimbang pemberitaan biasa. Apalagi teknik fotografi dan peralatannya telah memasuki era digital. Kini banyak tersedia perangkat lunak untuk memproses foto menjadi lebih indah, bagus, dan berbicara. Bila tak hati-hati kita akan terjerumus pada suatu proses mengerikan dalam jurnalistik yang lazim disebut sebagai “manipulasi fakta”.

Salah satu etika utama dalam jurnalisme foto adalah kejujuran atau kebenaran. Dalam persoalan ini jurnalis akan selalu dihadapkan kepada pertanyaan benar atau bohongkah yang dikabarkannya dalam potret itu? Apakah gambar dan keterangan fotonya (*caption*) telah sesuai. Soal kejujuran sangat perlu justru karena pengaruh foto lebih besar ketimbang pemberitaan biasa. Sebuah foto jurnalistik adalah sebuah fakta yang bebas dari rekayasa atau pengaturan terhadap obyeknya.

Sebagai sebuah contoh, di sebuah jalan terjadi keributan hebat akibat sebuah bom meledak. Orang-orang yang lewat di tempat itu akan dicekam perasaan takut. Seorang fotografer datang ke lokasi tersebut tapi suasana yang dilihatnya kurang mencekam. Menurutnya, mimik orang-orang tersebut kurang mengekspresikan rasa takut maka diambillah sebuah petasan dari tas kameranya kemudian disulutnya, dan meledak. Akibat tindakan itu adalah munculnya suara ledakan baru, hingga membuat orang yang berada di sekitar menjadi bertambah cemas. Barulah sang fotografer

memotret kerumunan orang-orang yang tampak dalam suasana tegang dan cemas mencoba menyelamatkan diri.

Foto massa yang penuh ketegangan dan kecemasan yang dibuat si fotografer merupakan sebuah hasil rekayasa dibanding ketegangan dan kecemasan yang ada sebelum bunyi ledakan petasan. Meski suasana yang diambil adalah suasana yang asli, namun dari sisi jurnalisme fotografi jelas bahwa si fotografer telah melanggar etika. Ia telah merekayasa suasana sedemikian rupa untuk mendapatkan gambar-gambar dramatik. Rasa tegang dan cemas memang betul-betul ada, tapi yang dipotret oleh si fotografer adalah ketegangan dan kecemasan yang dihasilkan melalui sebuah perekayasaan.

Kita masih ingat bagaimana pembaca media massa pada Oktober 1965 disuguhi gambar-gambar penggalian jenazah para jenderal dari sumur Lubang Buaya. Selain gambar Pak Harto dengan seragam loreng, kacamata hitam, dan posisi berkacak pinggang, media menampilkan foto korban jenazah. Tak ada yang salah dengan ini. Namun, kalau diteliti lebih lanjut, kita akan menemukan bagaimana keterangan foto pada gambar-gambar itu (terutama Harian *Angkatan Bersenjata*, *Berita Yudha* dan *Api Pancasila*) telah membuat masyarakat membayangkan sebuah fitnah dan kekejian yang luar biasa. *Caption* yang menyertai foto-foto yang sesungguhnya berdasar fakta itulah yang kemudian menyulut aksi balas dendam dan tutup mata masyarakat terhadap penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan lebih dari satu juta orang yang barangkali sama sekali tak memiliki hubungan langsung adegan dalam foto-foto tersebut.

Jadi kini menjadi lebih jelas bahwa penggunaan gambar untuk tujuan yang salah tentunya akan menimbulkan tanggapan atau kesan yang salah pula. Pengelola mediamassa dan para jurnalis harus sadar pada hal ini, kecuali memang mereka melakukannya untuk kepentingan propaganda tertentu.

Etika lain yang tak kalah pentingnya adalah pada dasarnya ketika memotret seseorang, seorang fotografer idealnya harus meminta ijin terlebih dulu. Bukan tak mungkin hasil jepretan seorang jurnalis yang kemudian terpampang di mediamassa akan mengundang kemarahan si orang yang menjadi obyeknya.

Misalnya saja, ada seorang pejabat yang dituduh melakukan korupsi buron ke luar negeri. Setelah pihak berwenang mengeluarkan pengumuman pencarian tokoh tersebut dan bekerja sama dengan interpol, si tokoh memilih untuk pulang ke Indonesia guna menyerahkan diri. Polisi yang menunggu di bandara menyambut kedatangan si tokoh dan langsung memborgolnya untuk kemudian diangkut guna menjalani proses pemeriksaan.

Wajah si tokoh yang kuyu dengan tangan terborgol tengah ditanting polisi hasil jepretan para wartawan segera menjadi *headline* mediamassa. Tentunya si tokoh dan keluarganya merasa malu dengan pemuatan foto secara besar-besaran itu, apalagi ada media yang membuat judul “Akhirnya Si Koruptor Itu Menyerah”. Namun, dalam perjalanan ternyata pihak pengadilan membebaskan si terdakwa kasus korupsi dari semua tuduhan. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh jurnalis dan mediamassa yang memuatnya? Meminta maaf? Rasanya belum pernah ada satu mediamassa pun yang meminta maaf dalam kasus beginian. Apalagi ada tendensi belum ada koruptor kelas kakap yang bisa dijerat oleh pengadilan.

Pilihan-pilihan ini menjadi dilematis. Foto yang menggambarkan sebuah fakta sebaiknya tidak diimbui dengan *caption* atau nuansa dalam pemberitaan. Mengada-adakan sebuah berita dan membingkai sebuah foto ke dalam pemberitaan yang insinuatif hanya akan menurunkan derajat sebuah foto sebagai rekaman fakta. Redaksi setiap media bertugas untuk memeriksa apakah foto-foto yang akan mereka muat memenuhi kriteria sebagai sebuah gambar yang bermutu, bernilai jurnalistik, dan tak melanggar batas-batas kesopanan yang telah menjadi pengertian umum. Ingat sebuah media, termasuk sebuah gambar/foto harus selalu memiliki sikap untuk tidak menghakimi (*neutral*) dan memperlakukan obyeknya sebagai sosok yang tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Memuat foto jenazah jenderal dengan *caption* “Inilah jenazah para Pahlawan Revolusi yang jadi korban kekejian PKI” itu sama dengan kesalahan memasang foto jenazah dalam keadaan hancur dengan *caption* “Inilah korban kekejian DOM”. Keduanya sama-sama beropini dan menjadikan medianya sebagai terompet propaganda.*

Etika Jurnalisme Foto (2)

Pertanyaan besar yang masih selalu menggantung dan mengundang perdebatan di kalangan fotografer adalah apakah untuk memotret seseorang kita terlebih dulu harus meminta ijin? Pertanyaan yang mirip mungkin bisa kita lontarkan yaitu apakah kalau seseorang ingin memotret kita, harus meminta ijin kita terlebih dahulu, atau ia boleh langsung dan secara bebas mengambil gambar-gambar kita? Kalau pertanyaan ini dilanjutkan, apakah kita tak marah kalau sedang berbicara intens dengan rekanan bisnis tiba-tiba dihujani kilatan lampu blitz tanpa tahu persoalan sebelumnya? Bagaimana kalau lantas foto-foto tersebut terpampang di sebuah tabloid dengan *caption* yang bernada perselingkuhan? Atau muncul sebagai gambar sebuah iklan komersial?

Dapatkah orang membiarkan seorang jurupotret memotret begitu saja gambar dirinya? Jawabannya barangkali terserah kepada orang yang bersangkutan. Mungkin ia malah senang dipotret. Namun, adakah hukum yang memberikan jaminan terhadap jurupotret untuk berbuat secara serampangan mengambil gambar orang lain?

Ketentuan dalam iklan jelas, kalau ada seorang jurupotret ingin membuat foto untuk kepentingan iklan, ia harus meminta ijin terlebih dulu pada obyeknya. Bahkan yang lebih sering, ia menggunakan seorang

aktor sebagai obyeknya, yang tentunya si aktor dibayar. Namun, untuk kepentingan pemberitaan hingga kini masih tetap berada di wilayah tak bertuan. Secara umum masyarakat hanya berpegangan pada prinsip bahwa sejauh seseorang terlibat dalam suatu berita besar, maka ia tak memiliki hak untuk menolak diambil potretnya. Namun untuk hal-hal yang sepertinya tak ada maksud tujuan dan tanpa terlibat dalam suatu pemberitaan penting, misalnya orang yang jogging atau ke pasar, bila datang seorang jurupotret dan meminta izin untuk memotret sebaiknya jangan diijinkan.

Ada peristiwa yang menarik. Almarhum Jenderal Benny Murdani yang menghadiri peluncuran bukunya disebuah hotel tampak sedang gelisah menanti kedatangan putrinya. Beberapa kali ia melihat arlojinya sambil berjalan ke sana kemari. Ia gelisah karena acara akan segera dimulai tapi putrinya belum kunjung tampak batang hidungnya. Sejumlah fotografer yang melihat hal ini ingin menggunakan kesempatan untuk mengambil gambar Benny. Sambil bergerak mendekat, sejumlah fotografer mengarahkan kamera mereka.

Apa yang terjadi? Benny Murdani marah, dan berteriak dengan suara meledak, “Mau apa kalian? Sana, nggak usah potret saya!” Kontan kerumunan fotografer lari berhamburan dan mengurungkan niat mereka. Mereka sangat ketakutan dengan teriakan guntur Benny Murdani yang saat itu ekspresi mukanya mirip seekor bulldog.

Tak lama kemudian Ria Murdani datang. Benny segera menggigit tangan anak kesayangannya tersebut dan duduk di meja terdepan. Wajah Benny sesekali tampak tersenyum, meski secara garis besar tetap tak berubah dan menyeramkan. Seorang jurnalis yang datang terlambat mengeluarkan kamera pocket dari saku celana dan maju hingga 2 meter di depan Benny Murdani yang sedang menghisap rokok. Ia meminta izin, “Pak, mohon izin untuk mengambil gambar Bapak!”

Apa yang terjadi? Pada jepretan pertama Benny tak beraksi apa-apa. Tapi begitu si wartawan maju-mundur dengan jepretan kamera yang bertubi-tubi, Benny berdiri dan mengambil posisi pemain bola akan menendang bola bundar. “Sana, pergi! Jangan dekat-dekat saya lagi!” teriak Benny. Sontak si jurnalis lari sipat kuping. Rupanya Benny Murdani hari itu memang tak mau dirinya diganggu jurnalis. Belakangan saya dengar ia sama sekali tak mempercayai kemampuan kerja wartawan Indonesia, gara-

gara pernah kecewa dan dongkol kepada “Bung” Harmoko yang notabene sebelum jadi menteri adalah bos wartawan Indonesia.

Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan persetujuan terhadap sikap seperti itu. Secara umum ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk tidak disalahgunakan atau diganggu oleh pers. Artinya, bila seseorang tidak ingin dipotret, maka tentu ia tidak boleh dipotret.

Tentu saja pendapat ini akan sulit diterapkan di Indonesia. Bisa kita bayangkan, para fotografer harus disibukkan menanyai dan meminta izin dari setiap orang yang jadi obyek jepretan. Bisa-bisa momen yang akan diabadikan telah hilang dan berlalu. Oleh karena itu ada semacam ketentuan umum bahwa bila seseorang berada di tempat umum maka orang tersebut bisa menjadi obyek atau sasaran yang empuk bagi setiap jurupotret tanpa berdaya apapun untuk menolaknya. Misalnya ada tokoh yang sedang menonton bola di sebuah lapangan. Jangan heran bila kemudian terpampang sebuah foto besar si tokoh yang sedang berciuman dengan pacarnya pada saat menonton bola. Pertanyaan yang muncul bagaimana kalau bukan di lapangan bola, tapi di sebuah lobby hotel. Apakah hotel bisa digolongkan sebagai tempat umum atau bukan?

Jelas ada etika dalam fotografi bahwa tidak boleh melakukan penyerobotan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Bila hal ini dilanggar si fotografer akan menghadapi persoalan yang amat serius.

Di beberapa negara dikodifikasikan sebuah hukum bahwa tempat tinggal pribadi atau yang dinyatakan sebagai tempat tinggal pribadi, baik yang bersifat sementara maupun untuk jangka waktu lama tidak boleh diserobot siapapun, termasuk jurnalis. Demikian juga halnya bila seseorang berkunjung ke suatu tempat, selama ia berada di tempat tinggal pribadi, seumpama sebuah kamar hotel, tak boleh diserobot begitu saja oleh fotografer untuk diambil gambarnya. Bila ada jurupotret yang memaksa, maka yang bersangkutan dapat menuntutnya atas dasar bahwa tempat itu merupakan tempat tinggal pribadinya.

Contoh lain tentang sebuah penyerobotan hak pribadi adalah memotret sesuatu yang terlampau menyinggung perasaan keluarga atau seseorang. Misalnya, seorang ibu yang menghadapi kesulitan karena anaknya terbunuh. Tentunya, dalam keadaan yang tidak menentu, rambut awut-

awutan, muka basah oleh airmata sambil memangku mayat sang anak. Ibu tersebut menjerit melolong-lolong. Fotografer berdatangan dan memotret wajah ekspersi memilukan si ibu. Sang ibu sebagai obyek foto, mungkin tak pernah menghendaki wajahnya dipotret seperti itu.

Dari sisi etika, memotret orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan semacam itu jelas merupakan sebuah penyerobotan hak pribadi, karena orang yang dipotret itu berada dalam keadaan yang amat pribadi.

Secara teknis kini telah tersedia peralatan yang bisa digunakan seorang fotografer untuk merekam berbagai obyek sekehendak hati tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ada kamera yang dapat digunakan untuk memotret segenap penjuru kamar hanya melalui lubang kunci atau lubang ventilasi kamar, bahkan dalam keadaan gelap sekalipun. Dengan lensa tele seorang jurupotret bisa naik ke gunung dan memotret suatu lembah dimana sekelompok masyarakat tinggal tanpa sepengetahuan masyarakat. Bahkan dengan lensa teleskopis, ia bisa naik pesawat terbang dan memotret dari udara.

Dengan demikian seorang wartawan potret kini, berkat kemajuan teknologi, dapat memperoleh gambar sekehendak hati. Bisa jadi hak pribadi dilihat dari sisi teknis mungkin tidak memiliki arti lagi, karena setiap individu sudah sulit untuk mempertahankan hak pribadi tersebut. Kalaupun negara memberlakukan perlindungan hukum atas hak pribadi, bukan tak mungkin itu hanya terbatas pada norma-norma kebudayaan secara umum.

Di sinilah kita perlu segera menegaskan kembali aturan dan etika yang akan kita anut bersama, sebab meski secara hukum pribadi itu dianggap “meliputi berbagai segi yang mencakup hal-hal yang dianggap amat pribadi” namun pada kenyataannya dalam pers berlaku hukum “bila seseorang dianggap orang paling penting berarti orang itu tak memiliki hak-hak pribadi” (*the more prominent you are, the less privacy you have*).*

Etika Jurnalisme Foto (3)

Masalah etika fotografi lain yang perlu diangkat adalah persoalan momen pengambilan gambar. Tak terlalu banyak orang yang mencermati persoalan ini. Padahal bisa jadi hasil jepretan seorang fotografer bisa mengundang gugatan hukum bila ia tak memahami konteks sebuah peristiwa dan momentum pengambilan gambar yang tepat.

Bila seorang jurupotret bertugas memotret pemenang kejuaraan, maka momen yang akan diambil adalah momen yang tepat untuk menggambarkan orang tersebut mencapai kemenangannya. Misalnya untuk sebuah kejuaraan tinju, maka jurupotret akan mengambil gambar tepat pada saat si juara tengah melakukan *killing punch* yang menganvaskan lawannya. Untuk pelari atletik 100 meter gambar yang akan diambil pasti saat pundak atau dada sang juara menyentuh garis finis.

Namun untuk cabang bulu tangkis biasanya ada 3 pilihan, yaitu saat sang pemenang sedang melompat kegembiraan sambil mungkin melemparkan raketnya ke atas, sedang memegang piala/trophy, atau ketika upacara pengerekan bendera di mana si atlet umumnya mengambil sikap tegak dengan mata meneteskan air mata. Gambar semacam ini biasa dinamakan sebagai *the exact instant* atau *the golden moment*, atau detik yang tepat di bidang pemotretan.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pemotretan seorang fotografer selalu menghadapi keadaan yang mendesak. Untuk mengambil gambar yang tepat seorang fotografer tidaklah bisa melakukannya dengan mudah, selain pasti akan memakan waktu untuk memperoleh momen yang bagus juga mungkin harus membuang sejumlah *frame* (bisa film atau *memory*) dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain, seorang fotografer tidak bisa memotret dengan segala ketenangannya, tapi ia harus selalu melakukan tugasnya dengan amat terburu-buru. Nah, unsur keterburuan ini yang menimbulkan problem dan mungkin juga banyak kelemahan.

Sebagai contoh, misalnya, di sebuah hotel terjadi pemogokan buruh. Pemogokan yang diikuti oleh mayoritas karyawan hotel itu telah berlangsung selama 30 hari dengan tenang dan tenteram. Pokoknya betul-betul sebuah *peacefull demonstration*. Namun, pada hari ke-30, sore hari, terjadi pemukulan orang di tempat tersebut sehingga mengakibatkan terjadi keributan yang berlangsung selama 20 menit. Keributan itu tidak jelas, namun karyawan yang lelah akibat pemogokan yang telah memakan waktu cukup lama ikut menjadi marah. Pada saat yang tepat ketika keributan tersebut tengah berlangsung muncul seorang fotografer untuk mengambil gambar tentang kekacauan yang sedang terjadi. Untuk tak menimbulkan kesan yang buruk, pimpinan karyawan yang juga jadi komandan aksi pemogokan menjelaskan bahwa mereka telah melakukan pemogokan selama 30 hari dengan amat tertib dan tenteram.

Namun dengan termuatnya potret yang menggambarkan adanya keributan tersebut, walau dijelaskan bahwa keributan hanya berlangsung selama 20 menit saja, para pembaca dan masyarakat tetap akan berpendapat bahwa di tempat tersebut terjadi keributan sehubungan dengan aksi pemogokan karyawan hotel.

Mungkin seorang fotografer selama berjam-jam menjepretkan kameranya untuk mengambil puluhan bahkan ratusan gambar, tapi redaktur foto hanya memilih sebuah gambar yang dianggap terbaik untuk melengkapi berita yang diturunkan. Bagaimana kalau ada orang, yang kebetulan menjadi obyek foto tersebut, merasa tak suka dan mengugat media yang memuat gambarnya?

Kita tahu, di jaman Orde Baru, Presiden Soeharto kalau membacakan pidato kenegaraan bisa berjam-jam dengan isi dan intonasi membaca yang

menjemukan. Banyak anggota MPR/DPR yang pada awalnya segar-bugar jadi mengantuk, duduk mereka pada akhirnya merosot, kepala menyandar di kursi dan tanpa sengaja beberapa kali tertidur. Selama berjam-jam mereka berupaya tetap segar dan menyimak pidato pak Harto, namun tak bisa dicegah bahwa dalam beberapa menit dalam situasi membosankan itu mereka tertidur.

Namun, coba apa yang terjadi dengan pemberitaan media pada keesokan harinya? Foto anggota MPR/DPR yang tertidur jadi *headline* besar dengan judul “anggota DPR Bisanya Cuma 5 D” (kepanjangan dari datang, daftar, duduk, diam, duit). Layakkah anggota DPR yang merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya akibat fotonya yang termuat di media itu mengajukan gugatan hukum?

Terus terang, hal beginian belum banyak dipikirkan oleh kalangan jurupotret kita, termasuk kalangan media. Selama ini para redaktur foto masih menggunakan instink untuk membuat foto berdasar pertimbangan karya foto baik secara kualitas, *angle* maupun memiliki nilai *news*.

Saya punya seorang teman fotografer. Ia ditugaskan oleh kantornya untuk mengambil gambar Menristek B.J. Habibie di sebuah konferensi pers yang digelar oleh ICMI di sebuah hotel pada 1993. Sebagai fotografer dengan jam terbang lumayan tinggi, ia segera meluncur ke lokasi dengan membawa sejumlah lensa dan tripod. Rupanya sekitar 2 rol film ia habiskan untuk mengabadikan momen-momen menarik dari setiap wajah Habibie yang memang ekspresif, yang saat itu menjadi Ketua Umum ICMI. Saat pulang ke kantor, ia langsung masuk ke kamar gelap dan membuat *contact print*. Lembaran dengan foto-foto kecil itu segera di bawa ke ruang redaktur pelaksana (redpel) dan didiskusikan.

Di antara foto-foto itu, menurut saya, ada yang menarik dan masuk dalam kriteria sebagai *the golden moment*, yaitu foto di mana Habibie tengah membelalakkan mata dengan lidah dijulurkan sangat panjang dan kedua tangan berada di balik kedua daun telinganya. Di samping Habibie tampak pimpinan majelis pertimbangan ICMI, Kyai H. Ali Yafie tengah ngakak lebar sambil mengangkat mukanya. Kepada redpel saya rekomendasikan untuk memasang foto *the golden moment* itu guna mendukung rubrik nasional media kami. Namun, redpel memilih untuk mengonsultasikannya kepada pemimpin redaksi. Akhirnya diputuskan foto

biasa, yang juga banyak di muat media lain, yang dimuat. Media tempat kami bekerja takut apabila memuat foto tersebut bisa-bisa dituntut oleh ICMI dan dianggap menghina Habibie.

Fotografer teman saya tentu saja kecewa berat. Berjam-jam waktu telah ia habiskan untuk mendapatkan *the golden moment* yang seumur hidup belum tentu bisa didapatkannya lagi itu ternyata tak mendapatkan penghargaan yang layak secara jurnalistik. Lembaran fotonya hanya dicetak dalam ukuran 20 R lantas disimpan di laci pusat dokumentasi. Namun ia tak habis putus asa, saat ada rencana pameran foto yang digelar PWI Jaya, ia mencetak foto tersebut besar-besar, memiguranya, dan mengikutsertakan sebagai bahan pameran.

Apa yang terjadi? Mensesneg Moerdiono yang bertugas membuka pameran saat berjalan memasuki ruangan, dari kejauhan menuding foto teman saya sambil tertawa terngakak-ngakak dan memegang perutnya. Semua orang yang melihat, termasuk sejumlah pejabat yang ikut acara pembukaan, ikut tertawa. Semua orang memuji hasil jepreten teman saya. Yang aneh, tak ada seorang pejabat pun (*itu di jaman Orde Baru lho*) yang tersinggung. Staf Pak Moer bahkan minta untuk dicetak foto tersebut, konon untuk diberikan kepada Pak Habibie.

Nah, kasus yang terakhir saya ceritakan ini menunjukkan bahwa media telah memikirkan konsekuensi hukum secara berlebihan. Pimpinan media rupanya hidup dalam berbagai fenomena paranoia. Mungkin karena mereka berada satu grup dengan media besar yang berpengaruh secara nasional. Namun, ternyata masyarakat dan pejabat negara justru terhibur dengan sebuah karya foto jurnalistik.

Bukan tak mungkin dalam banyak kasus lain, yang bisa terjadi justru sebaliknya. Ketakutan pimpinan media justru yang menjadi sebuah kenyataan.*

Acehkita Pasca Tsunami

Ombak laut setinggi pohon kelapa yang datang bergulung-gulung pasca gempa 8,7 skala richter itu meluluh-lantakkan apapun yang ada di depannya. Semua bangunan, manusia, ternak digulung tanpa kompromi bersamaan dengan gulungan timbunan kayu, beton, atap seng, mobil dan lumpur. Puluhan ribu lelaki, perempuan, tua, muda, balita tanpa mengenal diskriminasi ideologi, asal-usul, kebangsaan, agama, suku, maupun kelas menjadi korban.

Dari data yang terkumpul hingga 17 Maret 2005 gelombang tsunami tercatat telah menelan korban manusia sebanyak 168.183 jiwa dan menimbulkan luka-luka pada 124.057. Bukan hanya menghancurkan kawasan Aceh dan Nias, tapi amuk tsunami juga menjangkau Malaysia, Thailand, Myanmar, Srilangka, India, Bangladesh hingga Maladewa dan sejumlah negara di kawasan Afrika Timur seperti Kenya, Seychelles, Somalia, Tanzania serta Madagaskar. Bencana terbesar selama 40 tahun terakhir ini memang luar biasa.

Tak heran bila seluruh dunia menaruh perhatian pada negara-negara yang jadi korban. Para pejabat tinggi berbagai dunia, termasuk Sekjen PBB, memerlukan diri untuk datang dan meninjau keadaan di lokasi. Di Indonesia kita bisa melihat bagaimana masyarakat di setiap perempatan

jalan, pertokoan hingga RT, RW, perusahaan dan tentu saja media massa mengumpulkan berbagai sumbangan untuk korban bencana tersebut. Betul-betul mengharukan.

Bagaimana *Acehkita*? Memeriksa pemberitaan yang diturunkan *Acehkita*, tampaknya media ini termasuk media yang cepat tanggap dalam menurunkan pemberitaan mengenai bencana yang meluluhlantakkan Aceh. Di tengah terputusnya semua jalur komunikasi, tak tersedianya bahan bakar, tak adanya listrik dan suasana kiamat, wartawan *Acehkita* mencoba terus melaporkan perkembangan situasi secara langsung dari lokasi. Bahkan media ini termasuk yang pertama kali mengirimkan wartawan dari Jakarta untuk masuk ke lokasi, membantu para koresponden yang sedang dirundung kesusahan.

Saya merasa perlu angkat topi dengan tekad dan unjuk kerja para wartawan di lokasi bencana yang sepertinya tak kalah dengan kerja para relawan, padahal saya tahu ada banyak teman-teman wartawan –termasuk wartawan media ini—yang kehilangan sanak-saudara dan juga peralatan kerja.

Saya bertanya pada sebagian teman-teman wartawan *Acehkita*, apa sih yang Anda perjuangkan? Kenapa Anda tak mengurus diri sendiri dan keluarga terlebih dulu? Bukankah bila kita memeriksa surat pembaca yang masuk ada banyak pembaca yang meragukan orisinalitas tulisan kalian? Bukankah kalian dituduh jadi antek GAM? Jawaban yang saya dapatkan sungguh luar biasa. “Biarlah kami dituduh macam-macam, Bang. Yang penting kami terus bekerja menyodorkan fakta-fakta dan kebenaran di balik kesusahan yang sedang kami hadapi. Itu memang jadi tugas kami,” jawab seorang wartawan.

Ya, saya setuju dengan sikap teman saya tersebut. Tugas utama wartawan dan media adalah menyampaikan kebenaran, tak lebih tak kurang. Untuk siapa? Jawabnya adalah untuk masyarakat. Kerja wartawan pada prinsipnya adalah serangkaian pembuktian akan loyalitas pada warga. Dalam kasus penanganan korban pasca tsunami kita bisa melihat bagaimana lemahnya koordinasi kerja aparat pemerintah. Dalam banyak hal reaksi spontan dan solidaritas masyarakat serta dunia internasional menunjukkan prestasi yang jauh lebih baik.

Berita merupakan bahan yang digunakan untuk mempelajari dan

berpikir tentang dunia di luar diri kita, karena itu kualitas terpenting dari sebuah berita adalah bisa digunakan dan diandalkan. Berapa korban yang jatuh? Apakah gempa akan menjalar di sepanjang pulau-pulau yang dekat dengan sesar Samudra Hindia? Apakah gempa yang berpusat di dekat Meulaboh itu baru sebuah awalan?

Bagi wartawan, obyektivitas merupakan sebuah iktiar. Adalah muskil mengharapkan obyektivitas sebuah berita, namun setiap wartawan berkewajiban untuk terus mengejar akurasi, kejujuran dan kebenaran. Ibarat sebuah kutukan, setiap wartawan akan selalu mengejar tiga hal tersebut secara terus-menerus sepanjang hidupnya.

Jatuhnya korban tsunami yang begitu banyak di kawasan Aceh dan gencarnya liputan pers seharusnya mampu menunjukkan lemahnya kita dalam manajemen bencana. Kita sama-sama tak tahu harus bertindak apa pada saat korban justru sedang berjatuh. Koordinasi pemerintah dalam penanganan korban tsunami begitu buruknya hingga 1 bulan setelah peristiwa tersebut relawan masih harus mengevakuasi jenazah yang berserakan di sejumlah tempat. Posko-posko yang didirikan pihak swasta jauh dipercaya ketimbang posko yang didirikan pemerintah.

Solidaritas internasional yang melibatkan operasi *civic mission* tentara (*another military operation than war*) dari sejumlah negara justru memunculkan semacam perasaan anti-asing (*xenophobia*). Apalagi ada kalangan yang menggelorakan semacam perasaan patriotisme dan chauvinisme akan kemampuan bangsa sendiri untuk menangani bencana, seperti halnya yang ditunjukkan pimpinan di Thailand dan India. Sementara tim ekonomi hanya bisa berharap negara-negara donor memberikan *rescheduling* bagi pembayaran utang-utang Indonesia pada mereka. Di Jakarta, penanganan bencana Aceh dan Sumatera tak lain merupakan sebuah tarik ulur pengaruh politik.

Masa haru-biru terhadap korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera barangkali telah lewat, bahkan pemerintah kini telah menetapkan bahwa penanganan Aceh telah memasuki fase rehabilitasi. Sebuah fase penting yang akan jadi ujian sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan untuk bekerja secara mangkus (efisian) dan sangkil (efektif). Terutama dalam mengoordinasikan jajaran aparatnya dan menyalurkan semua bantuan hingga sampai kepada pihak yang betul-betul memerlukannya serta

mempertanggungjawabkannya sesuai prinsip *good governance*. Di masa lalu, Indonesia memiliki reputasi yang jelek, karena aparat selalu mengkorup bantuan yang diberikan masyarakat maupun dunia internasional.

Di tengah situasi seperti itu, *Acehkita* kita harus bisa menurunkan berita atau tulisan yang berdasarkan fakta. Dalam mempraktekkan jurnalisme, *Acehkita* tak perlu takut dituduh sebagai partisan, anti-NKRI, dan sebagainya. Justru sebagai komunitas yang mencintai negara-bangsa Indonesia, para wartawan *Acehkita* harus mampu menjalankan fungsi sebagai nyamuk pers (yang menggigit), anjing pengawas (yang menyalak) dan inspektur (yang tukang mengkritik). Akan aneh bila *Acehkita* lebih menulis soal respon pemerintah Republik Maladewa dalam menangani rakyatnya pasca tsunami. Yang patut mengerjakan hal itu adalah para wartawan Maladewa.

Memeriksa kembali surat pembaca yang belakangan masuk, saya mendapat kesimpulan bahwa bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2005 lalu telah memunculkan gelombang pembaca baru *Acehkita*. Banyak di antara pembaca yang mempertanyakan sikap dan ideologi media ini. Mereka menilai di media ini tak bisa dijumpai hal yang positif menyangkut TNI.

Rupanya ada banyak pembaca belum paham apa tugas pers sebenarnya. Pers bertugas memberitakan fakta-fakta secara obyektif. Tugas pers bukan untuk sekadar menyenangkan orang atau sekelompok orang. Tugas pers adalah mengingatkan orang, melalui berita-berita yang dibuat, agar orang tak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya.

Demikian juga *Acehkita* harus bisa memberitakan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Jangan sampai peristiwa seperti lepasnya Timor Timur terulang lagi.

Saat itu semua media tak punya kemampuan memberitakan apa yang terjadi di wilayah yang di jaman Orde Baru pernah menjadi propinsi ke-27 Indonesia. Semua media justru memberitakan bahwa apa yang terjadi di wilayah itu sejak 1976 adalah hal biasa-biasa saja. Berita yang muncul melulu berita keberhasilan pembangunan, sampai semua orang merasa terkesima saat Indonesia kalah dalam jajak pendapat. Rupanya rakyat Timtim selama ini merasa terjajah. Dan ada banyak orang lebih terkejut lagi tatkala sejumlah jenderal (polisi maupun TNI) dan pejabat Indonesia

dituduh melakukan pelanggaran HAM.

Jangan menafsirkan pemberitaan negatif dan eksekusi di Aceh sebagaimana pemberitaan dalam *Acehkita* sebagai sebuah upaya untuk mendiskreditkan pemerintah RI atau TNI, justru jadikan hal itu sebagai lecutan untuk memperbaiki diri. Kita perlu mengingat kembali bahwa kasus korupsi telah menjadi pemberitaan pers sejak tahun 70-an awal, tapi masyarakat dan pemerintah tak bertindak secara signifikan. Kini salah satu tekad pemerintahan SBY adalah memberantas korupsi.*

MENDIDIK ANAK ACEH PASCATSUNAMI

MAJALAH

informasi yang lebih jujur

acehkita

www.acehkita.com



Habis Perang Terbitlah Damai?



EDISI 014/TAHUN II/MARET 2005

Ketidakbiasaan

Sudah lebih dari 35 hari mediamassa di Indonesia mengekspos tsunami yang meluluh-lantakkan kota-kota di utara Aceh dan sejumlah kepulauan kecil di kawasan Sumatera Utara. Bila pada hari-hari awal lebih bercerita tentang bencana, kemudian ceita berganti tentang para pengungsi dan tanggap darurat domestik maupun internasional. Memasuki 35 hari ini cerita tentang bencana Aceh mulai redup. Di kawasan Glodog, penjual DVD bajakan mulai menjual cakram bajakan tentang bencana Tsunami 26 Desember 2004 lalu itu. Sepertinya orang (juga wartawan) mulai bosan dengan berita tentang Aceh. Apalagi masalah banjir air dan ancaman penyakit juga melanda penduduk di banyak tempat di Jawa.

Berita kini mulai beralih ke seputar korupsi bantuan oleh posko yang didirikan artis, babak belurnya seorang aktivis LSM gara-gara dituduh mencuri bantuan untuk korban bencana di Aceh, soal rencana pembuatan cetak biru pembangunan tempat-tempat baru yang akan dilakukan sebuah kelompok usaha yang memiliki hubungan dekat dengan aparat keamanan, dan lain-lain.

Saya bertanya-tanya apa yang dilakukan para wartawan di Aceh? Apakah mereka masih saja suka berkumpul di Banda Aceh dan meminta konfirmasi pejabat mengenai penanganan korban tsunami di banyak tempat

yang kelihatan tersendat-sendat tanpa ada kepastian? Apakah mereka tidak bosan dengan jawaban yang diberikan bahwa “keadaan sudah membaik, kami sedang terus berusaha dan bekerja agar keadaan segera betul-betul pulih”?

Ya, saya merasa perlu bertanya hal ini, karena saya tak menemukan berita yang lebih cerdas tentang apa yang terjadi di Aceh sana. Khususnya setelah bantuan yang jumlahnya berjibun diberikan secara spontan oleh rakyat Indonesia (didorong oleh tayangan dramatis televisi) dan dunia internasional. Media saat ini lebih banyak menampilkan laporan *feature* tentang kesedihan dan tragedi orang Aceh yang kehilangan sanak keluarganya. Ada yang pergi naik haji dan pulang hanya bisa memandangi puing-puing tempat tinggalnya. Seluruh keluarganya hilang dibawa banjir bandang tsunami.

Sampai kapan kita akan terus mendayu-dayu dan merasa perlu membaca berita-berita seperti itu? Saya rasa berita-berita seperti itu sudah cukup. Sudah saatnya kita melihat lebih jernih ada persoalan apa gerangan kok bantuan begitu lambat sampai ke orang yang membutuhkan, kenapa dalam situasi darurat ada semacam perasaan anti-asing yang dilemparkan oleh kelompok tertentu, bagaimana koordinasi aparat di lapangan, bagaimana nasib bantuan yang jumlahnya luar biasa banyaknya itu, benarkah ada yang dikorupsi, sejauh mana rencana tender rehabilitasi yang ada yang konon banyak melibatkan elit pengusaha dari Jakarta, bagaimana rencana detil pemerintah untuk memulihkan keadaan di Aceh, benarkah ada rencana memberlakukan kembali status darurat militer, siapa yang akan paling diuntungkan bila rencana ini direalisasikan dan lain-lain.

Pemburu berita di internet barangkali lebih beruntung. Mereka bisa menemukan berita alternatif yang berasal dari pengalaman sejumlah relawan dalam peta bumi Aceh pasca tsunami, sesuatu yang tak bisa dijumpai di media formal. Termasuk berita spekulasi tentang apa yang akan terjadi di Aceh dengan situasi tarik ulur yang ada seperti sekarang ini.

Ada banyak peristiwa penting di negeri ini terjadi dan dilupakan begitu saja. Mulai dari Peristiwa G30S hingga Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Ada banyak kejelasan dan ada banyak ketidakjelasan. Kejelasan umumnya hanya menyangkut kaum korban, dan ketidakjelasan menyangkut pada pelaku, motif, termasuk

konspirasi politik yang terjadi. Mediamassa pada umumnya hanya bisa mengungkap kejadian yang menyangkut 4 W (What, When, Where dan Who) saja, tapi tak pernah berhasil mengungkap 1 W (Why) dan 1 H (How) lainnya.

Kini semua perhatian memang masih terserap pada kemanusiaan pasca tsunami. Tapi sampai kapan? Bagaimana dengan masa depan Aceh? Bagaimana dengan rencana Pilkada yang bakal dilangsungkan pada Juni-Juli mendatang? Bagaimana dengan kemajuan pemerintahan baru yang dalam 100 hari menunjukkan rapor merah? Bagaimana dengan realisasi janji-janji Pemilu lalu? Terus terang, saya kuatir bencana tsunami menjadi penderitaan yang menguras rasa kemanusiaan kita sedemikian rupa hingga melupakan hal-hal mendasar yang perlu disorot pers. Bukan tak mungkin duka Aceh menjadi berkah bagi sekelompok orang.

Ada banyak informasi tentang bagaimana bantuan hanya diberikan kepada para pengungsi yang tinggal di barak-barak saja, padahal ada banyak anggota masyarakat yang bukan korban tsunami yang juga membutuhkan bantuan pangan. Pangan mereka telah habis dibagikan kepada masyarakat pengungsi pada hari-hari awal gelombang pengungsian. Ada banyak cerita horor dan sikap diskriminasi lainnya.

Saya kuatir kebiasaan pers untuk mengekspos (dan mendramatisir) cerita-cerita kemanusiaan semata, justru akan memperlemah proses percepatan pemulihan dan stabilisasi di Aceh. Dan pada saat itulah sejumlah kelompok elit akan menanggung keuntungan.

Barangkali kita memang perlu melawan lupa untuk mengubah ketidakjelasan menjadi kejelasan. Artinya, mediamassa perlu melawan ketidakbiasaan yang terlanjur menjadi kebiasaan.*

SPECIAL FOCUS: RECONSTRUCTION & EDUCATION

MAGAZINE

acehkita

www.acehkita.com

telling with heart

Conceptualising
Aceh's
Post-Tsunami Education



ISSN 1829-8427 RP 7.000



MARCH 2005

Menyoroti Suara Pembaca

Banyak kalangan tak menyadari nilai strategis arti penting keberadaan rubrik “Surat Pembaca” pada sebuah media. Orang yang tak paham posisi istimewa ini bahkan kerap kali bukan hanya mengabaikan, tapi tak membaca rubrik ini karena dianggap hanya berisi keluh-kesah masyarakat.

Dilihat dari letak halaman, jelas rubrik ini bukan sembarang rubrik. Di koran yang mapan, ia umumnya diletakkan pada halaman editorial (*editorial page*). Sedangkan di majalah yang terkemuka, rubrik ini malah selalu diletakkan di halaman pertama (*front page*). Kenapa? Karena rubrik ini selain memiliki nilai strategis “kebenaran” juga menyuarakan aspirasi masyarakat dalam arti sebenarnya. Tidak seperti halnya sebuah berita yang merupakan potret atas kejadian yang dirunut, dikejar, direkonstruksi, ditambah kutipan sejumlah narasumber, ditata, diedit, ditambah dan disajikan secara menarik; namun rubrik ini justru tampil paling alami mewakili realitas atas sebuah masyarakat.

Banyak media yang baru seumur jagung merekayasa rubrik Surat Pembaca dengan mewawancarai (tanya-jawab) sejumlah tokoh guna memancing munculnya surat pembaca yang sebenarnya. Kerap juga si wartawan media bersangkutan sendiri yang menulis sejumlah surat pembaca pada awal-awal penerbitan.

Ketika jaman demokrasi kelam di era Orde Baru ada seorang peneliti media asal Australia menyatakan bahwa semua pemberitaan di media penuh dengan eufemisme, penghalusan fakta, pengaburan peristiwa dan sebagainya yang bisa disimpulkan sebagai penuh dengan kebohongan. Menurutnya berita atau fakta yang sebenarnya dalam ruang media yang ada hanya bisa ditemukan pada ruangan “Surat Pembaca” dan “Pojok” saja. Keduanya itu merupakan ruangan yang jujur mewakili fakta dan aspirasi masyarakat.

Pernah Anda menulis surat pembaca? Barangkali orang yang tak tahu nilai strategis sebuah mediacetak tak pernah bisa membayangkannya. Perlu diketahui bahwa kalau kita menulis surat pembaca pada harian macam *Kompas*, tulisan kita secara hampir bersamaan pada saat yang sama akan dibaca sekitar 600.000 orang pembaca utama. Bila sebuah koran macam *Kompas* dibaca secara bersama-sama oleh sekitar 5-6 orang, maka surat kita dibaca paling tidak oleh 3.000.000 orang. Angka-angka fantastis ini hanya untuk menunjukkan bahwa ternyata Surat Pembaca mempunyai efektivitas komunikasi secara gratis yang sangat tinggi.

Makanya jangan heran bila Surat Pembaca kerap kali “selalu” berhasil mengundang sambutan atau tanggapan balik. Misalnya kecaman terhadap buruknya pelayanan swalayan dengan cepat akan mengundang munculnya permintaan maaf, permohonan informasi dengan cepat akan dibalas sejumlah daftar informasi yang dibutuhkan dari orang-orang yang secara persis dan *perfect* mengetahui informasi tersebut, kecaman terhadap kadaluwarsa atau rusaknya sebuah produk yang dibeli dengan cepat akan mengundang permintaan maaf dan penggantian penuh dari pihak produsen, kehilangan barang akan dijawab dengan pengembalian barang secara langsung. Dan seterusnya.

Ragam Surat Pembaca

Ada berbagai macam surat pembaca yang ditulis masyarakat dan dikirimkan ke mediamassa untuk dimuat. Namun secara umum topik dan isi Surat Pembaca yang biasanya dimuat oleh media massa bisa dibagi sebagai berikut:

Topik	Isi
Keluhan	Biasanya mengenai buruknya sarana layanan masyarakat, produk yang telah kadaluwarsa, tak bertanggungjawabnya penda dalam menangani sarana umum, tingginya kerawanan sebuah kawasan dsb.
Berita kehilangan	Bisa kendaraan, anak, anggota keluarga, barang berharga, kiriman paket dsb.
Gagasan	Menjernihkan sebuah polemik, melontarkan gagasan baru, menfokuskan sebuah perdebatan yang tak produktif dsb.
Ralat	Pembetulan atas sebuah kesalahan (penulisan/pengutipan sumber dsb).
Opini counter	Melawan pendapat <i>mainstream</i> masyarakat yang salah.
Kritik sosial/tokoh	Kritik atas perilaku asosial kelompok masyarakat yang mengganggu, kritik atas kemunafikan atau kepalsuan tokoh yang sedang dipuja-puji dsb.
Imbauan moral	Ajakan untuk kembali ke “jalan yang benar” pada para elit politik atau kelompok masyarakat yang dianggap menyeleweng dari jalur “kebenaran”, mengenang jasa dan kebesaran pejuang yang baru meninggal, berbagi pengalaman jadi korban penipuan atau kejahatan dsb.

Penemuan baru	Ditemukan benda bersejarah untuk diberikan pada yang berminat, penemuan jenis bahan kimia yang berguna untuk disebarluaskan dsb.
Cari informasi	Mencari bahan atau materi langka, mencari literatur kuno untuk penelitian, mencari lembaga yang tertarik pada koleksi buku langka dsb.
Cari kontak person/ lembaga	Upaya menemukan kenalan lama, keluarga, saksi kunci dsb.
Pengalaman (keajaiban) yang perlu disebarluaskan	Kesembuhan mendadak, penemuan aneh, kabar menggembirakan dsb.
Ucapan terima kasih	Komplain telah ditanggapi, barang hilang telah kembali, kompensasi atas kritik telah diterima, ungkapan atas unjuk solidaritas dsb.
Permintaan maaf	Biasanya lebih merupakan tanggapan/ reaksi balik atas kecaman sebuah “Surat Pembaca”.

Lantas apa tema-tema “Surat Pembaca” yang pantang dimuat mediamassa? Jelas, selain surat yang ditulis dengan model caci-maki, banyak mengucapkan kata-kata kotor yang melanggar batas kesopanan, agitasi politik, juga surat yang tak jelas juntrungannya. Faktor lain yang kerap diperhatikan oleh redaksi adalah apakah masalah yang ditulis itu merupakan masalah banyak orang atau lebih merupakan masalah pribadi. Sebab masalah pribadi seperti stres, keinginan konsultasi (misalnya karena penyimpangan perilaku seksual), keinginan bunuh diri dan bentuk duka-cita lainnya lebih tepat dimuat di dalam rubrik “konsultasi” (rubrik psikologi atau hukum yang banyak disediakan oleh mediamassa).

Bagaimana Suara Pembaca *Acehkita*?

Selama lebih 1 tahun setiap hari membaca “Suara Pembaca” di *www.acehkita.com* saya hampir tak menemukan sebuah tulisan/surat pembaca yang menarik dari sisi isu maupun dari kelayakan sebuah surat. Memang ada satu atau dua surat pembaca yang bagus, tapi bisa dikatakan hampir semuanya berisi agitasi politik, pernyataan, bahkan umpatan dan hujatan. Seolah-olah pembaca media ini terbelah menjadi dua, antara Republik Indonesia vs Republik GAM, atau antara Republik Aceh vs Republik Jawa. Terus terang saya bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pembaca *Acehkita*?

Sejumlah pembaca menghujat media kita ini sebagai anasionalis dan pembela Gerakan Aceh Merdeka (GAM), liputannya tidak berimbang, cerita dan kisah yang berasal dari kesaksian korban terlalu berpihak, hanya memuat sisi negatif TNI. Pembaca lainnya memberikan pujian karena berhasil menyajikan informasi langsung dari lapangan, menyajikan hal yang tak diberitakan media lain, berani tampil beda, dan seterusnya. Saya kira temuan saya tak beranjak jauh dengan apa yang pernah saya tulis di Obsm 5.

Artinya, sebagian besar pembaca media ini masih menganggap mereka perlu menyampaikan uneg-uneg dan agitasi politik melalui media ini. Bisa jadi hal ini dikarenakan kebebasan dan ruang diskursus untuk memperbincangkan kedua kepentingan yang saling bertolak belakang ini tak cukup di Republik ini. Barangkali itu pula sebabnya dua kelompok elit yang “bertempur” secara “ideologis” lebih memilih mengadakan pertemuan sejauh ribuan kilo meter dari Nusantara, tepatnya di Helsinki.

Saya kira sudah saatnya perdebatan dan diskusi di ruang “Suara Pembaca” yang tidak produktif di media ini diakhiri. Caranya adalah redaksi *Acehkita* harus bisa lebih memoderasi semua perbincangan yang terjadi. Hanya surat-surat yang menyangkut kepentingan publik yang bisa dimuat. Kalau pun ada surat pribadi yang bisa dimuat, surat tersebut harus bermuatan kemanusiaan seperti permintaan bantuan atau pertolongan. Redaksi harus segera menyusun kriteria layak pemuatan bagi pembaca yang ingin tulisannya dimuat di *Acehkita*. Dengan cara demikian, redaksi *Acehkita* telah ikut mendidik pembacanya untuk lebih santun, mengerti etika, mengetahui fungsi dan peran media dalam membangun *civil society*

yang kuat, yang menghormati nilai-nilai keadilan, demokrasi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.*

Etika dan Sikap Menulis

Jurnalis pada prinsipnya menolak sensor dan pembredelan. Jurnalis dan pengelola media massa juga tak mau dipanggil secara sembarangan oleh semua pihak, kecuali kejaksaan. Benar kah pers merasa dirinya selalu dan paling benar hingga tak mau tunduk pada lembaga mana pun? Tentunya tidak. Untuk itulah kode etik jurnalistik disusun. Bukan berarti tanpa kode etik, jurnalis tak bisa bekerja dan media massa tak terbit. Andaikan kode etik tak ada, jurnalis tetap akan bekerja dan pers tetap dicetak tanpa ada satu orang atau pihak pun yang bisa mencegahnya.

Jadi, jelas kode etik jurnalistik disusun oleh para jurnalis atas kemauan sendiri. Dan atas kemauan sendiri pula mereka menaatinya. Kode etik disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, berangasan dan mau menang sendiri. Karena pers itu berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan.

Ada kemungkinan kalau kode etik jurnalistik tak dibuat akan muncul ketegangan, tarik-menarik dan kemungkinan saling teror antara pers-penguasa dan masyarakat. Dengan demikian kode etik dibuat untuk mengatur hubungan yang sehat dan seimbang secara proporsional guna

memahami batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kode etik jurnalistik dibuat para jurnalis untuk menetapkan sikap mengenai ruang lingkup dan pagar-pagar kebebasan, menegaskan di batas-batas mana telah terjadi penyimpangan menyangkut pelanggaran terhadap kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan negara. Kode etik merupakan standar nilai yang mendorong para jurnalis agar bertindak (*does*) dan menghindari tindakan (*don't*). Jadi bukan semata-mata larangan.

Ada beberapa hal dasar yang harus dihormati oleh setiap jurnalis. Antara lain adalah:

pertama, jurnalis harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau pun elit kekuasaan. Untuk itulah jurnalis harus menyampaikan berita yang sejujur-jujurnya dan sebenarnya kepada masyarakat. Sebab masyarakat memang berhak mendapatkan informasi yang benar. Dalam hal ini dituntut kebiasaan jurnalis untuk selalu melakukan *check and recheck* setiap informasi. Setiap kesalahan harus segera diralat.

Jurnalis berkewajiban untuk menolak setiap campur tangan guna menghambat informasi ke masyarakat.

Seorang jurnalis tak dibenarkan mempunyai penilaian bias (prasangka) atas ras, etnik, bangsa, kelas sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat atau sakit jasmani, cacat atau sakit mental dan lain-lain.

Seorang jurnalis tak boleh menyembunyikan informasi yang berhubungan, apalagi berdampak, pada masyarakat luas. Ia juga harus memiliki independensi. Ia mesti kebal suap dan menolak setiap kompromi yang bisa mempengaruhi pemberitaan yang dibuatnya.

Kedua, selalu mengupayakan keseimbangan. Pada prinsipnya jurnalis harus membuka diri pada setiap pro-kontra pendapat. Seorang jurnalis tak dibenarkan untuk berdiri pada sebuah sisi kepentingan apa pun. Setiap kali melaporkan kasus, ia harus mengutip pendapat orang-orang yang kontra. Dalam dunia jurnalistik hal ini dikenal dengan istilah “meliput dari dua sisi” (*cover both side*) atau “keseimbangan peliputan” (*balance reporting*).

Dengan demikian jurnalis juga harus memberikan tempat bagi suara-suara kaum lemah (*underdog*), atau dengan kata lain jurnalis harus mampu menyuarakan kaum tak bersuara (*voicing the voiceless*). Tugas ini

lebih-lebih menjadi penting dalam sebuah negara totaliter di mana suara penguasa dan demagog menjelma jadi suara Tuhan dan suara rakyat sama sekali diabaikan.

Ketiga, hanya melaporkan fakta. Sudah jelas bahwa seorang tak bisa berandai-andai atau membuat liputan imajiner. Kerja seorang jurnalis bukan lah kerja seorang cerpenis atau novelis yang menciptakan masalah, menciptakan tokoh-tokohnya, lantas menciptakan konflik untuk kemudian diakhirinya sendiri. Seorang jurnalis hanya memotret dan menulis tentang fakta. Dengan demikian, kutipan narasumber hanya bisa diturunkan bila narasumbernya jelas (narasumber bisa disamakan). Tapi bukan berdasarkan gosip, desas-desus apalagi kabar bohong.

Keempat, mengutamakan kejujuran. Jurnalis dalam bekerja harus menjunjung tinggi kejujuran. Ia tak melakukan penjiplakan atas karya orang lain. Ia tak menfitnah. Ia juga tak memanipulasi sumber-sumber yang didapatnya. Baik melalui tekanan maupun sogokan.

Kelima, tak bekerja jorok. Jurnalis tak menyebarkan informasi, foto atau berita yang mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan eksploitasi seksual. Apalagi semata demi sensasi dan menggaet pembaca.

Keenam, punya aturan main. Jurnalis tak bekerja asal main hantam kromo, tapi menghargai hak orang lain (narasumber). Antara lain permintaan “*off the record*”, permohonan narasumber untuk tak dicantumkan namanya, permintaan embargo. Juga menghargai hak privasi orang. Dalam bekerja menghormati undang-undang dan hukum yang berlaku dan sebagainya. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi yang tengah terancam atau kemungkinan akan mengalami penderitaan bila pemberitaan atas dirinya muncul seperti identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

Di dalam kode etik juga diatur soal pemberian sanksi bagi para jurnalis yang melanggarnya. Biasanya para jurnalis mempercayakan proses peradilan dan pemberian sanksi pada semacam “dewan kehormatan” atau “dewan kode etik”. Hanya saja sayang, di Indonesia lembaga semacam ini belum bisa berjalan dengan baik. Antara lain karena perusahaan pengelola media memiliki pandangan yang berbeda. Di luar negeri, selain ada dewan kehormatan yang bertugas menilai “tampilan kerja” sebuah media juga ada *media watch* dan lembaga *pers ombudsman*.

Di luar kode etik ada juga beberapa ketentuan dalam KUHP yang membuat delik tentang pers misalnya delik pers tentang ketertiban umum, delik pers tentang hasutan, delik pers tentang kabar bohong, delik pers yang bersifat penghinaan dan delik pers tentang pornografi, delik pers tentang penghinaan lembaga peradilan (*contempt of court*). Namun bukan berarti jurnalis bisa diseret ke pengadilan dan dikorek keterangan secara seenaknya dengan alasan hukum, sebab pada diri seorang jurnalis inheren sebuah kekebalan yang disebut dengan hak “ingkar”.

Selain kode etik yang secara umum ditaati para jurnalis dan jadi pedoman kerja lazimnya setiap perusahaan pers juga punya aturan main yang mengakomodasi sejumlah hal yang tak termuat dalam kode etik. Misalnya soal “amplop”, “pemberian tiket gratis”, “perjamuan”, “servis” hingga soal “cenderamata”. Setiap perusahaan pers akan berbeda-beda kebijakannya. Tentu saja ini yang membuat sikap menulis jurnalis setiap media berbeda. Demikian pula kredibilitas media tempat seorang jurnalis bekerja.*

Plagiarisme

Plagiat adalah aib besar bagi dunia jurnalistik. Tindakan plagiat yang meniru atau menyontek tulisan atau berita wartawan lain adalah hal yang harus dihindari oleh setiap wartawan dan media. Sekali seorang wartawan atau media melakukan tindakan plagiat maka habislah kepercayaan pembaca atau pemirsa terhadap wartawan atau media tersebut. Kenapa? Karena wartawan atau media tersebut telah melakukan kebohongan terhadap pembaca atau pemirsanya.

Tindakan plagiat sendiri meliputi sebuah tindakan yang luas penafsirannya. Mulai dari pencurian kata, kalimat, ide, hingga penjiplakan sebuah tulisan secara keseluruhan. Tak ada definisi yang rigid mengenai hal ini. Namun dalam dunia karang-mengarang, seseorang bisa dianggap telah melakukan tindakan plagiat apabila sekitar 30 persen dari tulisannya memiliki kemiripan dengan tulisan lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Namun ada pula jenis tindakan plagiat yang hanya meniru potongan-potongan kutipan dari tulisan lain.

Dalam dunia jurnalistik, orisinalitas tulisan atau karya adalah hal utama. Karena itulah setiap wartawan dalam menulis akan menggunakan temuan fakta-faktanya sendiri. Bahan lain hanya sekadar merupakan alat *rechecking*. Dan kalau pun terpaksa menggunakan kutipan atau data

media lain, seorang wartawan punya kewajiban untuk menyebutkan sumbernya.

Dengan melakukan tindakan plagiat, seorang wartawan sesungguhnya telah mencoba mengatakan bahwa dalam ruang dan waktu yang sama dirinya hadir pada liputan yang dilakukan wartawan lain. Si wartawan plagiat mencoba bahwa pada saat yang bersamaan dengan wartawan yang meliput langsung di lokasi kejadian. Ia juga melakukan wawancara dengan narasumber yang sama dengan pertanyaan yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama pula. Semuanya serba sama.

Kita semua tahu kegunaan sebuah wawancara di lapangan bagi seorang wartawan antara lain adalah merupakan upaya untuk merekonstruksi sebuah fakta sosial dan mendapatkan sejumlah kutipan langsung. Karena pada dasarnya sebuah berita tak cukup hanya memuat fakta dan data-data saja. Melalui wawancara, seorang wartawan bisa menyusun sebuah kejadian yang tidak diketahuinya menjadi sebuah gambaran peristiwa yang utuh. Dan yang lebih penting adalah melalui sebuah wawancara seorang wartawan bisa membuktikan kepada pembaca atau pemirsanya bahwa ia berada di tempat kejadian. Nah, di sinilah letak kebohongan besar itu terjadi.

Seorang wartawan plagiat bukan saja menipu pembaca atau pemirsanya bahwa sebetulnya ia tak pernah berada di tempat kejadian dan tak pernah melakukan wawancara dengan si narasumber, tapi ia juga tak pernah mengeluarkan biaya sepeser pun dalam membuat liputannya.

Ia juga tak pernah menghabiskan waktunya untuk turun ke lokasi yang sangat sulit dicapai dan ia juga tak perlu menempuh segala risiko untuk datang ke Aceh yang masih merupakan wilayah operasi militer. Mungkin ia hanya tinggal onggang-onggang di ruangan ber-AC sambil membuka website. Selanjutnya tinggal mengolah berita yang dibacanya menjadi sebuah berita baru.

Jelas sebuah aksi plagiat merupakan kejahatan serius. Semua kode etik yang berlaku bagi kalangan wartawan menolak Plagiarisme. Misalnya, pada butir 15 Kode Etik AJI yang disusun pada 1998 dinyatakan bahwa “jurnalis tidak dibenarkan menjiplak”. Pasal 12 Kode Etik Jurnalistik PWI 1998 menyatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip jurnalistik tanpa menyebut sumbernya”. Butir 2

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menyatakan “wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi”.

Pekerjaan seorang wartawan pada dasarnya merupakan pekerjaan semi-intelektual, bukan pekerjaan seorang “tukang”. Ada kemungkinan sebuah peristiwa diliput oleh banyak wartawan, namun setiap wartawan tak akan membuat berita yang sama persis. Mereka akan menulis dengan gaya dan *angle* sendiri-sendiri. Hanya wartawan “Bodrex” saya yang terbiasa dengan solidaritas dalam mendapatkan berita sekaligus uang. Para wartawan jenis ini terbiasa membuat satu berita secara ramai-ramai untuk dimuat di media masing-masing (itupun kalau mereka memang memiliki media)”. Memang belakangan ada fenomena liputan seorang wartawan dari sebuah media digunakan sebagai berita oleh media lain yang segrup dengannya. Redaktur media lain yang memuatnya tinggal mengubah *lead* dan sebagian kata-kata dalam tubuh berita. Pekerjaan model begini sesungguhnya sarat dengan problem etika, terutama yang menyangkut hak cipta (*copyright*).

Redaksi *Acehkita* pada 25 Febuari lalu menurunkan tulisan berisi keluhan pengelola *Acehkita* terhadap maraknya praktek pencurian artikel dan foto-foto *Acehkita* (lihat DARI REDAKSI: “Marak, Pencurian Artikel dan Foto-foto Acehkita”, 2005-02-25 14:05:37). Media terbitan Bandung jelas-jelas bukan hanya melakukan tindakan plagiat, tapi juga telah membohongi pembacanya dengan memuat tulisan *feature* tentang pengalaman Yunizar, seorang penduduk Kecamatan Lhok Nga, Aceh Besar, saat gelombang pasang tsunami menggulung desanya. Cerita ini bukan saja “mirip” tapi jelas “sama persis” dengan tulisan *feature* di *Acehkita*. Bedanya, si tokoh dalam media terbitan Bandung itu bernama Yunizar, sedangkan di *Acehkita* bernama Imran. Yang hebat adalah kutipan dari si tokoh yang sama persis. Mungkinkah Yunizar dan Imran adalah saudara kembar? Atau jangan jangan mereka orang yang sama? Apakah mungkin ada 2 orang berbeda, kebetulan ditemui 2 wartawan dari media berlainan, di tempat yang berbeda (meski masih satu kawasan dan pada waktu kejadian yang persis sama) bisa memberikan pernyataan yang sama?

Lihat “Air Laut Sempat Surut dari Pinggir Pantai Sekira 1 Kilometer” yang dipublikasikan dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/22/cinta02.htm> tertanggal 22 Januari 2005 yang jelas-jelas memiliki kesamaan dengan tulisan berjudul “Kisah dari Lampuuk: Yang Selamat, Yang Bertahan” yang dimuat dalam <http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=berita&file=view&coid=2204> tertanggal 10 Januari 2005. Ada banyak kejanggalan dalam kesamaan *feature* ini. Bukan saja kemiripan peralinea tapi juga alur cerita, latar belakang, tempat kejadian, dan kutipan.

Sebagai ombudsman yang mewakili pembaca *Acehkita*, saya merasa perlu bertanya pada pimpinan harian *Pikiran Rakyat*: apa yang sesungguhnya terjadi dengan berita tersebut? Apakah benar ada Plagiarisme dalam hal ini? Seberapa jauh tindakan pimpinan media terkemuka di Bandung ini untuk mengembalikan kepercayaan pembacanya? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat tulisan dari pengelola *Acehkita* betul-betul serius, apalagi disinyalir memang ada serangkaian aksi pencurian dan penggunaan tulisan dan foto *Acehkita* tanpa melalui perijinan dan tata-krama yang lazim dalam dunia jurnalistik.

Bila yang terjadi adalah kealpaan pencantuman sumber, barangkali pimpinan *Pikiran Rakyat* perlu meminta maaf kepada *Acehkita*. Namun bila yang terjadi adalah aksi penjiplakan secara sengaja (sebagaimana kutipan “kata Yunizar kepada PR”), tak ada jalan lain kecuali sanksi paling berat yang perlu dijatuhkan kepada si penulis, yaitu pemecatan. Si penulis barangkali tak berbakat jadi wartawan yang harus mengutamakan kehormatan dan menjunjung tinggi kejujuran. Dari pada menghabiskan waktu mencoba menjadi wartawan, lebih baik segera mulai merintis karier sebagai profesional di bidang yang lain. “*Bung, Anda betul-betul tidak berbakat menekuni bidang jurnalistik!*”.*

Ambalat dan Jurnalisme Perang

Saya sungguh tak mengerti dengan model pemberitaan pers dan media elektronik Indonesia mengenai kasus Ambalat. Saya merasa pers dan media elektronik secara sengaja mengajak rakyat Indonesia, termasuk saya, untuk bukan hanya membenci orang dan negara Malaysia tapi juga menganjurkan agar kita semua mengangkat senjata dan berangkat menduduki negara tetangga itu. Luar biasa.

Sebagai orang yang terlibat mengajarkan nilai-nilai jurnalisme perdamaian sejak tahun 2000 dan telah berkeliling dari ujung barat ke ujung timur di negeri ini, saya betul-betul malu. Sekaligus sedih bukan main. Pers Indonesia yang mencoba keluar dari kubangan lumpur akibat selama 32 tahun Orde Baru lebih banyak mendukung kekuasaan, karena yang melawan dan mencoba bersikap independen mati dibredel, setelah 5 tahun melewati masa krisis ternyata masih begini-begini saja. Bukannya berupaya keluar, tapi malah mencoba menyeret masyarakat ikut masuk kubangan.

Saya mencoba kembali membuka-buka dokumentasi koran tahun 1960-an. Apa yang saya temukan, baik foto maupun teksnya, hampir sama dengan

apa yang disajikan media kita saat ini. Mulai dari apel siaga, pendaftaran dan latihan para sukarelawan, hingga pidato politik dan demonstrasi. Bedanya kalau dulu rakyat merasa terguhah, kini lebih banyak yang mencibir. Apalagi setelah sejumlah ormas pemuda yang kental dengan warna Orde Barunya, ikut memelopori gerakan ganyang Malaysia.

Berita tentang Ambalat pertama kali baru dimuat pers pada 3 Maret 2005. Sejak itu, berita Ambalat tak pernah absen dari halaman satu di hampir semua media. Apalagi ditambah pemuatan foto pesawat Nomad milik TNI AL yang terbang di atas Laut Sulawesi secara lebar-lebar. Bagaimana heroiknya mengangkat isu Ambalat sebagai masalah nasionalisme ini bisa dilihat dari tayangan sebuah stasiun TV yang memutar *filler* suasana persiapan perang dengan iringan lagu “Maju Tak Gentar” dan tulisan merah berbunyi “Pertahankan Ambalat”.

Saya tak tahu, apakah situasi betul-betul mengarah pada pecahnya perang, tapi media mencoba meyakinkan bahwa isu Ambalat betul-betul serius. Antara lain dengan memampang foto Presiden Yudhoyono yang tengah melihat batas cakrawala melalui teropong di anjungan KRI Karel S. Tubun di perairan Ambalat. Situasi kian dramatis ketika ada seorang walikota yang dekat dengan wilayah sengketa itu menyatakan siap untuk segera mengungsikan seluruh penduduk yang ada di wilayahnya. Media secara tidak langsung telah menciptakan kesungguhan dari ketidaksungguhan. Sebuah simulacra yang bertahun-tahun berhasil dibangun dengan rapi pada jaman Orde Baru.

Saya mencoba lagi untuk membuka-buka dokumentasi tentang pemberitaan pers Indonesia menjelang lepasnya Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Pemberitaan media saat itu sepertinya sengaja menggiring sentimen masyarakat Indonesia untuk membenci semua hal yang berbau Timtim dan pihak-pihak yang membela orang Timtim yang ingin merdeka. Mulai dari pemerintah Australia, pasukan Interfet, PBB hingga kelompok ornop HAM. Hampir semua media Indonesia saat itu melaporkan terjadinya kecurangan proses jajak pendapat, tapi anehnya tak ada yang meliput proses pergelaran pengadilan terhadap pelaku kecurangan. Malah ada kesan pihak Indonesia hanya mengada-ada dalam membuat laporan kecurangan, karena tak pernah ditindaklanjuti hingga ke pengadilan internasional. Di lain pihak, rekayasa pemberitaan dilakukan

dengan mencitrakan kelompok milisi bersenjata dukungan tentara Indonesia sebagai “pahlawan bangsa”, pahlawan Merah Putih.

Para wartawan Indonesia, dimotori wartawan LKBN *Antara* secara berlebihan menyebarkan berita, wawancara dan foto-foto yang semuanya menyudutkan pihak internasional yang ditunjuk PBB untuk menangani Timtim dan menghentikan aksi kekerasan yang direkayasa kelompok militer Indonesia. Dalam sejumlah pemberitaan yang dikutip berbagai media nasional, malah seorang wartawan *Antara* dengan sengaja menyebarkan cerita bohong tentang seorang anggota milisi yang tubuhnya disiram bensin lantas dibakar oleh pasukan Interfet di sebuah dermaga di Pantai Dili. Hampir semua media memberitakan “peristiwa” (baca: cerita) sadis tersebut. Satu-satunya media yang membantahnya adalah majalah *D&R* dengan mengutip sumber Danrem Wiradharma Kol. Tono Suratman yang menyatakan berita tersebut adalah bohong besar.

Ketika kasus Ambalat merebak, saya merasa masyarakat di sekitar saya diseret oleh pemberitaan pers Indonesia untuk membenci semua yang berbau Malaysia. Apalagi sebelumnya ada pra-kondisi pemberitaan tentang ditangkapinya para TKI yang tak memiliki ijin tinggal oleh aparat hukum Malaysia. Pada saat itu saya mencoba melakukan kontak dengan sejumlah teman yang ada di Malaysia. Kebanyakan dari mereka juga merasa keheranan dengan munculnya kasus Ambalat yang tak banyak mendapat tempat dalam pemberitaan pers di Malaysia. Mereka pada umumnya juga menyatakan ketidaksetujuannya atas sikap pemerintahnya.

Lantas apa yang salah? Terus terang saya tidak tahu, apa penyebab pers kita emosional seperti ini? Betulkah pimpinan media memiliki nasionalisme yang hebat, begitu hebatnya hingga membutuhkan akal sehat dan mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme yang selama ini banyak dianut masyarakat pers? Betulkan wajah pers Indonesia saat ini jauh lebih baik ketimbang pada jaman Orde Baru dulu? Ataukah pers adalah pers, secara umum dari dulu sampai sekarang tak ada yang berubah, lebih suka mengedepankan berita perang, kontroversi, mengutip pernyataan tokoh dan membeberkan tingkah laku para selebritis? Dan kini mengajak masyarakatnya untuk ikut berperang.

Saya teringat pada upaya sekelompok orang yang galau melihat bagaimana perang menjadi obyek liputan wartawan yang paling seksi.

Salah satu yang dibahas adalah liputan media pada saat Operasi Badai Gurun di mana Amerika Serikat menyerbu Irak pada 1991. Saat itu semua media menokohkan Amerika sebagai polisi dunia dan memojokkan Saddam sebagai “cecunguk”. Kelompok itu berupaya untuk melakukan *rethinking* atas nilai-nilai jurnalisme yang melihat konflik sebagai sebuah hal yang paling memiliki nilai berita. Upaya *me-review* model jurnalisme itu yang kemudian dipicu oleh serangkaian ceramah pakar perdamaian, Profesor Dr. Johan Galtung dalam sebuah kuliah sekolah musim panas di Taplow Court, Buckinghamshire, Inggris pada Agustus 1997 itu kemudian berhasil merumuskan antara lain pembedaan antara “ideologi” jurnalisme perang dan jurnalisme damai.

Membaca kembali rumusan-rumusan tentang jurnalisme baru tersebut dan mencocokkannya dengan pemberitaan pers Indonesia tentang Ambalat, kita akan menarik kesimpulan bahwa pers Indonesia telah mempraktekkan jurnalisme yang paling bodoh dan primitif: jurnalisme perang.*

Menggagas Jurnalisme Empati

Dunia jurnalisme sejak akhir 1999 telah memunculkan pendekatan jurnalisme baru yang disebut sebagai jurnalisme damai. Sebelumnya di kalangan pendukung lingkungan dan gerakan oposisi di Indonesia telah beredar semacam praktek jurnalisme advokasi yang tak lain adalah upaya menyuarakan kaum tak bersuara (*voicing the voiceless*) antara lain kelompok masyarakat adat, kaum perempuan, anak, usia lanjut serta kelompok minoritas lainnya yang termarginalisasi dalam proses pembangunan.

Perlu diketahui bahwa kelompok marjinal seperti kaum miskin yang mencapai angka 40 juta orang, ditambah para perempuan, orang tua, anak-anak, masyarakat terasing, kaum gay, waria dan lainnya selama ini tak mendapatkan tempat yang cukup dalam media kita. Media lebih banyak meliput para elit (politik, ekonomi maupun selebritis). Yang jadi pertanyaan, apakah pers lupa pada kenyataan bahwa kelompok mayoritas yang hanya diam tanpa kemampuan bersuara. Apakah kata-kata yang muncul dalam media hanyalah kata-kata hampa makna yang tak mampu

mendorong orang untuk bertindak?

Banyak pemikir media saat ini mengaris-bawahi perlunya mengembangkan model komunikasi empati. Khususnya ketika perubahan kehidupan (bernegara) tak lagi seirama dengan apa yang diharapkan (masyarakat). Mereka yakin bahwa perlu dikembangkan sebuah model jurnalisme empati di tengah memudarnya kemampuan berkomunikasi secara empati antar personal, kelompok, organisasi maupun antar budaya. Semua itu berperan dalam mengikis kemampuan komunikasi empati orang-orang yang selama ini melakukan komunikasi massa di ruang publik.

Kita bisa memeriksa kembali bagaimana para pasangan kandidat presiden dan wakil presiden dalam kampanye Pemilu 2004 lalu berlomba-lomba mempraktekkan komunikasi empati melalui iklan dan kampanye mereka. Namun setelah muncul presiden dan wapres yang baru justru yang berkembang adalah komunikasi anti-empati antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat. Hampir semua menteri juga dijangkiti “penyakit” komunikasi yang sama. Demikian pula jurubicara kepresidenan yang sebetulnya bisa menjembatani kesalahpahaman dengan menjelaskan duduk perkara sebuah persoalan, malah kerap menjadi biang kerok dari persoalan itu sendiri.

Apakah komunikasi empati itu? Kata “empati” (*empathy*) berasal dari kata “*einfuhlung*” yang pertama kali digunakan oleh seorang psikolog Jerman. Secara harafiah kata tersebut berarti “merasa terlibat”. Empati sendiri didefinisikan sebagai sikap dan kemampuan untuk melihat dunia dari sisi orang lain. Ibarat seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya, si dokter harus bisa melihat dunia dari kaca mata pasiennya.

Dalam jurnalisme empati, seorang wartawan harus bisa mengerti kemauan khalayak pembaca/pendengarnya. Pentingnya sikap empati dalam komunikasi dinyatakan oleh psikolog terkemuka, Carl Rogers, “kendala utama bagi komunikasi antar personal satu sama lain adalah kecenderungan alamiah kita untuk menghakimi, menilai, menyetujui atau membantah pernyataan orang lain atau pun pernyataan kelompok”. Dengan demikian kegagalan komunikasi lebih disebabkan karena kurangnya kemampuan mendengarkan dengan empati. Kunci untuk mendengarkan secara efektif yang merupakan kunci dari komunikasi yang efektif tak lain adalah empati.

Pada dasarnya seorang pembicara atau penulis yang baik adalah pendengar yang baik. Bicara, menulis dan mendengarkan adalah bagian esensial dari tindakan komunikasi yang membentuk kehidupan ini. Cinta, benci, rindu, pengertian dan salah pengertian terbangun lewat bicara, menulis dan mendengarkan.

Empati memungkinkan kita untuk memahami, secara emosional dan intelektual, apa yang sedang dialami orang lain. Empati tak akan terlalu bermakna jika kita tidak mampu mengkomunikasikan pemahaman empati ini kepada orang lain.

Dalam empati, kita sebetulnya tidak perlu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Kita ikut serta secara emosional dan intelektual dalam pengalaman orang lain. Dengan berempati kita membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Model komunikasi ini berlandaskan pada kesadaran untuk memahami perasaan, kepedulian dan perhatian terhadap komunikan atau siapapun, dengan segala latar belakang kehidupan dan budayanya, orang yang kita ajak bicara. Sikap dan pemahaman ini akan menumbuhkan pemahaman dan memperbaiki komunikasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini kemampuan jurnalisisme yang mengedepankan empati ini tampaknya kian dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai kegagalan komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, ataupun komunikasi antar budaya yang kerap menyulut kesalahpahaman, sikap saling menghakimi, saling menyalahkan, dan bahkan konflik kekerasan yang sewaktu-waktu bisa mengancam hubungan sesama warga bangsa yang heterogen ini. Ruang publik (media) kita dewasa ini dipenuhi dengan prasangka, ketidakpercayaan, sikap kesombongan dari orang kepada sekelompok orang, dari penguasa kepada rakyatnya, dan dari rakyat kepada pemerintahnya dan seterusnya.

Untuk itulah perlu digagas kembali perlunya sebuah jurnalisisme empati sebagai antitesis terhadap berkembangnya jurnalisisme yang mengedepankan kontroversi, keanehan, dan *talking news*.*

Tabel 1. Ciri Jurnalisme Empati

Jurnalisme Mainstream		Jurnalisme Empati
Titik Perhatian	Pertikaian, skandal, pernyataan kontroversial (misalnya: ucapan “I don’t care” SBY, atau ucapan Aburizal Bakri, “kalau menilai harga elpiji terlalu tinggi, ya tak usah beli elpiji”, dll	Sikap pengertian dan upaya memahami posisi serta kesulitan orang lain yang berbeda pendapat.
Isi	Sikap permusuhan, kebencian, tantangan, sengaja dimuat pernyataan yang mengundang kemarahan banyak pihak agar beritanya bisa ditindak lanjuti.	Pernyataan-pernyataan yang mengundang kebencian dan permusuhan dianggap tidak perlu dikutip, perbedaan dikedepankan sebagai cara pandang wajar yang perlu dikemukakan sebagai upaya untuk saling memahami.
Tujuan	Kian banyak tiras yang terjual.	Munculnya komunikasi yang sehat dan pencarian solusi bersama.

<p style="text-align: center;">Cara pandang dan angle</p>	<p>Membabi buta terhadap pernyataan narasumber. Misalnya ucapan Gubernur DKI Sutiyoso yang menyatakan bahwa “penggusuran akan diteruskan, karena mereka itu melanggar hukum karena telah menduduki tanah-tanah kosong milik negara dan bantaran sungai”.</p>	<p>Mencoba memahami dari sisi yang berbeda. Misalnya: dengan mencoba menggali persoalan kenapa ada urbanisasi dari desa ke kota, kenapa ada orang mau tinggal di kawasan rawan yang mudah terkena bencana, melihat rakyat yang tinggal di tanah kosong dan bantaran sungai sebagai upaya survival masyarakat golongan bawah sementara pemerintahnya tak bisa menjamin kehidupan mereka secara layak.</p>
<p style="text-align: center;">Narasumber</p>	<p>Antar pihak yang bertikai, tokoh, elit.</p>	<p>Memberikan ruang yang adil bagi semua pihak, terutama kaum tak bersuara, yang pernyataannya jarang dikutip, untuk mengemukakan alasan masing-masing.</p>

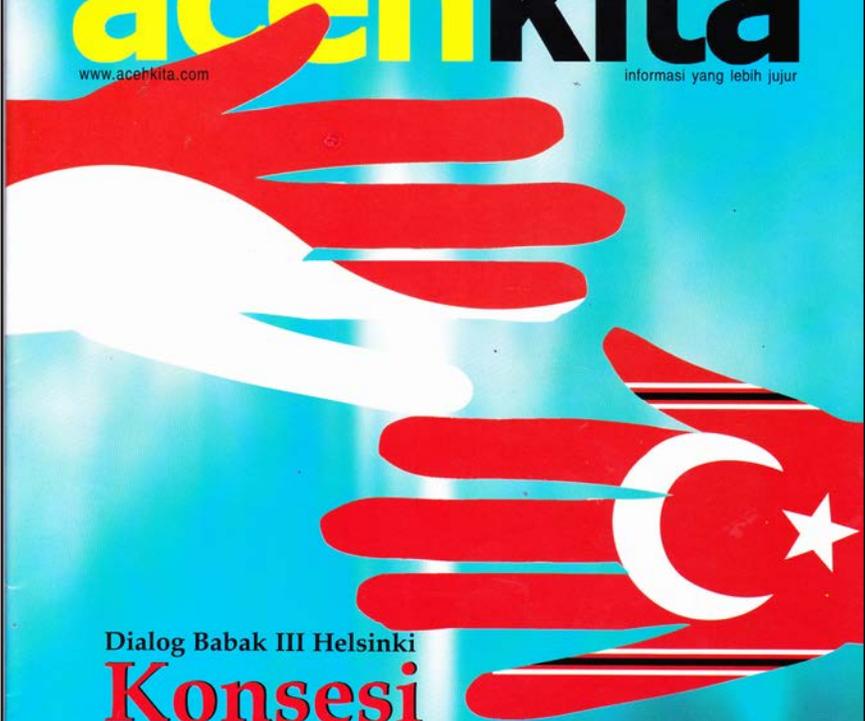
SENGKETA TANAH PASCATSUNAMI

MAJALAH

aceh kita

www.acehkita.com

informasi yang lebih jujur



Dialog Babak III Helsinki

Konsesi Tanah & Uang untuk GAM



EDISI 015/TAHUN II/APRIL 2005

Independensi, Kebebasan dan Netralitas Pers

“BAHWA SESUNGGUHNYA HASIL KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGELINTIR ORANG DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENINDASAN DAN KESEWANG-WENANGAN LAYAK TERJADI, KARENA SESUAI DENGAN KEDIKTATORAN DAN MILITERISME.

DAN PERJUANGAN SEMENTARA PENGUASA DAN ISTRINYA TELAH SAMPAI KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA SERBA MUMPUNG HIDUP DAPAT MENERUK KEKAYAAN SEBANYAK-BANYAKNYA. /ATAS BERKAT DAN RAHMAT SETAN DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN UNTUK DIPATUHI, MAKA PENGUASA RAKYAT INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEKUASAANNYA. KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATA PENGUASA YANG KUAT, YANG MEMERINTAH SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH KEKAYAAN INDONESIA, DAN UNTUK MENEGAKKAN GENGSI-GENGSI PRIBADI, IKUT MEMELARATKAN BANGSA, MAKA DISUSUNLAH KETETAPAN INDONESIA MINI YANG BERBENTUK

DALAM SEBUAH YAYASAN “HARAPAN KITA”. /SEKIAN.

Gara-gara aksi pemlesetan Mukadimah UUD 45 itu, majalah *Sendi* dibredel pada 7 Februari 1972. Majalah mahasiswa Universitas Gajah Mada itu dinilai telah mengajukan kritik keras pada pemerintah atas rencana pembangunan Proyek Taman Mini. Akibatnya, Ashadi Siregar sebagai pemimpin redaksi diganjar hukuman penjara.

Di Indonesia, tanpa disadari, keberadaan pers kerap kali dilihat dalam bahasa jargon. Ada banyak sebutan terhadap pers. Mulai dari “pers perjuangan”, “pers pembangunan”, “pers yang bebas tapi bertanggungjawab”, “pers Pancasila”. Orang kerap lupa pada fungsi sebenarnya bahwa pers tak lebih dan tak kurang adalah pers, sebuah media yang punya fungsi sosial. Demikian pula wartawan tak lebih adalah wartawan, seseorang yang tugasnya meliput sebuah kejadian. Tak lebih tak kurang.

Dengan demikian adalah terlalu berlebihan sebutan atau kiasan yang menggambarkan wartawan sebagai seekor “binatang” yang menggigit, apalagi menghisap darah, seperti yang tergambar lewat penyebutan “nyamuk pers” atau “anjing penjaga” (*watchdog*). Sama berlebihannya dengan menggambarkan pers sebagai sebuah pilar demokrasi. Apalagi di negara di mana represi dan hegemoni kekuasaan lewat pikiran dan angan bawah sadar terjadi dan berlangsung secara terus-menerus.

Ada banyak kalangan malah menyatakan pers di jaman industri media tak berbeda dengan gabungan produk *pop art* biasa, seni grafis dan hiburan ala Walt Disney. Tak lebih, tak kurang. Untuk itu, kita barangkali mesti memeriksa kembali fungsi sebuah media.

Fungsi utama yang dijalankan media massa sebetulnya berperan sebagai saluran mediasi yang mencakup juga tugas “menghubungkan”, “menunjukkan arah” dan “menginterpretasikan” serta tentu saja “mengoreksi”. Pengakuan pers sebagai bagian dari sistem pemerintahan memberikan kemungkinan pada pers untuk bertindak sebagai seorang inspektur yang selain “menginterpretasikan” dan “mengoreksi” juga “mengkritik” dan meminta sejumlah “pembenahan”.

Banyak pengamat pers menyatakan, bahwa di Indonesia peran kontrol yang dijalankan pers sesungguhnya jauh lebih efektif dan efisien ketimbang

yang dilakukan DPR. Sebab pers tak perlu terikat pada jadwal dan tatib persidangan. Lagi pula kontrol sosial itu bisa dilakukan setiap saat.

Pakar komunikasi dari Universitas Amsterdam, Denis McQuail, membagi fungsi media massa secara sistematis menjadi lima bagian. Antara lain media massa menjalankan fungsi “informasi”. Yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia; menunjukkan hubungan kekuasaan dan memudahkan inovasi, adaptasi serta kemajuan.

Media massa juga menjalankan fungsi “korelasi”. Yaitu menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi; menunjang otoritas dan norma yang mapan; melakukan sosialisasi, mengkoordinasikan beberapa kegiatan; membentuk kesepakatan dan menentukan urutan prioritas serta memberikan status relatif.

Selain itu juga menjalankan fungsi “kesinambungan”. Yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subkultur) serta perkembangan budaya baru; dan meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai.

Fungsi yang lain adalah “hiburan”. Yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi; meredakan ketegangan sosial.

Fungsi terakhir media massa adalah “mobilisasi”. Yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama.

Pers Adalah Pilar Demokrasi?

Sungguh menarik bila pokok pikiran tersebut kita lihat dalam kacamata sekarang di mana pemerintah selalu menyatakan agar rakyat menyalurkan aspirasinya secara konstitusional. Satu-satunya lembaga yang sah mewakili rakyat yang diakui pemerintah hanyalah DPR (yang kata Gus Dur kini mirip dengan *play group*, bukan lagi Taman Kanak-Kanak). Dan pers sendiri berkali-kali selalu diingatkan agar mempertahankan netralitasnya.

Sejak paruh 1970, partai politik sebetulnya secara perlahan mengalami kebangkrutan dan digantikan perannya oleh ornop. Pers sendiri saat itu tampil sebagai *watchdog* masyarakat yang selalu dengan tajam mengawasi tindak-tanduk penguasa. Pers saat itu betul-betul dianggap sebagai

kekuatan penyangga demokrasi. Namun Peristiwa Malari mengakhiri peran pers sebagai *watchdog*. Sejumlah media umum maupun kampus dibredel. Lantas berlanjut pada 1978. Terakhir adalah pada 21 Juni 1994 di mana tiga media, *Tempo*, *DeTIK* dan *Editor* dibredel.

Melihat kenyataan politik, mengangankan pers jadi pilar demokrasi tampaknya merupakan sebuah angan-angan ilusionis belaka. Kalau melihat peran dan perkembangan pers di Indonesia, di jaman Orde Baru praktis sejak 1974 dan Peristiwa 1978, pers secara perlahan meletakkan diri sebagai subordinasi dari kekuasaan. Lihat saja pada saat menjelang dilangsungkan pemberlakuan darurat militer di Aceh dimana pemerintah memberlakukan ketentuan *embedded journalism*. Lihat pula bagaimana pers Indonesia bisa menjadi bagian dari demokrasi bila *news room*-nya diliputi gelora nasionalisme yang tak masuk akal sebagaimana ditunjukkan dalam pemberitaan mengenai kasus Ambalat.

Meski badan dunia macam PBB telah mengakui pers dan ornop sebagai institusi negara yang keempat, namun sebagaimana upaya menghormati kesepakatan antar bangsa ada banyak hal yang telah jadi kesepakatan ditolak mentah-mentah oleh negara berkembang. Antara lain Pasal 19 “Human Right Declaration” dan “Declaration on the Mass Media” (disponsori Unesco pada 1978).

Pers sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara tampaknya memang hanya menjadi “angan-angan”, *das sein*. Sebab ada banyak negara yang anti-demokrasi mencoba menginterpretasikan kebebasan pers sesuai kepentingan kekuasaan.

Di negara anti-demokrasi, pers kerap dianggap sebagai musuh. Laporan pers dianggap berpotensi menjatuhkan pemerintah. Malah ada pemeco “mata pena lebih tajam dari pedang” atau ucapan Napoleon Bonaparte yang mengatakan “pena lebih berbahaya ketimbang peluru”. Tentu saja itu cuma sebuah ilusi, sekaligus pengagung-agungan pers secara berlebihan.*

Belajar Dari Sakit Pak Harto

Mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, Kamis (5/5) lalu dikabarkan kembali masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Seperti biasanya, tak ada kabar yang jelas menyangkut penyakit mantan orang kuat di Indonesia itu. Keterangan dari kerabat Cendana menyatakan Pak Harto menderita pendarahan di bagian usus besar dan kini kondisinya telah membaik setelah menerima transfusi darah sebanyak 5 kantung atau sekitar 1.300 cc.

Apakah demikian halnya? Bukankah minggu lalu Pak Harto mengagetkan banyak orang melalui kemunculannya di salah satu anjungan Taman Mini Indonesia Indah? Yang jelas kalangan dokter RSPP kembali melakukan gerakan tutup mulut dan pers Indonesia seperti biasanya hanya bisa mencari kutipan sana-sini.

Tentu saja ini merupakan tanda tanya besar menyangkut keberadaan, sekaligus kemampuan, pers Indonesia untuk mengungkap fakta-fakta di balik kesehatan mantan orang kuat Indonesia tersebut. Apalagi ia pernah dituduh menderita “penyakit otak” yang serius hingga tak bisa diadili. Padahal setumpuk tuduhan kejahatan kemanusiaan menantinya.

Pada Juli 1999, saat Soeharto sakit, kita semua menyaksikan bagaimana

pers saat itu tak mampu menghadirkan fakta. Berita yang diturunkan penuh dengan spekulasi dan ketidakpastian, bahkan lebih merupakan sebuah sensasi yang disusun si wartawan. Pers Indonesia yang saat itu baru bebas dari kungkungan kekuasaan sepertinya telah terbuka, namun sekaligus masih tertutup.

Saat itu ada banyak kalangan memperdebatkan apakah pemberitaan menyangkut mantan penguasa republik selama 32 tahun itu telah melampaui hak *privacy* Soeharto. Atau masyarakat memang tak berhak mengetahui kondisi kesehatan Soeharto secara wajar, mengingat Soeharto ternyata memang masih memiliki pengaruh dan kekuatan politik. Barangkali itu tak perlu dicari jawabnya. Yang lebih perlu dijawab barangkali adalah apakah sekelompok orang memang berhak mengecoh, mengerjai, dan menipu wartawan yang bekerja mencari fakta dan kebenaran untuk masyarakat, seperti halnya yang dikerjakan para pengawal, pengacara, dokter, dan keluarga Cendana terhadap wartawan.

Soeharto, meski telah jadi orang biasa, pada kenyataannya masih menikmati *privilege* sebagai pejabat tinggi negara yang perlu dilindungi seperti halnya pada masa lampau. Di negara demokratis, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dijamin negara. Pers berhak mengakses dan menyebarkan semua informasi, kecuali yang menyangkut rahasia negara.

Selama pemberitaan sakitnya Soeharto pada Juli 1999 itu di mana antara 7-9 hari Pak Harto dirawat di RSPP, media telah menyodorkan pemberitaan yang serba tak pasti pada halaman pertamanya. Pihak pengelola media kurang serius menghargai ratusan ribu pembacanya yang rela mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan informasi – yang memang menjadi haknya – tentang kesehatan bekas penguasa Orde Baru yang menghebohkan itu. Media ternyata malah menyodorkan berita tentang paranormal, kebohongan pengacara, dan penjelasan tentang penyakit *stroke*.

Baik dokter pribadi Soeharto maupun anggota tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina sama-sama lebih memilih bungkam. Sementara pihak keluarga dan pengacara Soeharto jelas menipu dan menutupi keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kalangan dokter yang sebetulnya sesuai keahlian punya kredibilitas untuk menjelaskan kondisi pasien mereka itu, ternyata

lebih bersedia diwawancarai wartawan tentang apa itu penyakit *stroke*, hubungan serangan *stroke* dengan daging kambing dan nasi kebuli, dan seterusnya.

Tak pelak, para wartawan saat itu lantas mulai mengada-ada dengan mencari sumber berita alternatif yang sebetulnya tak berkompeten dan tak memiliki relevansi dengan penjelasan tentang Soeharto. Para wartawan mewawancarai sejumlah paranormal, artis, dan bahkan atlet yang memberikan pernyataan yang sama sekali tak berhubungan dengan penjelasan tentang kondisi kesehatan Soeharto. Paranormal Mas Haryo Penuntun, misalnya, malah menjawab pertanyaan wartawan dengan membanggakan kehebatan dirinya dan garis darah yang masih dimilikinya dengan Soeharto. “Kita kan punya semacam trah. Trah kami kan Pengeran Samber Nyawa, itu Pangeran Mangkunegara I. Jadi secara gaib kami mempunyai hubungan tapi bukan berarti digaji. Saya ini tabib terkenal kok. Saya ini juga bisa menyembuhkan juling, tuli, dan gagu,” kata Haryo Panuntun (*Rakyat Merdeka*, 29/7/99).

Saat itu, untuk mengisi kebuntuan informasi tentang perkembangan kondisi Soeharto, media mulai mengembangkan wacana perihal nasib pengusutan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Soeharto bila yang bersangkutan meninggal. Kebuntuan menggali informasi dari kerabat Cendana, pembela Soeharto, dan dokter Pertamina kemudian digantikan narasumber dari kalangan kejaksaan, pengacara, dan pejabat.

Kebohongan dan upaya menutupi kondisi kesehatan Soeharto memprihatinkan sejumlah kalangan. Sekretaris Barisan Nasional, Rachmat Witoelar, misalnya, menyatakan bahwa di kala sakit pun, Soeharto masih dikelilingi para pembohong. Mereka memberikan keterangan yang tidak semestinya. “Kita prihatin, terhadap orang tua yang sakit pun, para pembohong itu masih tega mempolitisir keadaan. *Ngono ya ngono ning aja ngono*. Artinya, katakan saja apa adanya. Kalau sakit katakan sakit, tidak perlu ditutup-tutupi,” ujar Rachmat Witoelar (*Rakyat Merdeka*, 23/7/99).

Menutup pemberitaan tentang sakitnya Soeharto, pihak keluarga Cendana yang berhasil mengecoh para wartawan dan menyembunyikan kondisi Soeharto yang sebenarnya meminta maaf pada kalangan wartawan. Dalam jumpa pers yang diadakan di Lantai III Ruang Auditorium Gedung A RSPP, didampingi penasihat hukum Tampubolon dan Dirut RSPP

Sudjono Martoatmodjo, pada Selasa Pon, 27 Juli 1999, Tutut meminta maaf kepada semua wartawan. “Kami mohon maaf, termasuk kepada tokoh masyarakat yang belum diijinkan menjenguk Bapak, karena menurut tim dokter sebaiknya Bapak tak menerima kunjungan dulu agar proses penyembuhannya berjalan baik. Kami juga masih disibukkan dan khawatir dengan keadaan Bapak. Jadi kami selalu ingin dekat dengan Bapak,” ujarnya.

Tak banyak yang tahu secara persis keadaan kesehatan Soeharto. Apalagi sejak berkuasa 11 Maret 1966, Soeharto memang selalu ditampilkan sebagai figur pemimpin yang kuat, tak pernah sakit, dan tahan menghadapi “cuaca” apapun.

Pada 1996 pers melaporkan kunjungan Soeharto ke Bosnia yang tengah dilanda perang dengan nada kekaguman berlebihan. Penguasa Orde Baru yang berusia 70 tahun lebih itu dilaporkan tak mau mengenakan rompi antipeluru. Bukan hanya itu, ia juga tampil dalam medan yang terbuka. “Benar-benar luar biasa dan berani,” tulis pers ketika itu yang melaporkan bahwa sejumlah menteri yang menemani Soeharto ciut nyalinya dan tak se”gagah berani” Soeharto.

Masalahnya, benarkah Soeharto saat menjadi presiden selalu sehat dan tak pernah sakit? Jawabnya jelas, Soeharto orang biasa. Hanya saja sistem kekuasaan berkepentingan untuk membangun figur manusia yang tampaknya kemudian lebih mirip proses *inhuman being*; pemimpin menjadi manusia super sekualitas Superman.

Seorang dokter yang pernah ikut Operasi Mandala mengatakan bahwa semasa kecil Soeharto pernah menderita demam rematik (*rheumatic fever*). Penyakit ini di masa tua menyebabkan terjadinya kelainan pada klep jantung (katup mitral).

Soeharto sendiri sebetulnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif sejak 1970-an, yang kemudian berakibat pada 14 Desember 1975 dia harus menjalani operasi kantung empedu. Setelah “bersembunyi” sekitar seminggu, Soeharto segera tampil lagi secara bugar seperti biasa. Pada 1982, Soeharto juga tercatat mengalami pembesaran prostat hingga

harus menjalani operasi. Namun, kenyataan ini ditutup-tutupi hingga masyarakat mengira Soeharto selalu dalam keadaan sehat.

Sesaat setelah memerintahkan pembredelan *Tempo*, *DeTIK*, dan *Editor* kesehatan “jendral besar” ini bermasalah lagi dan harus menginap di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, pada 23 Agustus 1994. Keadaan Soeharto pada waktu itu juga dinyatakan tertutup bagi para wartawan. Hanya ketika kondisi Soeharto telah pulih, wartawan baru bisa menuliskannya. Itupun dengan pemberitaan sensasional dan menggambarkan Soeharto sebagai makhluk super. Saat itu, Soeharto digambarkan tengah menunggu tim dokter kepresidenan yang akan memutuskan akan diapakan batu ginjal dalam tubuhnya.

“Karena tak mampu menahan sakit lagi, Soeharto lantas berdoa sambil mengerahkan tenaga dalamnya,” demikian tulis pers ketika itu. “Tak lama kemudian, batu ginjal itu keluar sendiri. Tapi ia diam saja, tak memberitahu para dokter. Ketika para dokter memutuskan untuk melakukan operasi, mereka lalu memeriksa *very very important person patient* itu. Para dokter heran: *kok*, batu ginjalnya hilang? Konon, presiden tersenyum dalam hati. Akhirnya, operasi dibatalkan.” (*D&R*, Edisi 26-31/799)

Luar biasa! Bayangkan, seorang kakek berusia 73 tahun memiliki tenaga dalam dan bisa menggunakannya untuk menelurkan sebuah batu ginjal. Tentu saja cerita versi Sekretariat Negara ketika itu sungguh keterlaluhan dan tak masuk akal.

Pada Juni 1996, kesehatan Soeharto kembali memburuk. Hasil pemeriksaan di RSPP menunjukkan adanya pembengkakan jantung dan gangguan di ginjal kanan akibat batu ginjal yang tak jadi dioperasi pada 1994. Untuk itulah lantas dilakukan pemeriksaan ulang, dan atas rekomendasi B.J. Habibie pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Herz und Diabeteszentrum di kota Bad Oeynhausen, sekitar 80 kilometer dari Hannover. Alhasil, sejumlah agenda kepresidenan pun diubah total. Untuk menghindari munculnya spekulasi politik, Soeharto terpaksa tampil di depan pers untuk memberi penjelasan.

Namun, sepulang menjalani serangkaian pemeriksaan di Jerman itu, seperti biasa, Soeharto dilaporkan sehat walafiat. Sumber resmi membeberkan, tim dokter di Jerman menyatakan kekagumannya pada kehebatan fisik Soeharto. Fakta dan temuan tim dokter yang sesungguhnya

menandaskan bahwa Soeharto menderita penyakit jantung dan diabetes betul-betul disembunyikan.

Aksi penyembunyian memburuknya kondisi kesehatan kepala negara ini kembali diulang pada Desember 1997 melalui koordinasi Mensesneg Moerdiono. Saat itu, Soeharto sebetulnya tengah melakukan lawatan panjang ke Namibia, Afrika Selatan, Meksiko, dan kemudian ke Kanada untuk menghadiri Sidang APEC. Dari Kanada, rencana meneruskan umrah ke tanah suci tiba-tiba dibatalkan – dan Soeharto langsung terbang balik ke Jakarta. Soeharto yang terkena serangan *stroke* agaknya perlu disembunyikan dari pandangan umum.

Moerdiono membantah pertanyaan para wartawan mengenai spekulasi Soeharto jatuh sakit dengan mengatakan bahwa Soeharto baik-baik saja. Katanya, Soeharto hanya sedikit kelelahan hingga perlu mengambil cuti besar selama 10 hari. Tak lama kemudian rasa penasaran masyarakat diredam dengan cara menggiring sejumlah wartawan Setneg untuk menemui Soeharto yang tengah berleha-leha di rumahnya di Jalan Cendana. Tak ada wawancara secuil pun dengan wartawan, kecuali hanya untuk mengambil gambar. TVRI sebagai media yang mewakili pemerintah memberitakan kunjungan beberapa wartawan ke Cendana dengan menayangkan gambar Soeharto yang mengenakan sarung tengah bermain dengan burung perkututnya.

Di Indonesia, ketika Soeharto berkuasa, penguasa selalu mengontrol dan mengendalikan pers. Pemerintah memperkenalkan slogan tentang kehidupan pers ideal yang dikenal dengan sebutan Pers Pancasila – sekalian melengkapi definisi tentang negara Pancasila yang kian kerap diucapkan pejabat. Para penguasa menolak pers mengembangkan kebebasan dalam pemberitaannya.

Kini banyak orang menyebut-nyebut pers sebagai telah kebablasan, telah merdeka. Namun dari pemberitaan tentang sakitnya Soeharto, kita bisa melihat bagaimana pers tak memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana yang digembar-gemborkan sebagai ujung tombak jurnalisme investigasi.

Bagaimana pun Pak Harto adalah orang penting. Di tangan beliaulah orang Aceh hidup merana di bawah pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Di bawah kendali beliau pula lah berbagai operasi intelijen dan “penumpasan” warga sipil dilakukan atas nama negara.

Sakit Pak Harto, juga sakitnya para koruptor yang akan atau sedang diadili, sebetulnya juga menunjukkan bagaimana tumpulnya kemampuan para wartawan untuk mengungkap fakta-fakta di balik konspirasi antara aparat penegak hukum, dokter, institusi rumah sakit dan dunia peradilan. Uang dan kekuasaan ternyata mampu mengecoh dan menutupi kebenaran yang dicari wartawan dan masyarakat.*

MELACAK DUIT JADUP & BARAK

MAJALAH

aceh kita

www.aceh.kita.com

Informasi yang lebih jujur

**Memburu GAM
Sambil Berbisnis**



ISSN 1603-6272 (p) 2005

EDISI 016/TAHUN II/MEI 2005

Dua Tahun Masa Darurat Pers Aceh

Status darurat di Aceh sejak 19 Mei 2005 lalu berubah menjadi berstatus tertib. Adakah kemajuan sejak pemberlakuan darurat militer pada 19 Mei 2003 selama 6 bulan yang kemudian diperpanjang selama 6 bulan lagi dan disambung menjadi keadaan darurat sipil pada 19 Mei 2004 hingga 18 Mei 2005? Benarkan keadaan di Aceh telah membaik? Atau justru masyarakat sipil kehilangan orientasi? Bagaimana dengan media di Aceh? Bagaimana media nasional melihat persoalan Aceh?

Kita semua perlu melihat dan merenungkan kembali apa yang terjadi dengan Aceh selama 731 hari. Setiap jam ada ratusan atau malah ribuan berita penting bermunculan di berbagai penjuru dunia. Namun, kejadian apa yang terjadi selama 17.544 jam masa darurat di Aceh?

Selama darurat militer (tahap I dan II), pemerintah menyatakan bahwa TNI berhasil menembak mati anggota GAM sebanyak 2.439 orang, 2.003 orang berhasil ditangkap. Selebihnya sebanyak 1.559 orang anggota GAM menyerahkan diri. Dari pihak TNI yang tewas dalam masa darurat militer mencapai 147 orang, dan 422 orang menderita luka-luka. Jumlah senjata standar milik GAM yang berhasil dirampas pasukan TNI selama darurat

militer mencapai 914 pucuk dan sekitar 270 pucuk senjata rakitan.

Bagaimana selama masa pemberlakuan darurat sipil? Tak ada kejelasan yang diberikan kepada masyarakat. Tak ada media yang melaporkan “sukses berat” masa-masa ini. Namun Koalisi NGO HAM Aceh mengeluarkan catatan yang menyatakan bahwa selama pemberlakuan status darurat sipil (I: 19 Mei-18 November 2004) dan (II: 19 November 2004 - 18 Mei 2005), berbagai tindak kekerasan terjadi dan memakan korban berjumlah 535 jiwa. Kelompok sipil adalah terbanyak, yakni sejumlah 248 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 orang adalah korban penganiayaan, 61 korban pembunuhan, 23 korban penculikan dan 21 orang ditangkap. Dilihat dari jumlah korban kekerasan dari pihak warga sipil selama DS II (hingga 15 Mei) ada sekitar 159 orang. Ini berarti melonjak sekitar 1,7 kali lipat dari total korban selama DS I yang sebanyak 89 orang.

Apa arti angka-angka tersebut? Angka-angka tersebut bukan sekadar matematika korban, tapi menjelaskan bahwa dalam pertikaian atau operasi militer yang jatuh sebagai korban adalah selalu pihak yang tak berkepentingan dengan pertikaian, yaitu penduduk sipil.

Berapa biaya yang telah dihabiskan untuk sebuah operasi militer yang tadinya disebut-sebut sebagai “operasi terpadu” itu? Alokasi anggaran untuk pelaksanaan operasi dalam status darurat militer, yang digelar mulai 20 Mei 2003-31 Desember 2003 mencapai lebih Rp 650 milyar, sedangkan anggaran darurat militer tahap II yang dilaksanakan selama 1 Januari 2004-30 Juni 2004 mencapai angka Rp 738,23 milyar. Sedangkan anggaran untuk darurat sipil tahap pertama adalah sebesar Rp Rp571,84 milyar. Tak jelas berapa angka yang dilaporkan untuk darurat sipil tahap II.

Lantas apa sumbangan uang sebanyak itu bagi negara-bangsa yang sedang dilanda krisis berkepanjangan ini? Tentu pertanyaan ini bisa mengundang berbagai jawaban. Namun kita bisa melihat bagaimana operasi yang mahal itu ternyata tak membuat pers dan media elektronik Indonesia kian maju, tapi malah mengalami kemunduran.

Kita disadarkan bahwa pers dan media elektronik di Indonesia ternyata harus banyak dikritik. Mereka hanya memberikan perhatian serius pada awal-awal masa darurat militer I, setelah itu secara perlahan masalah Aceh dianggap tak lagi mempunyai nilai berita dan tak perlu diliput. Kita juga bisa melihat bagaimana nilai-nilai profesional dalam jurnalistik telah

ditenggelamkan dan diganti dengan wacana dominan negara kesatuan RI, patriotisme, dan nasionalisme yang menggebu-gebu. Jurnalisme patriotis tak lebih dari sebuah jargon yang mengupayakan agar media jadi terompet semata. Di sisi lain, media tak menggunakan potensinya yang paling besar, yaitu kemampuan menggalang opini publik, untuk mempertanyakan tindakan aparat di lapangan yang bertentangan dengan tekad pemerintah menghormati HAM.

Sejak pemberlakuan masa darurat (militer maupun sipil) di Aceh menunjukkan bahwa kebanyakan media ternyata masih berada dalam lingkaran berpikir dan paradigma pers Orde Baru. Media tak mampu mengungkap fakta-fakta di lapangan. Para wartawan lebih mengandalkan hasil wawancara dengan pejabat dan petinggi TNI. Ada banyak wartawan ternyata lebih suka berdiam di hotel atau pergi ke *media centre* ketimbang mencek data langsung ke lapangan. Ada hambatan dari pihak TNI sebetulnya tak memberikan dasar apology bagi jalan pintas mencari berita yang cukup dengan cara pergi ke *media centre* saja.

Dengan demikian jangan kaget bila kita periksa kembali berita media cetak atau kita putar kembali tayangan berita di televisi, kita akan menemukan lebih banyak fakta psikologis para pejabat ataupun petinggi TNI ketimbang fakta sosiologis. Berita omongan (*talking news*) yang merupakan bentuk jurnalisme yang paling primitif ini adalah salah satu warisan Orde Baru, terutama jaman Departemen Penerangan di bawah “Bung” Harmoko.

Sebetulnya status darurat di Aceh telah mengalami degradasi, namun liputan media mengenai Aceh ternyata tak menunjukkan perbaikan. Semestinya yang terjadi perbandingan terbalik di mana dengan berkurangnya kontrol, pers harus bisa memanfaatkan situasi dan meninggikan intensitas liputan mereka tentang Aceh. Tentu saja fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar, jangan-jangan keadaan di lapangan antara saat penerapan darurat militer dengan saat penerapan darurat sipil tak ada bedanya. Pada kenyataannya sejumlah wartawan tetap kesulitan menemukan ruang gerak.

Media di Indonesia perlu mendapat pujian saat membuat liputan mengenai bencana tsunami yang menggulung sebagian kawasan pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Melalui liputan, para wartawan telah mampu menggalang munculnya solidaritas masyarakat dunia. Bayangkan

bila tak hadir di Aceh saat itu. Sungguh tak terbayangkan penguasa darurat sipil di Aceh atau pun aparat militer memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat sedunia dengan dahsyat seperti itu. Barangkali ini adalah pelajaran mahal yang jangan diulang: menghalangi pers bekerja secara independen dan bekerja mengandalkan nurani.

Selama 2 tahun Aceh telah memberikan pelajaran penting untuk siapapun agar selalu menghormati pekerjaan wartawan. Selama 2 tahun di Aceh tercatat ada wartawan diancam, dipukuli, diculik, disandera, dan dibunuh. Wartawan yang lain yang dianggap memiliki gaya berpikir kritis diusir ke luar dari wilayah Aceh. Tapi sepertinya, ada sejumlah wartawan yang tetap mempertahankan sikap idealis mereka. Mereka tetap bekerja mencari dan menyebarkan berita dengan berupaya menembus berbagai kesulitan.

Barangkali untuk itu kita, *civil society* yang bermimpi negeri ini akan menjadi lebih baik dan demokratis, perlu berterima kasih dengan segelintir orang yang tak pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran dan kritik. Termasuk kepada wartawan media ini, tentu saja!*

Menatap Pers Aceh Masa Pemulihan

Sepertinya 18 Mei 2005 lalu pemerintah Indonesia memberikan kado bagi rakyat Aceh berupa pencabutan keadaan darurat sipil dan pemberlakuan tertib sipil. Pemerintah juga telah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR) yang bertugas menangani proses rekonstruksi Aceh. Apa implikasi dari kado yang sepertinya istimewa tersebut?

Pemberlakuan status tertib sipil seharusnya memperlebar ruang gerak masyarakat sipil. Apalagi pada kenyataannya peristiwa tsunami pada 26 Desember 2004 lalu telah menghancurkan Aceh dan memaksa penguasa untuk takluk pada tuntutan alam, yaitu terus menutup diri dan berada dalam kehancuran atau bangkit dengan membuka diri terhadap uluran tangan dan solidaritas dunia. Solidaritas memang membanjir seperti gelombang air bah yang menghancurkan Aceh. Solidaritas yang bermunculan melintasi batas-batas primordial seperti agama, etnisitas, dan kebangsaan. Hingga kini bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh diperkirakan telah mencapai US\$ 1.586,03 juta.

Ada banyak harapan bahwa rekonstruksi Aceh menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian dan demokrasi. Namun kenyataan di lapangan

tidaklah seperti itu. Data-data menunjukkan bagaimana kekerasan kembali merebak di mana-mana. Praktek militerisme kembali mendominasi. Bantuan kemanusiaan dihadang dan dijegal. Gerak para sukarelawan dibatasi.

Pada kenyataannya penduduk sipil Aceh tak memiliki akses yang memadai. Cetak biru rencana rekonstruksi disusun oleh sejumlah pengusaha untuk ditawarkan kepada penguasa. Sungguh aneh, penanganan pasca tsunami semestinya bisa menjadi momentum bagi terciptanya sebuah penyelesaian konflik di Aceh. Masyarakat sipil semestinya punya peluang besar untuk berperan dalam semua bentuk upaya perdamaian yang ada. Namun pada kenyataannya upaya perdamaian di Helsinki telah melupakan keterlibatan masyarakat sipil yang selama ini menjadi korban pertikaian.

Bagaimana dengan pers dan media elektronik? Peran signifikan apa yang diambil? Tentunya kita harus serius memikirkan masalah ini. Apalagi kini kita tahu pers lebih suka meliput suara-suara aneh dari senayan yang mengatas-namakan “nasionalisme” dengan menolak hasil sementara pertemuan Helsinki yang menyepakati adanya pengawas dari internasional.

Pers sudah saatnya kini menyusun agenda yang lebih terinci untuk mendukung ditemukannya solusi damai bagi Aceh. Sudah saatnya media kini meningkatkan kembali liputannya mengenai Aceh. Memang ada banyak kejadian yang layak diberitakan di Indonesia saat ini seperti pengejaran pelaku bom Temtena, pengusutan korupsi di KPK, pelusuran kiriman tepung bakteri antraks di Kedubes Indonesia di Canberra dan sebagainya. Namun situasi di Aceh kini telah berada pada ujung perkembangan yang paling menentukan, apakah kita bisa menemukan jalan untuk mengutuhkan kembali Aceh sebagai bagian nasion Indonesia atau membiarkan Aceh sebagai mana yang ada selama ini. Kalau pilihan terakhir yang dipilih artinya media ikut rela melepaskan Aceh dengan cara membiarkan penderitaan orang Aceh sebagai bukan bagian persoalan rakyat Indonesia.

Sudah saatnya media meningkatkan kembali intensitas pemberitaan mengenai Aceh. Pendekatan model jurnalisme damai dan jurnalisme advokasi perlu untuk dikerjakan dengan tanpa meninggalkan model praktek jurnalisme investigasi. Besarnya jumlah dana yang bakal dikelola untuk keperluan pemulihan Aceh menuntut adanya kewaspadaan tersendiri

bagi kalangan wartawan. Hal ini mengingatkan Indonesia mempunyai rekor yang mencolok dalam hal kebocoran penggunaan dana. Dana tersebut belum termasuk dana-dana sumbangan dari lembaga-lembaga donor lain di sejumlah negara. Dewan Pengarah BRR yang juga kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Aceh mencapai Rp 45 triliun. Sebagian akan dipenuhi dari APBN.

Tingkat kepercayaan rakyat Aceh harus bisa segera dipulihkan. Wartawan harus lebih jeli dan mampu melacak praktek KKN di antara penguasa lokal dengan kekuatan militer dan dukungan trans-national cooperation (TNC) yang selama ini telah membiarkan konflik Aceh berlarut-larut.

Proses rehabilitasi Aceh harus bisa menempatkan rakyat Aceh sebagai satu-satunya aktor utama yang paling berkepentingan dalam proses rekonstruksi wilayah mereka. Bencana tsunami harus dijadikan perspektif untuk mengembalikan kedamaian, keadilan dan kedaulatan kepada rakyat Aceh.

Untuk itu media harus memiliki peranan secara signifikan. Media harus dikembalikan fungsinya untuk selalu memberitakan kebenaran. Media tak perlu lagi menutup-nutupi aib yang dibuat pejabat sipil atau TNI di Aceh. Media juga tak perlu mengusung nasionalisme dengan cara menyembunyikan kebenaran. Nasionalisme media tak lain adalah kebenaran.

Media harus kembali mengabdikan diri buat masyarakatnya. Media bukan dibuat untuk menyenangkan segelintir pejabat dan melayani keinginan pasar dengan mensubordinasikan diri terhadap kekuasaan. Selama ini media banyak meliput perdagangan virtual seperti perdagangan saham, bursa valuta asing, kuat-lemahnya dunia perbankan; tapi melupakan liputan tentang tragedi kemanusiaan. Untuk itu media harus bisa mengembalikan diri mereka sebagai pemantau kekuasaan dan semua praktek yang dilakukannya.

Memang tidak mudah mengubah paradigma dan cara pandang pengelola media terhadap persoalan Aceh. Barangkali yang diperlukan dalam hal ini adalah memberikan kembali kesempatan kepada setiap wartawan untuk dapat menggunakan nurani mereka yang selama ini ditutup oleh berbagai

tugas rutin, isu dan liputan seputar selebritis dan dunia dugem yang sama sekali tak memiliki kaitan dengan penderitaan rakyat akar rumput.

Sudah terlalu lama media menyimpang dari tugas-tugas utamanya sebagai penyampai kebenaran. Kini, Aceh pasca-tsunami, menuntut secara hakiki amanat yang pernah berkali-kali dideklarasikan para wartawan Indonesia itu.*

Deep Throat, Perlindungan Saksi, dan Indonesia

Teka-teki di balik tokoh misterius bernama Deep Throat yang terpendam selama lebih 32 tahun itu akhirnya terjawab juga. Akhir Mei 2005 lalu si tokoh membuka identitas dirinya. Ia tak lain adalah W Mark Felt, mantan Wakil Direktur FBI semasa pemerintahan Presiden Nixon. Kini tokoh misterius itu adalah seorang lelaki renta berusia 91 tahun yang masih tenggelam dalam kebiasaan mengurung diri di rumahnya yang jauh dari keramaian.

Dalam dunia jurnalistik, Mark Felt adalah tokoh kunci yang berhasil mengantarkan dua wartawan *The Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein untuk mendapatkan penghargaan Pulitzer atas keberhasilan mereka mengungkap skandal Watergate. Pengungkapan skandal itu juga mengakhiri pemerintahan Presiden Nixon yang terpaksa mengundurkan diri pada 1974. Melalui pengungkapan skandal tersebut diketahui bahwa demi meraih ambisi politik, Nixon ketahuan menghalalkan berbagai

cara mulai dari menggunakan mata-mata internal, dan pengawasan dan penyadapan secara rahasia. Termasuk sejumlah cara kotor lainnya seperti mendalangi peristiwa penembakan calon presiden George C Wallace saat berkampanye di Pertokoan Laurel.

Pengungkapan jati diri Deep Throat mengakhiri spekulasi masyarakat, juga kalangan jurnalis dan akademisi selama puluhan tahun tentang yang bisa dipastikan memiliki jabatan politik penting dalam pemerintahan Nixon itu. Topik tentang misteri jatidiri Deep Throat ini adalah topik paling menarik yang pernah dibicarakan oleh publik Amerika.

Selama puluhan tahun, paling tidak, tokoh Deep Throat ini telah menjadi obyek perbincangan dalam perkuliahan, penulisan buku, artikel, program televisi, film, dan diskusi di internet. Spekulasi yang berkembang selama ini mengarah pada beberapa mantan figur penting dalam pemerintahan Amerika Serikat. Mulai dari Henry Kissinger (mantan Menteri Luar Negeri), Patric Buchanan (*ghost writer* pidato Presiden Nixon), Donald Rumsfeld (mantan Menteri Pertahanan), Alexander Haig (mantan Menteri Pertahanan), Diana Sawyer (mantan jubar Gedung Putih).

Mengapa ada tokoh seperti Deep Throat di Amerika Serikat yang bisa menjungkalkan pemerintahan kotor Presiden Nixon? Mengapa Deep Throat bisa tetap menjadi sosok misterius selama 32 tahun? Mengapa Presiden Nixon tak mampu mengungkap jatidiri Deep Throat? Mengapa *The Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein bersikukuh merahasiakan narasumber mereka yang menghebohkan tersebut? Bagaimana bila kasus serupa terjadi di Indonesia?

Indonesia jelas berbeda dengan Amerika. Di masa lalu menteri penerangan kita yang suka dipanggil “Bung” menyatakan bahwa kondisi kita berbeda dengan negara lain, khususnya negara yang menganut liberalisme seperti Amerika. “Di sini kita menganut Pancasila,” ujar si Bung. “Di sini kita menganut sistem pers yang bebas tapi bertanggung jawab,” sambungnya.

Coba lihat kembali rekaman pers di Indonesia selama 32 tahun Orde Baru. Ada banyak skandal politik dilakukan pejabat negara, tapi tak ada yang bisa dilaporkan media kepada publik. Kalaupun ada, satu-satunya mungkin hanya mega skandal korupsi Pertamina di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo yang berhasil diungkap oleh Mochtar Lubis melalui informasi

yang diberikan oleh mantan kepala intelijen, Zulkifli Lubis.

Indonesia juga tak memiliki undang-undang perlindungan saksi yang memungkinkan orang yang melapor memperoleh perlindungan hukum dan si pelaku kejahatan diusut tuntas. Di Indonesia seorang saksi pelapor bisa “dikerjain” habis saat ia memberikan laporannya. Mulai dikerjai di aparat penegak hukum, hingga digugat balik atas tuduhan pencemaran nama baik oleh yang dilaporkan. Di Indonesia, seorang seperti Deep Throat bisa diperlakukan sebagai seorang pesakitan.

Jangan heran bila ada banyak kasus korupsi, skandal politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan negara lainnya tak bisa diungkap hingga saat ini. Adanya mafia peradilan malah memungkinkan kongkalikong antara pengusut, aparat hukum, pelaku, praktisi hukum, dan dunia medis yang memberikan berbagai dalih untuk mangkir dari pemeriksaan dan persidangan. Kalau perlu keputusan juga bisa diatur sedemikian rupa hingga walaupun ada penghukuman, masa hukuman tak perlu dijalani terlalu lama. Semuanya bisa diatur.

Budaya yang dikenalkan Orde Baru sebagai budaya Jawa yang seharusnya memiliki nilai positif, yaitu “*mikul dhuwur mendhem jero*” oleh penguasa Orde Baru justru dibuat menjadi negatif dengan menafikan kemungkinan seorang bawahan untuk melaporkan skandal yang telah dibuat oleh atasannya. Jangan heran bila di kemudian hari hingga saat ini muncul fenomena korupsi berjamaah, pelanggaran HAM berjamaah, dan sebagainya. Hal ini akibat tindak kejahatan dilakukan secara tanggung-renteng dari pucuk pimpinan hingga anak buah. Bila ada pengusutan maka pimpinan melindungi anak buah, dan anak buah diminta untuk tutup mulut. Jangan heran kalau ada banyak PO Box pengaduan di masa lalu justru berubah fungsi menjadi PO Box pengusutan terhadap si pelapor.

Pers kita juga lebih takut kepada ancaman penguasa ketimbang pada rasa bersalah karena tak bisa mengungkap kebenaran yang dibutuhkan publik, bangsa dan negara. Saya masih ingat saat masih menjadi wartawan di sebuah majalah pada Januari 1998, saya melakukan wawancara dengan seorang pengamat ekonomi. Sumber saya mengeluarkan pernyataan bahwa “lebih baik Pak Harto turun (sekarang juga), kalau tidak ia akan diturunkan (oleh rakyat)”. Pernyataan itu saya gunakan sebagai judul, tapi pemimpin redaksi saya menyatakan berkeberatan dengan judul dan isi wawancara

tersebut. Judulnya bukan hanya diubah tapi juga seluruh hasil wawancara saya dipoles sedemikian rupa sehingga saya tak bisa lagi mengenali bahwa itu adalah hasil kerja saya.

Mari kita melihat keadaan pers kita saat ini. Ada banyak media cetak yang canggih dari sisi kemasan. Malah sebuah media cetak terkemuka terbitan Jakarta baru-baru ini meluncurkan edisinya dengan wajah baru yang melibatkan konsultan bernilai ratusan juta (milyaran?) dengan memunculkan wajah sejumlah tokoh yang telah almarhum. Kita juga bisa melihat bagaimana sebuah stasiun TV swasta meluncurkan liputan edisi cetaknya. Semuanya dikemas dalam rangkaian acara yang serba wah. Tapi coba kita bertanya pada diri sendiri apa yang telah mereka sumbangkan di sela hiruk pikuk acara tersebut pada rakyat yang teraniaya di negeri ini. Paling tidak dari sisi liputan yang baik, cerdas dan pengungkapan skandal-skandal yang selama ini berhenti sebagai sebuah misteri.

Barangkali kita perlu bertanya, apa pandangan rakyat di Aceh, Maluku Utara, Ambon, Poso, dan Papua melihat media cetak Indonesia saat ini? Saya khawatir mereka merasa media cetak yang ada bukan bagian dari hidup mereka.

Saat ini ada puluhan rancangan undang-undang (RUU) tengah dibahas di DPR. Di antaranya terdapat banyak RUU yang perlu dicermati, termasuk antara lain RUU KUHP, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dan RUU Perlindungan Saksi. Memperluas liputan ekonomi virtual seperti bursa efek, perbankan dan lain-lain boleh saja, tapi jangan lupakan bahwa di negeri ini jumlah pengangguran, buruh diPHK, pabrik yang tutup dan henggang ke luar negeri terus membengkak.

Kita perlu merenungkan secara bersama apa arti seorang tokoh seperti Deep Throat bagi media, upaya perlindungan saksi dan Indonesia bagi kita semua saat ini. Saya khawatir diskusi tentang 2 hal pertama lebih cocok untuk topik yang menyangkut jurnalisme Amerika Deep, sedangkan topik terakhir lebih cocok untuk dibahas kaum politikus dan pengusaha di negeri ini. Rakyat di bawah terus bergelut dengan masalah pelanggaran hak asasi, kelangkaan BBM, busung lapar, lumpuh layu, kaki gajah, dan penyakit TBC.*

In Memoriam: Pers Pancasila

Di Indonesia, ketika Soeharto berkuasa, penguasa selalu mengontrol dan mengendalikan pers. Pemerintah memperkenalkan slogan tentang kehidupan pers ideal yang dikenal dengan sebutan Pers Pancasila – sekalian melengkapi definisi tentang berbagai sebutan tentang Pancasila yang kian kerap diucapkan pejabat. Para penguasa menolak pers mengembangkan liberalisasi dalam pemberitaan media.

Namun, kalau diteliti lebih lanjut parameter Pers Pancasila tak lebih dari perpaduan paradigma antara pers otoritarian dan pers Soviet-totalitarian. Di jaman Komunis Soviet peran media dimaksudkan untuk memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis Soviet dan terutama bagi kediktatoran partai. Hal ini bisa tergambar sebagaimana ciri pers otoritarian pada umumnya yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa dan mengabdikan pada negara sepenuhnya. Sedangkan pers Pancasila digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendukung dan memperkuat politik pemerintah dengan meniadakan oposisi. Ideologi yang ditekankan adalah pembangunan dan stabilisasi. Ruang yang tersisa di media sepenuhnya merupakan ruang

hiburan dan iklan.

Bila ditelusuri lebih jauh, pers Pancasila sebetulnya lahir dari situasi ketika penguasa mulai mencurigai *civil society*. Saat itu Pak Harto membentuk Opsus di bawah Ali Mortopo yang lebih digdaya ketimbang kerja Bakin. Pasca Peristiwa 15 Januari puluhan media dibredel oleh penguasa, sisanya yang masih bisa terbit bersikap tiarap. Kejadian ini terus bertahan hingga terjadinya pergolakan politik pada 1978 yang dimotori oleh para mahasiswa. Hasilnya pemerintah mengeluarkan konsep NKK-BKK untuk memandulkan semua kegiatan politik praktis di kampus. Tak lama setelah ini muncullah istilah Pers Pancasila, yang pertama kali diucapkan oleh Ali Mortopo. Dan, di kemudian hari Pers Pancasila ini kian banyak disebut-sebut oleh kalangan pakar komunikasi dan jurnalis lantaran dipopulerkan Harmoko.

Proses kelahiran Pers Pancasila tak bisa dilepaskan dari situasi politik dan adanya semacam xenophobia terhadap hal-hal yang berbau Barat dan adanya chauvinisme bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, yang “tidak ini” dan “tidak itu”, “bukan ini” dan “bukan itu” serta mempunyai Pancasila sebagai pegangan hidup rakyatnya. Sejak 1978 ditetapkan kebijakan untuk setia P-4 yang disebut “Eka Prasetya Pancakarsa”. Dibentuklah BP-4 dan BP-7 dan laboratorium Pancasila di IKIP Malang (bandingkan dengan “Manipol Usdek” dan “Jubir Usman” pada jaman Orla).

Selama dasawarsa 1970-an bermunculan berbagai sebutan dengan embel-embel Pancasila. Mulai dari “sepakbola Pancasila”, “ekonomi Pancasila”, “demokrasi Pancasila”. Yang celaknya, kesemuanya justru menunjukkan kegagalan dari sistem yang ada. Imbuhan kata “Pancasila” seolah hanya menjadi anti-tesis dan konsep baru untuk mengatasi kegagalan tersebut, tapi sebetulnya bila dilihat secara sosiologis justru merupakan bagian dari kegagalan itu sendiri. Dengan demikian sebutan “sepakbola Pancasila” yang dilansir oleh Ketua PSSI pada 1973, Bardosono, tak lain merupakan cermin kegagalan sistem pembinaan olahraga sepakbola. “Ekonomi Pancasila” yang dikenalkan oleh Prof Mubyarto (alm) setelah terjadi devaluasi mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah justru mencerminkan kegagalan sistem perekonomian yang dirudung korupsi, inefisiensi dan berbagai pungli. Dan seterusnya.

Pada sistem Pers Pancasila, negara hanya memberikan ijin di bidang penerbitan media kepada lembaga representasi negara (misalnya penerbit seperti *Suara Karya*, milik Golkar) atau swasta yang telah dikontrol dan teruji loyalitasnya. Pasca penyerangan sejumlah kampus pada 1978, pers diminta menandatangani ikrar kesetiaan dan kesediaan dibina pemerintah. Departemen Penerangan lantas juga memberlakukan ketentuan pemberlakuan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) kepada semua media. Bukan hanya itu, tapi pemerintah melalui Direktorat Jendral Pers Percetakan dan Grafika (PPG) juga kerap mengeluarkan imbauan, teguran, dan panggilan terhadap staf redaksi. Hal ini diikuti oleh sejumlah instansi lain mulai dari Kejaksaan, Mabes ABRI, Kodam hingga Koramil. Mereka kerap melakukan teror dan menangkapi wartawan. Bukan hanya itu, sejumlah upaya kontrol lainnya juga dilakukan, seperti penutupan perusahaan, pengendalian organisasi wartawan.

Kontrol yang dilakukan negara terhadap pers saat itu luar biasa. Dalam paradigma Gramscian, pemerintah Orde Baru mengembangkan apa yang disebut sebagai “kekuasaan hegemonis”. Media dilarang mengkritik mekanisme politik dan para pejabat yang berkuasa. Media juga dilarang memberitakan semua hal yang menyangkut *first family* (keluarga Cendana), perpecahan elit, praktek KKN, masalah SARA, isu sakitnya kepala negara, skandal pejabat tinggi, dan sebagainya. Semua perusahaan pers yang ada relatif betul-betul telah di“jinakkan”, di“bina”, dan di“subordinasi” di bawah negara. Negara kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai korporatisme. Semua komponen pers dikendalikan dan dikontrol. Mulai dari pembentukan organisasi wartawan yang hanya satu-satunya (PWI), pembentukan SPS hingga pengelompokan wartawan dalam segmentasi departemen pemerintah. Secara perlahan, unsur pemerintah (dalam hal ini diwakili perorangan kroni penguasa) yang menguasai saham kepemilikan media dan ikut mendikte isi redaksional. Jumlah SIUPP dibatasi. Media-media yang baru tumbuh dengan menggunakan SIUPP tidur atau SIUPP milik media yang telah mati, terpaksa memberikan saham kosong kepada pejabat dan kroninya.

Dalam idealisasi Pers Pancasila diperkenalkan sebuah pers yang bebas dan bertanggung jawab jabarannya ternyata menandakan bahwa pers lebih dituntut tanggungjawabnya saja ketimbang kebebasannya. Tuntutan akan

perlindungan dan jaminan “hak” masyarakat untuk memperoleh informasi dijawab penguasa dengan “kewajiban” media dan “tuntutan etika” yang disepakati dengan negara.

Kita bisa melihat bagaimana saat Pak Harto saat berkuasa sakit berkali-kali, media sama sekali tak bisa memberitakannya. Sama saat peristiwa macetnya uji-coba monorel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di mana Bu Tien terpaksa turun dengan cara digendong oleh pasukan pengawal presiden yang sama sekali tak bisa diberitakan. Para wartawan dilarang memotret kejadian yang dianggap bisa mencoreng pejabat tinggi negara itu.

Semua fenomena ini hampir paralel dengan situasi di Cina dan Uni Soviet ketika rezim komunis berkuasa. Ketika Brezhnev meninggal pada 11 November 1982, pengumuman baru diberikan sekitar tiga jam kemudian setelah memberi kesempatan pada anggota “politbiro” untuk rapat dan mencari pengganti. Memburuknya kondisi kesehatan Brezhnev sejak awal 1960-an disembunyikan rapat-rapat. Tim dokter Uni Soviet pernah menyatakan, Brezhnev sebetulnya secara klinis telah mati pada 1976. Sejak itu ia lebih banyak tergantung pada sejumlah peralatan untuk mengembalikan kehidupannya yang baru secara perlahan pulih pada dua bulan kemudian.

Demikian juga halnya dengan pengganti Brezhnev yang berkuasa sangat singkat, Yuri Vladimirovich Andropov, yang meninggal mendadak pada 9 Februari 1984.

Cerita yang sama juga terjadi di Cina saat “bapak bangsa” Mao Tze Tung meninggal pada 1976. Saat itu pengumuman ditunda sekitar dua jam, menunggu pimpinan Partai Komunis Cina berunding. Sebelum meninggal, kesehatan Mao sempat merosot. Namun, pers Cina tak pernah memberitakan hal ini.

Saat itu, pers Cina justru berkali-kali memuat foto Mao saat berenang menyeberangi Sungai Kuning untuk menggambarkan bahwa kondisi Ketua Mao “lebih sehat dari aslinya”.

Hal yang sebaliknya terjadi bisa dilihat saat Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada 30 Maret 1981 ditembak seorang pemuda ketika baru keluar dari Hotel Hilton di Washington. Pers AS saat itu secara terbuka memberitakan tentang si pemuda, John W Hinckley Jr, yang terobsesi

dengan peranan Robert de Niro dalam film *Taxi Driver* yang menyorotkan serangkaian peluru berkaliber 22 ke dada presiden yang akan memasuki mobil limousinanya. Reagan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas George Washington untuk menjalani operasi pengeluaran salah satu peluru dari paru-parunya. Seluruh rakyat Amerika dan masyarakat dunia bisa mengikuti operasi penyelamatan nyawa presiden lewat kamera televisi yang dipasang di ruang operasi.

Dengan demikian, berbeda dengan keadaan di Uni Soviet dan Cina, juga di Indonesia; di AS sakitnya pimpinan bukan disembunyikan sebagai desas-desus, rumor, dan pergunjangan; sakitnya kepala negara dinyatakan secara terbuka hingga tak berkembang jadi berbagai macam spekulasi. Dengan demikian penyiapan pengganti kepala negara juga bisa dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Bagaimana di Indonesia setelah 7 tahun Pak Harto turun? Masih banyak hal yang belum terberitakan. Di sejumlah daerah konflik, seperti di Aceh, Poso, Ambon, dan Papua, masih banyak hal yang gelap. Para anggota DPR dari PDI-P mencak-mencak karena merasa pemerintah tak transparan mengenai semua seluk-beluk perjanjian Helsinki. Rekening 15 petinggi POLRI masih gelap.

Sebentar lagi kita memperingati 60 tahun Kemerdekaan RI, tapi situasi belum berubah banyak. Ada banyak jurnalis telah bekerja keras, namun media tempat mereka bekerja tak cukup kondusif bagi pengungkapan berbagai permasalahan bangsa yang serius. Barangkali kini saatnya merenungkan kembali apa yang tengah terjadi dengan bangsa ini, termasuk apa yang tengah terjadi pada pers Indonesia saat ini. Saya khawatir, jangan-jangan judul tulisan ini tidak tepat lagi, karena fenomena Pers Pancasila masih terus hidup di tengah bangsa yang menderita amnesia, para pemimpin yang suka mengobrol janji dan pemilik media yang lebih suka bagaimana medianya laku.

Saya khawatir kita tak layak menuliskan Pers Pancasila sebagai sebuah “in memoriam”, tapi justru dengan teriakan bersemangat “long live Pers Pancasila”.*

MENELUSURI JEJAK KORUPSI DI ACEH

MAJALAH

aceh kita

www.acehkita.com

lebih jujur

**Tertib
Sipil
Dengan
Bedil**



EDISI 017/TAHUN II/JUNI 2005

Jurnalisme Aceh Pasca-Helsinki

Acehkita telah lebih dari 2 tahun mengawal Aceh, tepatnya rakyat Aceh, melalui pemberitaan yang kritis. *Acehkita* yang lahir pada masa pemberlakuan darurat militer (darmil) I di Aceh pada jaman pemerintahan Presiden Megawati, telah berhasil memunculkan pemberitaan yang kritis. Banyak pujian mengalir kepada media formal yang saat di lapangan seperti mempraktekkan kegiatan yang wartawannya sulit diidentifikasi. Ada pula cacian akibat kekritisannya dan ketajaman liputan *Acehkita* yang membuat media ini dituduh sebagai media yang membela Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dilihat dari model jurnalisme yang dipilih *Acehkita*, jelas media ini berbeda dengan media *mainstream*. Media ini tampaknya lebih memilih model pemberitaan yang anti pada jurnalisme perang, sebagaimana pilihan banyak media *mainstream*. Media ini lebih memilih mempraktekkan jurnalisme damai, tapi juga tak secara sepenuhnya. Tepatnya, bila dilihat dari cara pemberitaannya, media ini mencoba menyuarakan para korban dengan cara yang mungkin ‘super’ kritis. Bahkan bila dilihat dari gaya tulisan, para jurnalis media ini punya semangat anti-perang sebagaimana

yang dimiliki Generasi Bunga di Amerika Serikat pada era 1960-1970-an.

Namun demikian, sebagai ombudsman yang banyak berinteraksi dengan para awak lapangan media ini, saya tahu bahwa banyak di antara mereka yang selalu menjaga sikap profesionalitas sebagai wartawan. Mereka selalu memosisikan diri sebagai pihak yang sepenuhnya imparisial (tak berpihak), bersikap independen, berpikir kritis, meliput secara baik, mengatasi kendala kerja baik yang bersifat pribadi maupun kantor. Bukan hanya itu, wartawan media ini paling banyak saya temukan sebagai peserta pelatihan, lokakarya dan kegiatan jurnalistik lainnya. Sepertinya mereka tak pernah capai untuk selalu mencoba meningkatkan kemampuan dirinya. Awak media ini dalam setahun juga beberapa kali menggelar pertemuan untuk memperkuat misi media. Sesuatu yang tak saya temukan di media lain.

Media ini memilih penulisan berita dalam bentuk *feature* atau *news feature*, dan selalu menghindari bentuk berita secara langsung (*straight news*). Saya setuju sepenuhnya dengan model liputan seperti ini, selain untuk menghindari praktek jurnalisme omongan (*talking news*), model seperti itu juga lebih kaya dan berwarna dalam menggambarkan kesia-siaan sebuah peperangan. Apalagi peperangan yang melibatkan sesama anak bangsa sendiri hanya karena tuntutan ekonomi dan kehidupan yang layak tak terpenuhi, serta tak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat Aceh.

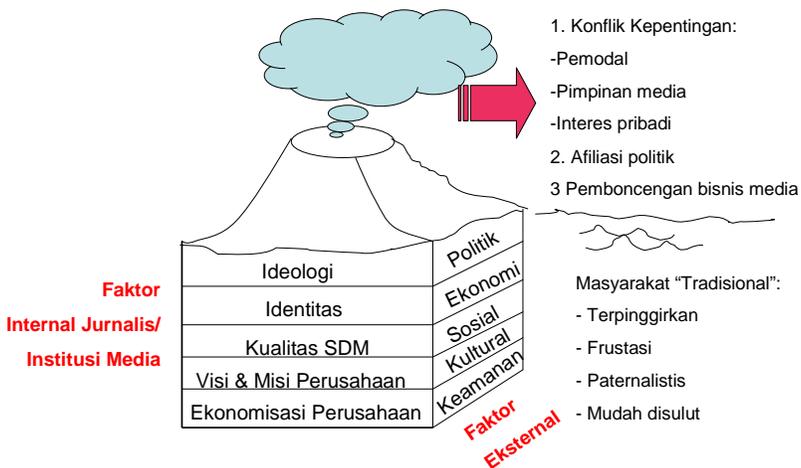
Para wartawan media ini telah mencoba memenuhi prinsip peliputan yang baik. Yaitu selalu bersikap obyektif, adil, seimbang, akurat dan cermat. Namun demikian ada juga yang meragukannya. Bisa dipastikan bahwa pihak yang meragukan umumnya tak memahami pekerjaan jurnalistik yang diemban *Acehkita*. Namun, dari kalangan awak media yang saya temui umumnya mereka angkat topi dengan media ini. Media ini seolah hendak menyatakan bahwa korban pertama dalam peperangan adalah kebenaran.

Selama konflik Aceh terbukti bahwa semua pihak yang terlibat berkeinginan mengendalikan media. Bagi mereka yang terlibat konflik, media dijadikan alat propaganda, bukan alat untuk menyampaikan kebenaran. *Acehkita* berhasil keluar dari situasi yang menekan seperti itu. *Acehkita* boleh bersyukur bahwa seluruh awaknya telah berhasil keluar dari berbagai potensi konflik kepentingan sebagaimana tergambar dalam

Bagan 1.

Masyarakat tradisional yang bagi sebagian media merupakan ancaman, bagi *Acehkita* justru menjadi pembaca potensial.

Bagan 1. Peta Konflik Kepentingan Media/Jurnalis



Namun, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana *Acehkita* pasca-Helsinki? Khususnya bila kawasan Aceh telah berubah menjadi kawasan yang damai dan bebas konflik? Apakah *Acehkita* akan berhenti terbit? Atau terbit laiknya media *mainstream*?

Pertanyaan tersebut barangkali perlu dijawab. Untuk masa-masa sekarang barangkali model liputan *Acehkita* belum akan banyak berubah, mengingat potensi kekerasan belum sepenuhnya punah. Di sana-sini masih terjadi aksi saling provokasi dan baku tembak. Masih ada pihak-pihak yang tak menginginkan proses perdamaian berjalan mulus. Bukan tak mungkin kegagalan pada proses COHA juga bakal terulang melalui aksi mobilisasi massa dalam satuan-satuan milisi.

Namun, pemerintah telah bertekad akan menyukseskan perdamaian

meski mendapat tentangan dari sejumlah fraksi di DPR. Apalagi perekonomian Indonesia tengah bangkrut dan kebijakan keamanan pemerintah terhadap Aceh di masa lalu mendapat banyak sorotan. Aceh sendiri masih merupakan daerah bencana yang mengundang munculnya solidaritas internasional dan menjadikannya sebagai kawasan terbuka. Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh hanya bisa berjalan dalam keadaan damai. Tanpa kedamaian dana hibah tak akan bisa cair. Keadaan di Aceh telah mengalami perubahan signifikan, terutama pasca-Helsinki.

Bagan 2. Situasi Aceh



Di masa damai Aceh akan menghadapi masalah baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Bila sebelum penandatanganan nota kesepakatan Helsinki Aceh dibayang-bayangi berbagai tindakan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hak sipil dan politik, maka pasca-Helsinki akan dihadapkan dengan berbagai persoalan pelanggaran kesepakatan. Juga pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Wacana tentang pers Pancasila dan jurnalisme patriotik akan digantikan dengan munculnya pers bebas dan pers industri. Liputan kontak senjata bakal digantikan dengan liputan soal dara manis asal Aceh. Bukan tak mungkin secara perlahan di Aceh akan muncul jurnalisme industri yang mengedepankan unsur sensasional, kontroversial, permasalahan “banyak” orang yang sebetulnya lebih diwakili kaum elit. Iklan-iklan akan

mendominasi ruang media. Kaidah anomali dalam ilmu jurnalistik yang menitikberatkan unsur keanehan, sensasi, konflik dan pertikaian sebagai sebuah isu yang seksi bukan tak mungkin akan muncul di Aceh.

Apa yang bisa dilakukan media semacam *Acehkita*? Barangkali *Acehkita* perlu mengubah paradigma liputannya. Ide jurnalisme damai yang berfungsi untuk meredam konflik perlu diubah menjadi jurnalisme advokasi. Liputan harus lebih bertitik berat pada pekerjaan dengan menggunakan teknik investigasi untuk membongkar skandal yang berujung pada munculnya pertikaian horisontal. Penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan (ekonomi, politik, sosial), perbedaan budaya, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini biasanya akan muncul praktek jurnalisme omongan di mana pejabat yang karena nama besarnya dan legalitas jabatannya dianggap mewakili klaim atas seluruh kejadian dan kebenaran. Sedangkan para korban pembangunan akan tersingkir sepenuhnya dari pemberitaan ‘nasional’ akibat politik pembinaan pers oleh sejumlah lembaga/instansi.

Media ini harus mempertahankan para “korban”, rakyat kecil, kelompok minoritas, kelompok marginal, saksi mata, aktivis ornop dan kaum akademisi kritis sebagai subyek liputannya. Bukan pejabat yang kalau bicara selalu merujuk pada laporan ABS (asal Bapak senang). Jurnalisme advokasi yang menekankan pada pekerjaan *provetic* (pembuktian) perlu lebih banyak memberikan ruang kepada masyarakat yang tak mampu bersuara (*voiceless*). Wartawan perlu melindungi narasumber mereka yang rawan terhadap ancaman represi dan penghilangan secara paksa. Para wartawan di Aceh selain bertugas mengawal pembangunan kembali kawasan Aceh, juga bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian Helsinki dan pembentukan pemerintahan lokal yang betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat.

Pada model jurnalisme advokasi ada harapan bahwa pasca-pemuatan akan muncul perdebatan dan polemik terhadap sebuah kebijakan yang salah yang pada akhirnya akan berujung pada penguatan hak-hak rakyat, pemerintah bisa memperbaiki kebijakan, terciptanya *good governance*.

Gambaran masa depan Aceh adalah sebuah gambaran daerah yang akan penuh dengan komodifikasi. Dana internasional yang luar biasa besarnya mengalir ke Aceh, sebagaimana juga dana besar yang pernah mengalir

ke Timor Timur pasca-jajak pendapat. Akan ada mega proyek bisnis dan persaingan pemenangan tender yang melibatkan pengusaha-penguasa domestik dan internasional. Akan muncul persaingan lapangan kerja dan kecemburuan yang melibatkan lembaga internasional dan gaji staf yang berbeda antara staf lokal dan staf pendamping yang fasih berbahasa Inggris. Bukan tak mungkin bakal bermunculan sejumlah pasar kaget yang diikuti dengan meroketnya biaya hidup. Persoalan konflik bersenjata akan digantikan dengan berbagai masalah “pembangunan” seperti marginalisasi, diskriminasi, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lain.

Proses perdamaian dan rehabilitasi Aceh seharusnya bisa menempatkan rakyat Aceh sebagai satu-satunya aktor utama yang paling berkepentingan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi wilayah mereka. Bencana tsunami harus dijadikan perspektif untuk mengembalikan kedamaian, keadilan dan kedaulatan kepada rakyat Aceh. Hasil perundingan Helsinki, meski tak melibatkan komponen *civil society* di kedua pihak, harus jadi titik balik bagi terciptanya perdamaian. Apalagi ada pengamat dari negara Uni Eropa dan sejumlah negara Asean. Semua upaya untuk menorpedo perdamaian seperti pembentukan milisi, penggerakan massa untuk mendemo pos-pos pemantauan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa COHA jangan sampai terulang.*

Tabel 1. Prakarsa dan Penanganan Perdamaian

	Tindakan Sementara (Jangka Pendek)	Tindakan Jangka Menengah	Tindakan jangka Panjang
Militer/ Keamanan	Perlucutan senjata, demobilisasi faksi-faksi, pemisahan militer/polisi	Konsolidasi angkatan bersenjata nasional yang baru, integrasi polisi nasional	Demiliterisasi politik, transformasi budaya kekerasan
Politik/ Konstitusi	Mengelola masalah pemerintahan transisi, reformasi konstitusi	Mengelola tantangan Pemilu yang bebas, jujur dan adil	Menumbuhkan tradisi pemerintahan yang baik, termasuk menghormati demokrasi, supremasi hukum, pengembangan civil society
Ekonomi/ Sosial	Bantuan kemanusiaan, layanan kebutuhan pokok, komunikasi	Rehabilitasi masyarakat yang telah dimukimkan kembali, demobilisasi tentara, mengedepankan pembangunan infrastruktur dan pendidikan	Kebijakan ekonomi makro yang stabil dalam jangka panjang, manajemen ekonomi, pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, keadilan yang merata
Psiko-Sosial	Mengelola masalah ketidakpercayaan	Membangun dialog lintas batas	Penyembuhan penderitaan psikologis, rekonsiliasi

<p>Pers/Media Elektronik</p>	<p>Mengedepankan liputan jurnalisme damai</p>	<p>Mengembangkan sikap yang independen dan non-partisan</p>	<p>Mengembangkan jurnalisme investigasi dan jurnalisme advokasi untuk mengimbangi liputan hiburan dalam industri pers. Jurnalisme investigasi diperlukan untuk melawan kecenderungan praktek KKN yang dilakukan kelompok elit politik-bisnis-militer. sedangkan jurnalisme advokasi diperlukan untuk mengungkap ketidakadilan yang menimpa kaum marginal.</p>
<p>Internasional</p>	<p>Dukungan langsung untuk mendukung proses perdamaian yang peka terhadap budaya masyarakat penerima</p>	<p>Mengelola prioritas yang saling bersaing antara perdamaian dan keadilan</p>	<p>Integrasi ke dalam struktur regional dan global yang setara dan saling menguntungkan</p>

Keteguhan Jurnalis

Wartawan *The New York Times*, Judith Miller, memilih dijebloskan ke dalam penjara ketimbang mengungkapkan sumber yang membocorkan nama agen CIA. “Jika jurnalis tak bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia, tentu jurnalis tak akan bisa menjalankan fungsinya. Tidak akan ada sebuah pers bebas,” ujarnya kepada hakim yang mengadili dirinya pada 6 Juli 2005.

Miller memilih bersikeras untuk tak mengungkapkan jatidiri narasumbernya dengan keyakinan bahwa hal itu demi kebaikan demokrasi Amerika. Ia menyatakan bahwa keputusannya untuk melakukan pembangkangan sipil merupakan sebuah hak yang diambilnya berdasarkan hati nurani. Ia yakin, bahwa keputusannya merupakan sesuatu yang fundamental bagi sistem hukum AS dan akan terus dihormati sepanjang sejarah negara itu.

Namun, hakim Hogan yang mengadili kasus Miller menganggap keputusan Miller sebagai “menentang aturan hukum”. Miller dianggap bersikap tak kooperatif, menolak bekerja sama dengan jaksa penyidik federal untuk mengungkap pelaku dalam pemerintahan Bush yang membuka jatidiri Valerie Plame sebagai anggota CIA. Valerie sendiri adalah istri mantan dubes AS yang mengritik Presiden Bush soal senjata

pemusnah massal Irak. Di AS, pembocoran nama seorang agen CIA merupakan sebuah pelanggaran hukum federal yang sangat serius.

Pemenjaraan Miller dalam sejarah Amerika merupakan sebuah peristiwa besar yang jarang terjadi, mengingat kebebasan pers di AS dilindungi konstitusi. Bahkan di beberapa negara bagian di AS diterbitkan undang-undang yang melindungi wartawan dari keharusan membuka identitas narasumber rahasia mereka.

Bagaimana di Indonesia? Tercatat sejumlah jurnalis yang pernah menolak mengungkap narasumber mereka. Antara lain HB Jassin yang bersedia meringkuk di penjara ketimbang mengungkap jatidiri Ki Panji Kusmin yang tulisannya berjudul “Langit Makin Mendung” bikin heboh dan mengundang kemarahan umat Islam dan penguasa. Terakhir adalah wartawan TEMPO, Achmad Taufik, menolak mengungkap jatidiri pembocor proposal yang diajukan pengusaha Tommy Winata dalam pemberitaan “Ada Tommy di Tenabang”.

Jurnalis Indonesia barangkali perlu belajar dari keteguhan dan sikap jurnalis seperti Miller. Terus terang, tak banyak jurnalis Indonesia yang berani bersikap seperti Miller dan juga HB Jassin.

Di Indonesia para jurnalis umumnya lebih suka bekerja sama dengan militer dan polisi. Mereka umumnya secara terbuka bersedia membagi informasi yang sebetulnya dikumpulkan untuk kepentingan redaksi kepada aparat keamanan, dan juga aparat intelijen. Dengan kata lain, sebetulnya jurnalis di Indonesia sangat toleran dan baik hati untuk membagikan informasi kepada orang di luar redaksi. Kadang dengan alasan demi “nasionalisme”, kadang karena merasa harus membalas budi pihak yang selama ini telah membantunya. Tapi lebih menyedihkan lagi, bahwa ada banyak jurnalis yang tak paham bahwa membagi informasi yang dimiliki, yang dicari dan dikumpulkan dengan dana dari kantor redaksi tempat bekerja, adalah hal yang melanggar nilai-nilai profesionalitas dan independensi seorang jurnalis.

Pada dasarnya loyalitas seorang jurnalis hanya kepada warga. Bahkan kantor redaksi sebetulnya hanya merupakan representasi dari kepentingan

masyarakat. Dalam bekerja, mulai dari mencari data, mengumpulkan informasi hingga menulis laporan, seorang jurnalis berusaha mempersempit informasi yang seakurat mungkin kepada masyarakat pembacanya. Demikian pula seorang jurnalis melakukan pekerjaan penyelidikan, kadang dengan cara menyamar dan mencuri informasi, tak lain adalah demi pengungkapan skandal yang merugikan publik.

Tentu saja hal ini berbeda dengan kepentingan seorang anggota intel yang melakukan tugas untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Seorang intel diperbolehkan menggunakan cara-cara kotor dan kekerasan tak lain membuat laporan. Laporan sang intel bersifat tertutup dan hanya disampaikan hanya kepada atasannya guna ditinjaulanjuti berdasar garis komando. Laporan yang dibuat seorang intel, sebelum kasusnya diungkap masih bersifat rahasia negara. Sedangkan wartawan, membuat laporan untuk sesegera mungkin disiarkan kepada publik, pada masyarakat luas. Dalam membuat laporan, seorang wartawan selalu berkejaran dengan waktu.

Setiap jurnalis seharusnya menjaga informasi yang diperolehnya dan hanya “membuka” melalui tulisan yang dibuat untuk media tempatnya bekerja. Kalaupun dalam meliput di lapangan (terutama di daerah konflik) seorang jurnalis mendapat bantuan dan dukungan dari aparat keamanan (militer maupun polisi), ia tak perlu mengungkap informasi yang didapatnya kepada aparat. Ia harus sadar sepenuhnya bahwa informasi yang diberikan kepada aparat menyangkut lokasi, komposisi kekuatan, dan jatidiri si narasumber dapat digunakan sebagai dasar bagi operasi perburuan yang dapat membahayakan sang narasumber.

Di masa lalu, di daerah “perang” seperti di Aceh (masa DOM) dan Timor Timur (ketika masih menjadi Propinsi RI ke-26) ada banyak jurnalis ber”embeded”-ria dengan aparat militer. Bahkan secara terang-terangan ada sejumlah jurnalis yang bersedia berperan ganda, jadi koresponden sebuah media di Jakarta sekaligus jadi “cuak” atau ”mauhu”. Mereka pura-pura berwawancara dengan pemimpin gerilya di hutan, tapi ketika pulang mereka membagi semua informasi yang didapat juga foto-foto hasil jepretan kepada aparat militer yang sebelumnya pernah memberinya akses informasi dan dukungan peliputan.

Jangan heran pula bila pekerjaan sebagai jurnalis yang dianggap oleh publik sebagai profesi yang terhormat dan posisi netral, banyak disalahgunakan. Ada banyak aparat keamanan dan anggota intelijen yang memiliki kartu pers, terutama di media-media tertentu yang isinya lebih merupakan corong penguasa.

Para jurnalis profesional dengan cepat bisa mengidentifikasi mereka saat bersama-sama di lapangan. Umumnya mereka bekerja dengan menggunakan atribut kewartawanan seperti rompi, menyangang *blocknote*, membawa *tape recorder* dan kamera. Tapi jarang bertanya. Mereka hanya mencatat dan merekam pertanyaan jurnalis lain dengan narasumber yang perlu mereka amati. Umumnya mereka juga memiliki pengetahuan umum, terutama menyangkut narasumber, yang minim.

Para jurnalis “samaran” ini juga tak ragu untuk menggertak dan mengancam jurnalis yang kritis dalam meliput. Wartawan Albert Kuhon saat masih bekerja di SCTV pernah mengalami mimpi buruk pada hari-hari terakhir Indonesia harus angkat kaki dari Timor Timur pada 1999. Ia diancam dengan badik oleh seorang anggota intelijen yang sebelumnya mengaku sebagai jurnalis dari sebuah kantor berita milik pemerintah. Kuhon terpaksa menyerahkan kaset film tentang aksi pembakaran yang ada dalam kameranya kepada si wartawan yang sebelumnya sempat sama-sama menginap di sebuah markas militer, satu-satunya tempat yang paling aman di kota Dili pada waktu itu.

Profesi jurnalistik adalah profesi yang penuh risiko. Ribuan jurnalis di dunia dilaporkan mengalami penyerangan. Sebagian dari mereka harus kehilangan nyawa. Namun, ada banyak orang yang bertahan dan terus memilih profesi sebagai jurnalis. Tentunya keteguhan dan sikap profesional seorang jurnalis merupakan kehormatan utama yang perlu terus dijaga oleh mereka sendiri.*

Jurnalisme Aceh Pasca-Pilkada

Sudah sekitar satu setengah tahun majalah *Acehkita* ditutup oleh pengelolanya akibat para wartawan majalah ini mempertanyakan masalah transparansi penggunaan dana. Sejak itu pula para wartawan *Acehkita* yang menyebar di mana-mana memilih berjuang mengisi ruang-ruang media *Acehkita* yang baru, yaitu media *dotcom*. Kantor yang semula, dengan pertimbangan keamanan, berada di Jakarta dipindahkan ke Banda Aceh.

Terus terang, sebagai ombudsman majalah *Acehkita*, saya tetap mengikuti perkembangan media ini melalui situs yang dibangun para wartawan di Banda Aceh. Meskipun belakangan kontak menjadi kurang intensif hingga membuat saya tak pernah menuliskan lagi catatan ombudsman saya. Saya bangga, bahwa semangat untuk terus berjuang tak pernah pupus di kalangan redaksi maupun mantan wartawan *Acehkita* yang kini telah menyebar dan bekerja di berbagai media.

Acehkita terbit sesaat setelah diberlakukannya status darurat militer untuk kawasan seluruh Aceh oleh pemerintahan Presiden Megawati. Media ini telah menjadi saksi penting bagaimana sesungguhnya dan semestinya sebuah media bisa mengambil peranan penting.

Melalui berbagai liputan yang independen dan kritis, media ini telah membuka mata jutaan orang bahwa di masa lalu terlalu banyak kekejian terhadap rakyat sipil di Aceh. Sejumlah foto wartawan *Acehkita* juga membuka mata dunia bahwa kejahatan perang terjadi di Aceh, seperti pengecatan tanda silang di rumah-rumah penduduk sipil. Ada banyak pujian mengalir kepada media ini, namun tak sedikit pula cacian dilancarkan sejumlah kalangan akibat kekritisannya dan ketajaman liputan *Acehkita*. Bahkan media ini pernah dituduh sebagai media yang membela Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, kini jaman telah berubah total. Irwandi Yusuf yang tadinya dikejar-kejar dan dipenjara oleh pemerintah Presiden SBY telah dilantik menjadi gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Begitu pula Mohammad Nazar ketua SIRA yang sempat dibuang dan dipenjarakan di Jawa Tengah, kini telah menjadi Wakil Gubernur Propinsi Aceh. Tentara, polisi dan pegawai negeri yang dulunya menganggap mereka berdua adalah musuh negara kini menghormatinya sebagai pemimpin. Di Aceh mereka berdua tidak sendirian, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang anggota mantan GAM telah beralih status dari "pesakitan" menjadi orang-orang terhormat.

Aceh yang tadinya merupakan sebuah daerah tertutup, sejak tsunami 26 Desember 2004 telah berubah menjadi daerah terbuka. Dana internasional dalam jumlah yang besar masuk ke kawasan ini. Pemerintah Indonesia juga membentuk BRR untuk menangani masalah koordinasi dalam hal rekonstruksi Aceh pasca-tsunami. Sejumlah wartawan dan akademisi mengisi berbagai lowongan kerja baru yang terbuka akibat kehadiran berbagai lembaga internasional yang butuh tenaga dan staf lokal. Hal ini mengingatkan saya pada keadaan Timor Leste (dulu TimorTimur) ketika berada di bawah pemerintah sementara PBB (UNTAET).

Jurnalisme seperti apa yang dibutuhkan Aceh saat ini? Media tetap harus bisa menjalankan enam macam fungsi. Yaitu fungsi sebagai anjing penjaga (*watch dog*), fungsi pengawasan (*surveillance*), fungsi penafsiran (*interpretation*), fungsi penghubung (*linkage*), fungsi penerus nilai-nilai (*transmission of values*), dan fungsi mobilisasi (*mobilisation*). Dalam menjalankan fungsi mobilisasi, media di Aceh, khususnya *Acehkita.com* harus bisa mengampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan juga bidang agama.

Situasi Aceh di masa damai justru penuh dengan kerawanan. Wartawan punya tugas mulia untuk ikut mewujudkan Aceh sebagai kawasan damai. Sebuah hal yang dirindukan olah rakyat Aceh setelah puluhan tahun hidup di bawah situasi operasi militer.

Para wartawan Aceh, selain harus mengawal pembangunan kembali kawasan Aceh, juga harus ikut mengawasi realisasi dan implementasi perjanjian Helsinki dan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Semua orang tahu bahwa ide rekonsiliasi masyarakat Aceh hingga kini masih terseok-seok. Kompromi yang dilakukan bahkan telah berhasil memberlakukan para mantan milisi bentukan TNI sebagai orang-orang yang berstatus sebagai korban. Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya menjadi payung bagi semua upaya rekonsiliasi di negeri ini juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.*

KORBAN SIPIL TANGGUNG JAWAB SIAPA?

MAJALAH

aceh **kita**

www.acehkita.com

lebih jujur

Kepada Siapa
ROTAN
Berpindah?



EDISI 018/TAHUN II/JULI 2005



Hak Publik

Ada banyak pembaca situs *Acehkita* menyatakan rasa syukur atas munculnya kembali situs *Acehkita* yang selama 3 minggu sempat menghilang dan sama sekali tak diketahui ke mana rimbanya. Selama *Acehkita* menghilang, selama itu banyak pula masyarakat kehilangan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di Aceh yang biasanya mereka baca dari situs ini. Sebagai ombudsman yang mewakili pembaca, saya ikut bersyukur bahwa “zaman telah kembali normal”, meski perselisihan justru kian parah dan tak mungkin lagi bisa mempertemukan pihak yang bertikai lagi.

Menurut saya, masyarakat sangat dirugikan dengan munculnya masalah di antara pengelola dan pengurus yayasan *Acehkita*. Para pengelola yang diwakili Serikat Pekerja Aceh Kita (Sepak) memutuskan melakukan pemogokan kerja karena tuntutan mereka kepada *board* yayasan untuk memecat ketua dewan pengurus Yayasan *Acehkita* tak diakomodasi. Justru yang muncul kemudian adalah permintaan agar pemimpin redaksi *Acehkita* mengundurkan diri atau di-PHK. Sepak kemudian justru mengeluarkan mosi tidak percaya kepada semua anggota *board* yayasan. Pihak *board* yayasan membalasnya dengan mengeluarkan surat perintah pengosongan kantor redaksi dan penghentian pencarian dana operasional *Acehkita*.

Namun yang jadi pertanyaan kenapa terjadi penutupan situs *Acehkita*. Rupanya pihak Yayasan Acehkita takut bahwa situs akan disalahgunakan oleh redaksi untuk melakukan provokasi melalui pemberitaan yang di-*upload* para pengelola *Acehkita*. Maklum, pengelolaan *Acehkita* dan nama yang terdaftar sebagai pengelola situs adalah staf redaksi (Sepak).

Di sinilah runyamnya persoalan. Rupanya pihak yang menutup *Acehkita* tak sadar bahwa dengan aksi penutupan situs *Acehkita*, yang dirugikan bukan salah satu pihak yang sedang bertikai, tapi masyarakat yang butuh informasi mengenai perkembangan Aceh. Apalagi di situs ini sebelumnya ditempelkan sejumlah ketentuan hukum, peraturan, catatan pelanggaran, dan semua hal yang merupakan data primer yang banyak dibutuhkan masyarakat yang mengikuti perkembangan Aceh.

Semestinya kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar saat mereka saling melancarkan gugatan dan jurus-jurus serangan balik, informasi bisa terus mengalir ke masyarakat. Kalau ini yang terjadi barangkali persengketaan tersebut bisa disebut sebagai persengketaan yang beradab, meski belum tentu hasilnya adil. Apalagi persengketaan justru muncul pasca perjanjian Helsinki di mana kedua belah pihak yang bertikai selama ini, TNI dan GAM, justru bisa berdamai.

Pelajaran dari sejumlah sengketa pengelolaan media mengajarkan bahwa bagaimana pun parahnya persengketaan, para pengelola dan wartawan sama sekali tak boleh mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur. Kita bisa melihat kembali bagaimana pertikaian yang pernah terjadi di majalah *Kartini* dan *Horizon*, koran *Merdeka*, dan lain-lain. Malah saat pemilik dan pengelola koran *Sinar Pagi* bertikai pada 1992, pembaca justru merasa untung karena muncul edisi kembar *Sinar Pagi* yang isinya berbeda satu sama lain.

Penutupan situs *Acehkita* adalah sebuah pelajaran mahal bagi kita semua. Ada banyak orang mempertanyakan agenda dan kebijakan di balik penutupan situs ini. Sebagian lagi menyatakan protes. Sebagai ombudsman, saya nyatakan bahwa saya tak mungkin menyampuri urusan internal *Acehkita*. Kewenangan saya sebagai ombudsman hanyalah menjadi pihak ke tiga saat ada pembaca yang merasa dirugikan dengan isi atau muatan *Acehkita*. Saat itu saya bisa mencari rahasia perut pengelola *Acehkita*, mempelajari secara seksama mulai alur penugasan, laporan, proses editing

hingga naskah yang dipublikasikan. Saat itulah secara independen saya bisa melaporkan temuan saya, sekaligus sikap saya. Kalau ada penyimpangan saya juga bisa menyampaikan tuntutan saya kepada pemimpin redaksi agar segera meminta maaf kepada pembaca ataupun memberi sanksi staf redaksi yang bersalah. Di luar itu, fungsi saya tak lebih hanya pribadi yang kebetulan kenal baik dengan para pengurus Yayasan Acehkita dan juga mengenal secara dekat semua anggota redaksi pengelola *Acehkita*.

Dengan menutup situs *Acehkita*, sebetulnya pihak penutup telah menutup hubungan dengan komunitas pembaca. *Acehkita* sebagai sebuah ruang publik telah ditutup. Tak ada lagi ruang bagi perdebatan. Tak ada lagi sarana yang bisa mengingatkan publik akan permasalahan penting yang perlu mereka ikuti. Padahal forum publik dalam media berfungsi untuk menghasilkan demokrasi.

Tindakan penutupan situs *Acehkita* secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengkopinya semua data penting yang ada dalam situs tersebut adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius. Pasal 18 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan” bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers seperti penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran” (ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3) bisa dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Di masa lalu (era Orda Baru) aparat negara kerap merecoki kerja wartawan. Di jaman reformasi, satgas partai, milisi dan massa bayaran sering menyatroni kantor redaksi dan mengakibatkan media tak bisa terbit. Namun, dalam kasus *Acehkita* justru pemilik jadi pihak dominan yang menghambat penyebaran informasi.

Sekarang situs *Acehkita* telah muncul kembali dengan tampilan baru. Namun banyak data penting hilang. Siapa yang dirugikan? Saya kira masyarakat adalah pihak yang paling banyak dirugikan dalam hal ini. Bukan hanya data yang tak lagi bisa ditemukan, tapi juga mutu pemberitaan saat terjadinya perselisihan antara redaksi dan pengurus yayasan telah berada pada fase penurunan. Bukan hanya secara kualitas, tapi juga kuantitas. Hal ini diakibatkan kesulitan dana yang dihadapi para wartawan *Acehkita* yang tetap bersikukuh untuk menghidupkan kembali situs dan majalah *Acehkita*

tanpa dana yang telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak yayasan. Untung pihak UNESCO segera turun tangan untuk mengatasi kesulitan pengelola situs *Acehkita*.

Sebagai ombudsman yang mewakili pembaca media ini, saya berharap apa yang pernah terjadi dengan situs *Acehkita* jangan sampai terulang lagi. Ini adalah sebuah cobaan bagi perkembangan media dan demokrasi kita.*

Epilog

Pelajaran Meliput dan Memahami Berita Konflik

Oleh Atmakusumah

Buku ini mengandung bahan pelajaran bagi pers dan publik, termasuk para pemimpin, bagaimana sebaiknya melakukan peliputan dan memahami pemberitaan mengenai konflik politik dan bersenjata di negeri kita. Media pers perlu lebih memberikan jawaban kepada pertanyaan para pembaca, pendengar, dan penonton—berbentuk *how* dan *why*—atas suatu peristiwa dan masalah agar dapat lebih dimengerti. Sebaliknya, penting bagi publik—terutama para pemimpin dan pejabat dalam pemerintahan—untuk menahan emosi agar pemberitaan yang kritis dapat diterima sebagai informasi yang bermanfaat untuk menetapkan putusan politik yang lebih tepat.

Dilema memang sering dialami oleh para wartawan dan media pers ketika harus meliput wilayah konflik atau suasana krisis. Apakah laporan jurnalistik dari wilayah atau tentang situasi seperti itu dapat segera dipublikasikan seketika itu juga? Ataukah perlu ditunda sampai keadaan cukup aman bagi keselamatan wartawan dan medianya? Apakah laporan itu dapat berbentuk berita biasa yang langsung disiarkan (berita lempang, *straight news*) dengan mengungkapkan fakta apa adanya? Ataukah sebaiknya dalam bentuk *feature* dengan gaya penulisan yang lebih “lembut”?

Konflik di Aceh dan Patriotisme

Dilema untuk meliput atau tidak meliput dan menyiarkan atau tidak menyiarkan hasil peliputan dari wilayah konflik atau tentang situasi kritis dialami oleh para wartawan dan media pers kita setidaknya sejak terjadi konflik dengan kekerasan di Maluku dan Maluku Utara serta di Sampit dan Poso. Terutama media pers lokal menghadapi kesulitan untuk mempublikasikan materi berita tertentu. Pemberitaan tertentu dapat dituduh memperkeruh keadaan atau sedikitnya dianggap bias.

Malahan, pers kita dipandang tidak nasionalistis atau tidak patriotis oleh pihak tentara dan pejabat pemerintah jika pemberitaannya mengutip keterangan dan pendapat pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang tidak lain adalah demi keseimbangan dan kelengkapan informasi. Kelengkapan pemberitaan bukan hanya dinantikan oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi mendalam, melainkan juga diperlukan oleh para pemimpin pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan politik.

Sebaliknya, pihak GAM dapat mengganggu peredaran—bahkan membakar mobil boks—surat kabar yang pemberitaannya mereka anggap berpihak kepada tentara dan pemerintah.

Padahal, baik standar jurnalisme profesional maupun kode etik jurnalistik mensyaratkan mekanisme kerja pers yang memastikan bahwa laporan jurnalistik itu faktual, akurat, dan objektif. Objektivitas pemberitaan mengandung keberimbangan dan *fairness* (keadilan), selain tidak bias, tidak diskriminatif, dan tidak berprasangka. Bila persyaratan

ini tidak dipenuhi, boleh jadi laporan tersebut bukanlah sebuah karya jurnalistik atau pemberitaan pers, melainkan siaran kehumasan dari media yang menjadi corong bagi kepentingan kelompok atau lembaga tertentu.

Nasionalisme dan patriotisme adalah sikap politik—yang bersifat individual dari wartawan ataupun institusional dari media pers, yang dapat saja diekspresikan melalui karya jurnalistik berupa artikel atau kolom opini, seperti dalam tajuk rencana. Sedangkan jurnalisme dan pers merupakan profesi, seperti juga bidang kedokteran dan kesehatan.

Oleh karena itu, antara nasionalisme atau patriotisme dan jurnalisme tidak harus dipertentangkan atau dicampur-aduk. Keduanya memiliki tempat dan posisinya sendiri-sendiri.

Para wartawan profesional bahkan berpandangan bahwa wartawan dan media pers juga bersikap patriotis ketika menjalankan tugasnya secara profesional karena informasi lengkap yang mereka publikasikan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya menyusun kebijakan yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan sasaran. Kerja profesional mereka, berupa laporan komprehensif, dapat ikut membantu dalam usaha menyelesaikan persoalan, atau setidaknya dapat membantu dalam memahami permasalahan.

***Embedded Journalists* di Indonesia**

Laporan yang berasal dari *embedded journalists*, wartawan yang hanya dapat memasuki wilayah konflik bersama-sama pasukan keamanan seperti tentara dan polisi, tidak menjadi masalah—asalkan karya jurnalistik mereka memenuhi persyaratan etika pers yang universal.

Setidaknya ada dua cara, bagaimana berita dari wilayah konflik dapat disampaikan kepada khalayak media pers. Satu di antaranya dalam bentuk *straight news*, dengan tidak melupakan kesinambungan (*follow up*) untuk mencapai keseimbangan informasi.

Sebagai contoh adalah pemberitaan harian *Koran Tempo* di Jakarta tentang kematian sejumlah penduduk di Aceh yang dituduh sebagai anggota GAM. Cara yang lain ditampilkan oleh wartawan harian *Asahi Shimbun* yang terbit di Tokyo, berupa *feature* dari perang Irak yang penyiarnya tidak dalam waktu seketika. Kedua cara itu dilakukan dengan penuh

kecermatan dan kehati-hatian.

Menjelang akhir Mei 2003 terjadi hiruk-pikuk dalam pemberitaan pers tentang konflik bersenjata di Aceh setelah *Koran Tempo* memuat laporan berjudul “TNI Tembak Mati Tujuh Pemuda Desa” sebagai berita utama di halaman depan. Berita ini, yang mengabarkan insiden di Desa Matangmamplam, Kabupaten Bireuen, pada hari Rabu, 21 Mei 2003, menyangsikan bahwa ketujuh pemuda itu adalah anggota pemberontak GAM. Akan tetapi, kesangsian itu dibantah oleh juru bicara Komando Operasi TNI di Aceh, dan bantahan itu pun dimuat oleh *Koran Tempo* dalam berita itu juga.

Laporan itu dimuat dalam edisi hari Jumat, 23 Mei 2003, dengan judul sepanjang delapan kolom, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Bahan berita itu antara lain dikutip dari kantor berita Perancis, Agence France-Presse (AFP), dan dilengkapi dengan laporan wartawan *Koran Tempo* sendiri.

Laporan yang sama dapat pula dijumpai dalam pemberitaan stasiun radio Inggris BBC. BBC sampai dua kali mengirimkan wartawannya ke desa tempat kejadian itu untuk melakukan pengecekan tentang insiden ini. BBC, memang, dikenal sebagai media siaran yang cermat dalam pekerjaan jurnalistiknya.

Koran Tempo dalam edisi hari berikutnya, Sabtu, 24 Mei, menyusuli laporannya dengan berita berjudul “TNI Usut Penembakan Tujuh Pemuda” sepanjang delapan kolom pula dan sebagai berita utama di halaman depan. Di halaman 6 pada edisi yang sama, surat kabar itu juga memuat tajuk rencana berjudul “Reaksi yang Terpuji.” *Koran Tempo* mengatakan dalam tajuknya:

“Jenderal Endriartono Sutarto bereaksi keras atas kepala berita koran ini kemarin. Menanggapi kabar penembakan tujuh pemuda desa oleh anggota TNI tersebut, Panglima TNI ini telah menginstruksikan pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki peristiwa menggegerkan itu....”

“Tanggapan cepat dan tegas pucuk pimpinan TNI atas informasi penembakan penduduk sipil ini merupakan tindakan terpuji....”

“Bagaimanapun, suasana kebebasan pers adalah iklim terbaik untuk memastikan bahwa sebuah operasi terpadu untuk mengatasi gerakan separatis akan tetap berjalan pada relnya dan tak melenceng menjadi

ajang kesewenang-wenangan. Setidaknya, itulah pelajaran yang dapat disimak dari berbagai penanganan terhadap konflik di Aceh di masa lampau.”

Koran Tempo melanjutkan pemberitaan dengan topik yang sama dalam edisi hari berikutnya lagi, Minggu, 25 Mei. Laporan *follow up* itu dimuat sebagai berita utama di halaman depan dengan judul sepanjang lima kolom: “Penembakan Tujuh Pemuda di Bireuen – TNI Investigasi Bersama Wartawan.”

Lima wartawan, termasuk dua orang dari *Tempo News Room*, diikutsertakan dalam kegiatan investigasi yang dipimpin oleh Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Kolonel Maman Taryana, untuk menyelidiki insiden di Bireuen itu. Tiga wartawan lainnya berasal dari harian *The Jakarta Post*, *Kompas Cyber Media*, dan *RCTI*.

Menurut *The Jakarta Post*, empat penduduk desa yang diperkenalkan oleh tentara kepada para wartawan sebagai saksi peristiwa ini menjelaskan bahwa ketujuh korban yang tertembak dalam insiden itu adalah anggota GAM yang berbaur dengan penduduk setempat. Akan tetapi, informasi yang diperoleh *Koran Tempo* dari upaya peliputan yang terpisah dari Tim Investigasi menyebutkan bahwa dua di antara ketujuh korban adalah anak remaja berumur 12 dan 13 tahun, penduduk Desa Cot Rabo Tunong dan bukan anggota GAM. Jadi, mirip dengan hasil peliputan AFP dan BBC.

Embedded Journalists di Irak

Dalam suasana serupa di luar Indonesia, wartawan *Asahi Shimbun*, Tsuyoshi Nojima, secara reguler menghadiri *briefing* yang diadakan oleh juru bicara militer Sekutu Amerika Serikat yang berperang di Irak pada bulan Maret 2003. Nojima sadar bahwa, sebagai salah seorang dari 600 *embedded journalists* yang mengikuti pasukan tentara, ia sulit untuk dapat melaporkan peristiwa peperangan itu secara benar-benar objektif.

Tetapi, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk bersikap tidak memihak kepada tentara Amerika Serikat. Dengan demikian, walaupun laporan jurnalistiknya tidak kritis terhadap Amerika, setidaknya tidak pro-Amerika, begitu pikir Nojima.

Suatu hari, seorang perwira senior Marinir Amerika Serikat mengatakan kepada sejumlah wartawan perang bahwa ia mempunyai “berita baik.” Ia memperlihatkan seperangkat perlengkapan perlindungan diri terhadap senjata kimia berupa topeng gas, alat penyemprot anti-racun, dan lain-lain. Marinir itu mengharapkan para wartawan percaya bahwa alat-alat itu membuktikan bahwa Irak, memang, memiliki senjata kimia.

Nojima memikirkan *briefing* itu sepanjang hari, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan berita itu ke korannya di Tokyo. Sepanjang hari ia hanya dapat bertanya-tanya pada dirinya sendiri: “Mengapa orang Irak meninggalkan topeng gas yang begitu berharga?” Ia tidak dapat sama sekali menghilangkan perasaan bahwa perlengkapan itu terlalu mudah dapat disita oleh tentara Amerika.

Sebaliknya, jika kemudian ternyata bahwa Irak akhirnya memang menggunakan senjata kimia, berarti Nojima keliru dalam perkiraannya. Bila itulah yang terjadi kelak, maka ia juga telah berbuat salah karena tidak segera mengirimkan berita tentang topeng gas itu ke kantornya di Tokyo.

Akan tetapi, katanya kepada dirinya sendiri, “Hanyalah sang waktu yang akan membuktikannya.”

Pikirannya saat itu ternyata benar. Amerika Serikat tidak pernah dapat membuktikan bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal. Justru itulah salah satu alasan bagi Sekutu Amerika Serikat untuk menyerbu Irak dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein.

Sebaliknya dari sikap hati-hati wartawan *Asahi Shimbun* itu, selama hampir dua tahun awal Perang Irak, 2003—2004, media pers Amerika Serikat yang dianggap patriotis lebih banyak memberitakan keterangan resmi kalangan pemerintah dan sekutunya tentang pengembangan program senjata pemusnah massal oleh Presiden Saddam Hussein dan kedekatannya pada Usamah bin Ladin. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2004, dua surat kabar paling berpengaruh di negeri itu, *The Washington Post* dan *The New York Times*, harus mengumumkan kekeliruan dalam kebijakan pemberitaan mereka.

The New York Times mengaku “bersalah karena telah menyajikan jurnalisme yang salah,” yang antara lain “menyebabkan seluruh dunia percaya bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.” *The Washington Post* malahan meminta maaf kepada publik karena merasa

lalai dan tidak bersikap skeptis terhadap klaim Gedung Putih tentang program senjata pemusnah massal di Irak. Setelah dilakukan serbuan ke Irak, ternyata di sana tidak diketemukan senjata kimia, senjata biologi, ataupun senjata nuklir. Saddam Hussein juga tidak terbukti telah bekerja sama dengan Usamah bin Ladin, pemimpin Al-Qaidah.

Langka Berita dari Timor Timur dan Papua

Benar, seperti dikatakan oleh Yosep Adi Prasetyo (Stanley) dalam buku ini, tugas pers bukan untuk sekadar menyenangkan seseorang atau sekelompok orang. Melainkan, untuk mengingatkan khalayak melalui pemberitaan yang disiarkannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya.

Media *Acehkita* berupaya untuk bisa memberitakan fakta-fakta berdasarkan kebenaran dan kejujuran bagi kepentingan masyarakat agar, misalnya, jangan sampai peristiwa seperti terlepasnya Timor Timur dari Indonesia terulang lagi.

Menurut pengamatan Stanley, pada masa itu semua media pers kita tidak mempunyai kemampuan untuk memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu—yang pada zaman Orde Baru menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Semua media pers justru memberitakan bahwa apa yang terjadi di wilayah itu sejak 1976 adalah hal biasa-biasa saja. Berita yang muncul semata-mata hanya tentang keberhasilan pembangunan, sehingga semua orang merasa terkesima saat Indonesia kalah dalam jajak pendapat di sana.

Mayoritas rakyat Timor Timur ternyata tidak pernah menghendaki kehadiran Indonesia. Siapa yang bersalah? Menurut Stanley, tak lain adalah pers kita yang selama itu tunduk pada kehendak kekuasaan.

Stanley mengingatkan bahwa ada banyak peristiwa penting yang terjadi di negeri ini, tetapi dilupakan begitu saja. Mulai dari Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S)—yang diikuti dengan genosida—sampai ke Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang juga menimbulkan korban jiwa.

Kata Stanley, barangkali kita memang perlu melawan lupa untuk mengubah ketidakjelasan menjadi kejelasan. Media massa perlu melawan ketidakbiasaan yang telanjur menjadi kebiasaan. Jangan dilanjutkan desas-

desus yang demikian kuat menjadi ciri pemberitaan pers pada masa Orde Baru, termasuk berita-berita yang direkayasa dari Papua.

Pemberitaan yang lebih terus terang pada tahun-tahun awal masa Reformasi tentang aspirasi yang berkembang di Aceh, menurut hemat saya, memberikan kontribusi kepada keberhasilan perundingan di Helsinki untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah berlarut-larut selama 30 tahun di provinsi itu. Pemberitaan demikian baru terjadi pada masa Reformasi setelah lahir kebebasan pers yang semula dikekang oleh pemerintah Orde Baru.

Laporan pers yang komprehensif tentang aspirasi di kalangan masyarakat Aceh, termasuk wawancara bahkan dengan para pemimpin militer Gerakan Aceh Merdeka, dapat diperkirakan menjadi pertimbangan dalam pemikiran strategis para perunding dari Pemerintah Pusat kita yang berangkat ke Helsinki. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, pemberitaan seperti itu dari Aceh—kalaupun ada—dipandang tidak nasionalistis dan tidak patriotis.

Oleh karena itu, pemberitaan yang lebih mendalam tentang konflik bersenjata di Papua dan Papua Barat, pada hemat saya, sama pentingnya dengan laporan yang lebih terus terang mengenai situasi di Aceh sebelum dicapai kesepakatan perdamaian di Helsinki.

Dengan demikian, informasi yang terbuka dan lengkap dapat sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menetapkan putusan politik yang lebih tepat—guna menyelesaikan permasalahan.

Atmakusumah

Pengamat pers. Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Mantan Ketua Dewan Pers, Direktur Eksekutif LPDS, dan Redaktur Pelaksana harian *Indonesia Raya*.



Yosep Adi Prasetyo, biasa dipanggil dengan **Stanley**, adalah orang yang berlatar belakang pendidikan insinyur teknik elektro yang juga belajar tentang ekonomi dan studi pembangunan. Selain pernah berkecimpung di dunia akademisi dan penelitian, ia lama berpengalaman di dunia jurnalistik sebagai wartawan, redaktur, pelatih wartawan, dan ombudsman di beberapa media cetak, serta menjadi mediator. Juga terlibat di beberapa organisasi.

Pada 2007-2012 Stanley terpilih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan menjadi Wakil Ketua I. Hingga kini ia masih aktif menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan dan pendidikan, termasuk pendidikan di lingkungan TNI-Polri dan sejumlah lokakarya/seminar. Ia pernah memimpin berbagai tim pengkajian, menjadi *amicus curiae* dan saksi ahli di pengadilan yang terkait dengan pers, serta menulis berbagai masalah HAM dan kebebasan pers di sejumlah jurnal. Ia telah menulis dan mengedit puluhan buku.

Tahun 2013 Stanley terpilih menjadi anggota Dewan Pers. Pada Dewan Pers Periode 2013-2016 ia menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum sambil aktif mengajar sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Ia terpilih lagi menjadi anggota dan sekaligus Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019.***

(CATATAN OMBUDSMAN ACEHKITA PADA MASA DARURAT MILITER ACEH)

Tulisan buku ini merupakan catatan Ombudsman majalah *Acehkita* yang hanya berumur 12 bulan. Isi buku ini merupakan tulisan asli Ombudsman yang dikirimkan ke redaksi *Acehkita*. Dari catatan dan dokumentasi yang ada tulisan ini pertama kali dibuat pada 7 Desember 2003 yang kira-kira diterbitkan 1 minggu setelahnya. Catatan Ombudsman terakhir untuk versi majalah dibuat pada 14 September 2005. Sedangkan dua tulisan Ombudsman dibuat pada Mei dan Juni 2007 untuk *Acehkita.com* yang meneruskan versi majalah yang telah berakhir pada Oktober 2005.

Buku yang merupakan catatan Saudara Stanley saat menjadi Ombudsman majalah *Acehkita* ini menarik untuk dicermati kembali. Catatan yang ada tak dapat dilepaskan dari situasi pers dan politik yang ada pada seputar pemberlakuan status darurat militer di Aceh pada Mei 2003. Dari kumpulan catatan ini kita dapat menemukan persoalan dan peran pers yang masih relevan saat ini.

..... **DR. Bagir Manan S.H., MCL**, Ketua Dewan Pers 2010-2016

Sebagai pengawas, Ombudsman tidak berada di bawah redaksi. Dia bekerja independen untuk mengaudit kerja-kerja redaksi bila ada keluhan dari pembaca. Karena itu, dia harus lebih sakti dari orang yang paling sakti di redaksi. Bila ini media alternatif di medan tempur, seorang Ombudsman haruslah orang yang juga pernah bekerja di masa-masa konflik.

..... **Dandhy Laksono**, Pemimpin Redaksi *Acehkita* 2003-2005

Benar, seperti dikatakan oleh Yosep Adi Prasetyo (Stanley) dalam buku ini, tugas pers bukan untuk sekadar menyenangkan seseorang atau sekelompok orang. Melainkan, untuk mengingatkan khalayak melalui pemberitaan yang disiarkannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya.

..... **Atmakusumah**, pengamat pers, pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)

